



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN PENANDAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA ANGGARAN DAN PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA

Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting

Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Bappenas
dan
Kementerian Keuangan
2025

KATA PENGANTAR

Dalam mendukung upaya percepatan pencegahan dan penurunan *stunting*, perlu dilakukan sinkronisasi program dan kegiatan lintas sektor mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, sampai dengan tingkat desa yang mengacu Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Di tingkat pusat, perlu dipastikan upaya pencegahan dan penurunan *stunting* diterjemahkan dalam proses perencanaan dan penganggaran Kementerian/Lembaga guna memastikan pengalokasian anggaran untuk *output-output* terkait intervensi penurunan *stunting*, dilakukan secara efektif dan efisien.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 107/2024 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 62/2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan memberikan mandat kepada Kementerian/Lembaga untuk melakukan penandaan kegiatan ke dalam beberapa tematik APBN, termasuk tema: Upaya Konvergensi Penanganan *Stunting*. Penandaan anggaran tematik *stunting* dilakukan untuk identifikasi berbagai program/kegiatan di Kementerian/Lembaga yang terkait dengan percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* pada level Rincian Output (RO). Proses penandaan ini dilakukan melalui mekanisme penyusunan Renja K/L melalui aplikasi KRISNA mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Renja K/L.

Selanjutnya, hasil identifikasi tersebut akan menjadi dasar bagi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian/Lembaga dalam melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja untuk memastikan kinerja pembangunan dan anggaran yang mendukung penurunan *stunting*. Hasil evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan tahun berikutnya. Pedoman ini disusun untuk mengawal dan memastikan proses penandaan sampai dengan proses evaluasi kinerja dilakukan secara inklusif melalui mekanisme yang telah ditentukan dan memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi perbaikan program.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan sehingga pedoman ini dapat diterbitkan. Selanjutnya, pedoman ini akan dimutakhirkan secara periodik berdasarkan pembelajaran dari penerapannya.

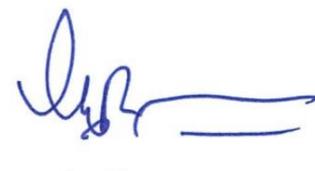
Jakarta, Mei 2025

Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan
Kementerian PPN/Bappenas



Amich Alhumami

Direktur Jenderal Anggaran
Kementerian Keuangan



Luky Alfirman

TIM PENYUSUN

TIM PENGARAH:

Luky Alfirman

Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan

Amich Alhumami

Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas

Rofyanto Kurniawan

Direktur Penyusunan APBN, DJA- Kementerian Keuangan

Putut Hari Satyaka

Direktur Anggaran Bidang PMK, DJA- Kementerian Keuangan

Diah Lenggogeni

Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas

KOORDINATOR PENULIS:

Agung Hidayat Purwanto

Direktorat Penyusunan APBN, DJA-Kementerian Keuangan

Inti Wikanestri

Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas

Muhammad Fajar Adipati

Direktorat Penyusunan APBN, DJA-Kementerian Keuangan

Dimas Adityo Kusumo

Direktorat Anggaran Bidang PMK, DJA-Kementerian Keuangan

TIM PENULIS:

Jony Chandra

Tenaga Ahli Analisis Kinerja Anggaran, Sekretariat INEY-Direktorat KGM Kementerian PPN/Bappenas (2020-2023)

Ririn Ariani Dewi

Tenaga Ahli Analisis Kinerja Program, Sekretariat INEY-Direktorat KGM Kementerian PPN/Bappenas (2022-2023)

Febriansyah Soebagio

Tenaga Ahli Analisis Kinerja Anggaran dan Program, Sekretariat INEY-Direktorat KGM Kementerian PPN/Bappenas

KONTRIBUTOR:

Dinda Dea Pramaputri, Vera Wardyani

Direktorat Penyusunan APBN, DJA- Kementerian Keuangan

Iwan Noor Hidayat, Irwan Sujarwo Sianipar, Wirawan, Rinawati

Direktorat Anggaran Bidang PMK, DJA-Kementerian Keuangan

Miftahudduha, Ferial Afra Raisa Mumtaz, Puji Triwijayanti, Dian Putri M. Saraswati,

Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
TIM PENYUSUN	2
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GAMBAR	6
DAFTAR SINGKATAN	7
BAB I PENDAHULUAN	8
1.1 Latar Belakang	8
1.1 Tujuan	9
1.2 Ruang Lingkup	10
1.2.1 Cakupan Buku Pedoman	10
1.3.2 Lingkup Tanggung Jawab	10
1.3. Proses Perencanaan dan Penganggaran	14
1.4. Siklus Perencanaan dan Penganggaran	15
1.5. Koordinasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting	16
BAB II KERANGKA KONSEPTUAL KEBIJAKAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING	18
2.1. Kerangka Konseptual Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting	18
2.2. Indikator Antara Perpres 72 Tahun 2021	20
BAB III PENANDAAN ANGGARAN	PERCEPATAN
PENCEGAHAN STUNTING.....	23
3.1 Tujuan Penandaan Anggaran	23
3.2. Intervensi Percepatan Pencegahan Stunting	23
3.2.1 Intervensi Gizi Spesifik	25
3.2.2 Intervensi Gizi Sensitif	26
3.2.3 Intervensi Gizi Dukungan	28
3.3. Penandaan Anggaran pada Level Rincian Output (RO) Kegiatan	29
3.4. Pra Penandaan.....	32
3.4.1 Pedoman Penandaan pada KRISNA K/L di Tahun Perencanaan	32
3.4.2 Identifikasi K/L dan Unit Kerja yang Memiliki Program terkait stunting	32
3.4.3 Analisis Penandaan RO untuk Dokumen Ringkasan Tagging	36
3.4.4 Pengaturan Penandaan Anggaran untuk Dokumen Ringkasan Tagging RO di Tahun Perencanaan	37
3.4.4 Kriteria RO Tematik Stunting yang dilakukan Penandaan	38
BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PENGANGGARAN PELAKSANAAN PROGRAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING	50
4.1. Definisi dan Tujuan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja	50
4.2. Konsep Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K/L yang Mendukung Percepatan Penurunan Stunting.....	51

4.3. Klasifikasi, Laporan Realisasi Anggaran Tahun Berjalan dan Evaluasi Kinerja.....	55
4.4. Sistem Pemantauan Kinerja Pembangunan dan Anggaran.....	55
4.4.1. Pemantauan Realisasi Belanja di Tingkat Pemerintah Pusat pada Aplikasi OM-SPAN.....	55
4.4.2. Pemantauan Realisasi Belanja di Tingkat Pusat pada Aplikasi SMART dan E-Monev.....	55
4.4.3. Pemantauan Realisasi Belanja di Tingkat K/L.....	56
4.5. Kerangka Hukum Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Percepatan Penurunan Stunting Kinerja Pembangunan dan Anggaran.....	57
4.5.1. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2023.....	57
4.5.2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024.....	59
4.5.3. Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER-7/AG/2021.....	59
4.5.4. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang penyusunan Spending Review.....	60
4.5.5. Evaluasi oleh masing-masing K/L.....	61
4.5.6. Form Evaluasi Mandiri.....	61
4.6. Metode Analisis Laporan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Anggaran dan Pembangunan Program Percepatan Penurunan Stunting.....	63
4.6.1. Analisis Perkembangan Penandaan RO.....	63
4.6.2. Analisis Perkembangan Pagu.....	65
4.6.3. Analisis Kinerja Anggaran.....	66
4.6.4. Analisis Kinerja Pembangunan.....	67
4.6.4.1. Pelaksanaan Konvergensi.....	68
4.6.4.2. Kinerja Capaian Output.....	69
4.6.5. Kinerja Program di Lokasi Prioritas.....	69
4.6.6. Metode Analisis Lainnya.....	71
BAB V PENYUSUNAN LAPORAN DAN DISEMINASI INFORMASI.....	72
5.1. Penyusunan Pelaporan.....	72
5.1.1. Pelaporan Evaluasi Kinerja Belanja K/L yang Mendukung Pelaksanaan PPPS.....	72
5.1.2. Kaitan Pelaporan Evaluasi Kinerja Belanja K/L dengan Laporan Evaluasi Lainnya.....	76
5.2. Diseminasi Informasi.....	79
BAB VI PENUTUP.....	81
LAMPIRAN.....	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1-1. Pembagian Peran dan Tanggung Jawab Eselon 2	11
Tabel 1-2. Susunan Keanggotaan Tim Percepatan Penurunan Stunting	17
(sesuai Perpres Percepatan Penurunan Stunting No. 72/2021)	17
Tabel 2-1. Intervensi Gizi Spesifik Percepatan Penurunan Stunting Berdasarkan Stranas dan Perpres 72/2021	20
Tabel 2-2. Intervensi Sensitif Percepatan Penurunan Stunting Berdasarkan Stranas dan Perpres 72/2021.....	21
Tabel 3-1. Kementerian/Lembaga yang Berkontribusi dalam Percepatan Penurunan Stunting.	24
Tabel 3-2. Daftar Kata Kunci untuk Mengidentifikasi Anggaran Stunting	33
Tabel 3-3. Contoh Analisis Penandaan RO.....	36
Tabel 3-4. Contoh Tabel sebagai Alat Bantu K/L Untuk Memetakan Anggaran Terkait Stunting	40
Tabel 3-5. Penjelasan Proses Penandaan Anggaran Stunting.....	41
Tabel 3-6. Metode Perhitungan Seluruh Anggaran di Level RO dan Komponen Terkait Stunting	44
Tabel 3-7. Metode Perhitungan Hanya Anggaran di Level Komponen tertentu Terkait Stunting	45
Tabel 3-8. Metode Perhitungan Hanya Anggaran di bawah Level Komponen Terkait Stunting	46
Tabel 3-9. Metode Perhitungan Hanya Anggaran yang Menysar Sasaran Prioritas Stunting ...	47
Tabel 3-10. Metode Perhitungan Hanya Anggaran dengan Pembobotan di Level RO atau Komponen.....	48
Tabel 4-1. Uraian Kebutuhan Data untuk Pemantauan dan Evaluasi dari Lintas Sektor	51
Tabel 4-2. Penjelasan Alur Pemantauan dan Evaluasi	52
Tabel 4-3. Contoh Format Evaluasi Mandiri (Self-Assessment) Kinerja Pembangunan dan Anggaran Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting.....	61
Tabel 4-4. Contoh Daftar Pelaksanaan RO Tematik Stunting di Lokasi Prioritas TA 2022	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1. Lingkup Tanggung Jawab dalam Penandaan, Pelacakan, Pemantauan, dan Evaluasi Kinerja Pembangunan dan Anggaran melalui Belanja K/L.....	11
Gambar 1-2. Kaitan Proses Perencanaan dan Penganggaran Tahunan	15
Gambar 1-3. Siklus Perencanaan dan Penganggaran	16
Gambar 2-1. Target Prevalensi Stunting pada Sasaran Utama Prioritas Nasional 4	18
Gambar 2-2. Kerangka Konseptual Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi	19
Gambar 3-1. Kerangka Hasil Percepatan Penurunan Stunting	25
Gambar 3-2. Intervensi Gizi Spesifik Prioritas	26
Gambar 3-3. Intervensi Gizi Sensitif Prioritas	27
Gambar 3-4. Intervensi Gizi Dukungan pada Pilar Stranas Stunting.....	29
Gambar 3-5. Perubahan Struktur Data Renja Kementerian/Lembaga berdasarkan RSPP	30
Gambar 3-6. Dokumen Ringkasan RO Tematik Stunting yang dimanfaatkan sebagai	32
Gambar 3-7. Tahapan Identifikasi RO dalam Proses Penandaan Tematik Stunting Belanja K/L	37
Gambar 3-8. Keterkaitan Penandaan Anggaran terhadap Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting	39
Gambar 3-9. Proses Penandaan Anggaran Stunting	40
Gambar 3-10. Pertemuan Rekonsiliasi Penandaan RO Tematik Stunting n+1	43
Gambar 4-1. Alur Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran	52
Gambar 4-2. Contoh Surat Permintaan Pengisian Data Form Evaluasi Mandiri K/L untuk Penyusunan Laporan Kinerja Pembangunan dan Anggaran Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting	62
Gambar 4-3. Perbandingan Jumlah RO Tematik Stunting TA 2022-2023	64
Gambar 4-4. Perkembangan Penandaan RO Tematik Stunting TA 2023.....	64
Gambar 4-5. Keterkaitan RO Tematik Stunting TA 2022 dengan Perpres 72/2021	65
Gambar 4-6. Contoh Analisis Perkembangan Pagu Anggaran RO Tematik Stunting TA 2022.....	66
Gambar 4-7. Contoh Analisis Realisasi Anggaran Tematik Stunting TA 2022 di level Analisis Lanjutan berdasarkan Jenis Intervensi.....	67
Gambar 4-8. Contoh Analisis Keterkaitan Realisasi Anggaran RO Tematik Stunting.....	67
Gambar 4-9. Contoh Analisis Pelaksanaan Konvergensi RO Tematik Stunting terhadap Capaian Output.....	68
Gambar 4-10. Contoh Analisis Capaian Output RO Tematik Stunting TA 2022	69
Gambar 4-11. Contoh Kunjungan Lapangan RO Tematik Stunting di Kabupaten Lima Puluh Kota TA 2022	70

DAFTAR SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
DAK	: Dana Alokasi Khusus
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DJA	: Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan
e-monev	: Elektronik Monitoring dan Evaluasi
HPK	: Hari Pertama Kehidupan
Kemenkeu	: Kementerian Keuangan
Kemen PPN	: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
K/L	: Kementerian/Lembaga
KRISNA	: Sistem Integrasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran
KRO	: Klasifikasi Rincian Output
LKPP	: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
Musrenbang	: Musyawarah Rencana Pembangunan
OM-SPAN	: <i>Online Monitoring</i> Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini
Permen	: Peraturan Menteri
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
Renja-K/L	: Rencana Kerja Kementerian dan Lembaga
Riskesdas	: Riset Kesehatan Dasar
RKA-K/L	: Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga
RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
RO	: Rincian Output
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RSPP	: Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran
SMART	: Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu
SAKTI	: Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
SEB	: Surat Edaran Bersama
SK	: Surat Keputusan
Stranas <i>Stunting</i>	: Strategi Nasional Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> (PPS)
SPAN	: Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia dibawah lima tahun (balita) akibat **kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang** terutama dalam periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan. Anak tergolong *stunting* apabila panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan melalui Permenkes Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak.

Capaian penurunan *stunting* dari tahun 2019 hingga 2024 menunjukkan hasil yang signifikan. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi *stunting* telah menunjukkan penurunan dari 24,4 persen pada tahun 2021 menjadi 21,5 persen berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) di tahun 2023. Saat ini upaya penurunan *stunting* telah masuk pada periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025-2029, yang mengamankan target prevalensi sebesar 14,2 persen, dengan mengedepankan strategi pencegahan pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Selain itu komitmen percepatan penurunan *stunting* diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* yang memuat Strategi Nasional Percepatan Pencegahan *Stunting* (Stranas *Stunting*) tahun 2018-2024. Stranas bertujuan untuk mempercepat pencegahan terjadinya *stunting* melalui kerangka kebijakan dan institusi yang ada. Stranas *Stunting* terdiri atas lima pilar, yaitu: (1) Komitmen dan Visi Kepemimpinan; (2) Kampanye Nasional dan Komunikasi Perubahan Perilaku; (3) Konvergensi Program Pusat, Daerah, dan Desa; (4) Ketahanan Pangan dan Gizi; dan (5) Pemantauan dan Evaluasi.

Masing-masing pilar kemudian diturunkan pada berbagai program atau kegiatan untuk mengintervensi faktor penyebab atau determinan *stunting* yang bersifat kompleks dan multidimensi, terdiri atas:

- **Penyebab langsung** mencakup: (a) kecukupan asupan gizi; dan (b) pengobatan infeksi/penyakit.
- **Penyebab tidak langsung** mencakup: a) penyediaan air bersih dan sanitasi layak, b) peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan, c) peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan dan gizi ibu dan anak, dan d) peningkatan akses pangan bergizi.

Sebelum Stranas *Stunting* diterapkan, upaya pencegahan dan penurunan *stunting* bersifat sektoral, belum terintegrasi dan sulit diidentifikasi kuantitas dan kualitas capaiannya. Meskipun anggaran *stunting* mengalami kenaikan setiap tahunnya, kenaikan ini tidak serta merta memberikan dampak signifikan bila alokasi tersebut tidak dimanfaatkan secara efisien dan

efektif untuk penurunan *stunting*¹. Efisien pada penganggaran kebijakan dan efektif pada pengelolaan program akan mempercepat upaya pemerintah mengatasi *stunting*.

Salah satu upaya memperkuat pilar ke-5 pada Stranas *Stunting* adalah memastikan agar anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah dilaksanakan secara efisien dan efektif menasar pada sasaran prioritas *stunting* melalui proses perencanaan dan penganggaran kementerian/lembaga berdasarkan aspek konvergensi berbasis hasil (*result-based convergence*). Oleh karenanya peran Bappenas bersama Kemenkeu sebagaimana pilar ke-lima Stranas *Stunting* adalah:

- **Tagging and Tracking:** memastikan K/L yang memiliki anggaran terkait *stunting* melakukan penandaan tematik pada Output/Rincian Output program dan memastikan penandaan tersebut telah sejalan dengan aspek konvergensi di dalam Stranas sehingga capaiannya dapat diidentifikasi.
- **Performance Monitoring and Evaluation:** melakukan pemantauan dan evaluasi pada pelaksanaan intervensi gizi spesifik, intervensi gizi sensitif dan intervensi dukungan oleh K/L untuk menilai efisiensi dan efektivitas capaian.

Untuk memperkuat peran Bappenas dan Kemenkeu menjalankan tugas di atas, telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 107/2024 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 62/2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang menetapkan anggaran terkait *stunting* sebagai anggaran tematik yang akan ditandai, dipantau, dievaluasi, dan dilaporkan dalam evaluasi kinerja pemerintah. Hasil evaluasi akan digunakan sebagai masukan perbaikan pelaksanaan kegiatan dan pengalokasian anggaran pada tahun berikutnya.

PMK ini memperkuat penerapan kebijakan RSPP (Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran) sejak tahun anggaran 2021 melalui penandaan tematik *stunting* yang dilakukan pada level Rincian Output (RO). Penjelasan detail mengenai kebijakan RSPP akan disampaikan pada **sub-bab 1.3** dan **sub-bab 3.3**.

Sehingga pedoman ini merupakan pemutakhiran dari pedoman sebelumnya agar pelaksanaan RSPP dapat terakomodir pada proses penandaan, pemantauan dan evaluasi kinerja K/L.

1.1 Tujuan

Pedoman Penandaan, Pemantauan, dan Evaluasi Kinerja Pembangunan dan Anggaran Pencegahan *Stunting* ini merupakan pemutakhiran (*updating*) dari pedoman sebelumnya yang diterbitkan pada tahun 2018. Pedoman ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

¹ Bank Dunia (2018). *Aiming High: Indonesia's Ambitions to Reduce Stunting*

(Kementerian PPN/Bappenas), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dalam melakukan penandaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tematik *stunting* pada tingkat keluaran (RO) maupun di bawahnya (komponen dan sub-komponen).

1.2 Ruang Lingkup

1.2.1 Cakupan Buku Pedoman

Buku pedoman ini mencakup:

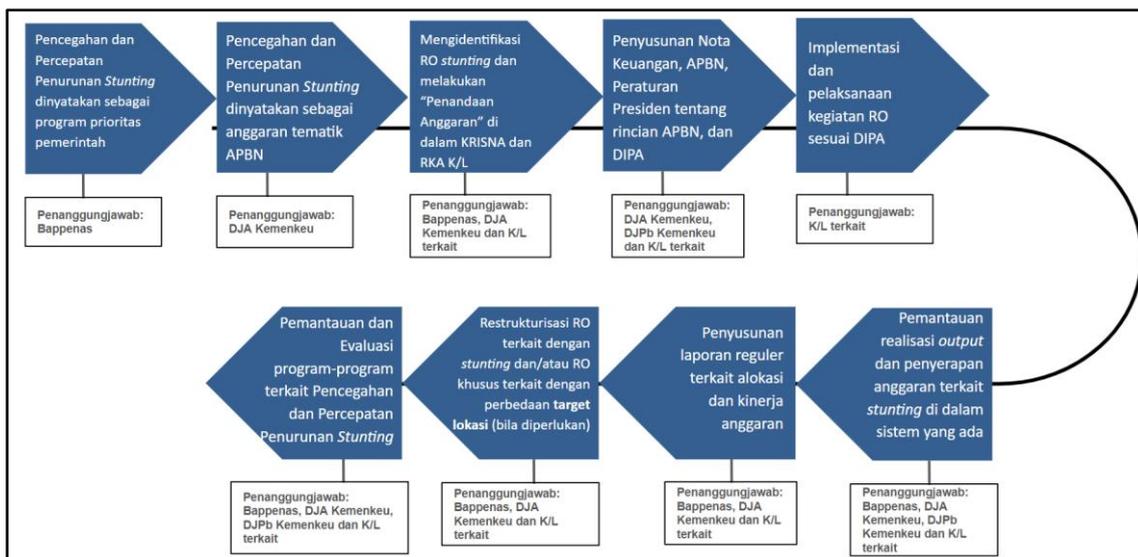
- a. Proses identifikasi, penandaan, pemantauan keluaran (Rincian Output), dan evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran yang berkaitan dengan penyelenggaraan intervensi gizi spesifik, intervensi gizi sensitif dan intervensi dukungan pencegahan *stunting* sesuai dengan lingkup tanggung jawab dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran.
- b. Proses evaluasi kinerja pembangunan dan kinerja anggaran yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas, Kemenkeu, dan K/L terkait sesuai dengan lingkup tanggung jawab, tugas pokok, dan fungsi masing-masing pihak.

Rincian Output (RO) yang teridentifikasi adalah RO yang telah diberi tanda tematik *stunting* pada aplikasi KRISNA-Renja dan SAKTI RKA K/L tahun berjalan. Seluruh RO kemudian dikompilasi sebagai RO-RO yang akan dilakukan pemantauan realisasi target dan belanja, serta evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran (**lihat Lampiran-1**). RO-RO yang telah teridentifikasi di lampiran buku pedoman ini bersifat dinamis dari tahun ke tahun; dapat ditambah, dikurangi, maupun direstrukturisasi sejalan dengan penyusunan rencana kerja dan anggaran dari K/L terkait.

1.3.2 Lingkup Tanggung Jawab

Kegiatan penandaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran percepatan pencegahan *stunting* melibatkan K/L terkait, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Keuangan. Kegiatan ini memanfaatkan sistem yang telah ada, diantaranya Sistem Integrasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA), Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), On-line Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN), e-Monev Bappenas, dan Monev Kementerian Keuangan, serta sistem monev K/L (jika tersedia). Lingkup tanggung-jawab masing-masing pihak tercantum pada gambar berikut.

Gambar 1-1. Lingkup Tanggung Jawab dalam Penandaan, Pelacakan, Pemantauan, dan Evaluasi Kinerja Pembangunan dan Anggaran melalui Belanja K/L



Sumber: Bappenas, 2021 (diolah)

Pembagian peran dan tanggung jawab antara Eselon 2 dalam Penandaan, Pelacakan, Pemantauan, dan Evaluasi Kinerja Pembangunan dan Anggaran diuraikan pada tabel bawah ini:

Tabel 1-1. Pembagian Peran dan Tanggung Jawab Eselon 2

K/L	Eselon 2	Peran/Tanggung Jawab
Kementerian PPN/Bappenas	Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Memastikan kesesuaian substansi penandaan, pelacakan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan dan anggaran. Melakukan penelaahan dan persetujuan penandaan anggaran dari mitra K/L pada aplikasi KRISNA. Bersama Kementerian Keuangan menyusun Dokumen Ringkasan RO Tagging Tematik Stunting Bersama Kementerian Keuangan menyusun laporan pemantauan dan evaluasi kinerja PPS semester dan tahunan Memberi masukan untuk pelaksanaan MonEv terpadu dan Rakortek PPS Mendukung pelaksanaan kegiatan MonEv terpadu
	Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan	Mengelola sistem perencanaan yang mengkoordinir penandaan di dalam aplikasi KRISNA
	Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan	Mengoordinasikan data capaian RO dan realisasi anggaran berbasis e-Monev.

K/L	Eselon 2	Peran/Tanggung Jawab
	Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Sektor	Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja anggaran dan program terkait <i>stunting</i> .
	Direktorat Mitra/Sektor terkait	Melakukan penelaahan dan persetujuan penandaan anggaran dari mitra K/L pada aplikasi KRISNA.
Kemenkeu	Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA)	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkoordinasikan kegiatan pemantauan dan evaluasi anggaran untuk penyusunan APBN. • Bersama Bappenas menyusun Dokumen Ringkasan RO Tagging Tematik Stunting • Bersama Bappenas menyusun laporan pemantauan dan evaluasi kinerja PPS semester dan tahunan • Menyusun narasi Program Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting pada Nota Keuangan. • Memberi masukan dalam pelaksanaan MonEv terpadu dan Rakortek (Form K/L mandiri di annex XX)
	Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, DJA	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkonsolidasi hasil keseluruhan kegiatan penandaan, pelacakan, pemantauan dan evaluasi belanja terkait <i>stunting</i> yang dilakukan oleh Direktorat anggaran bidang lainnya di lingkup Ditjen Anggaran. • Memastikan substansi dan mengkonsolidasi penandaan dan pelacakan anggaran yang dilakukan mitra K/L. • Menilai alokasi anggaran terkait <i>stunting</i>. • Melakukan persetujuan anggaran dari mitra K/L pada aplikasi RKA-K/L. • Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja anggaran mitra K/L terkait <i>stunting</i>. • Memberi masukan dalam pelaksanaan MonEv terpadu dan Rakortek (Form K/L mandiri di annex XX)
	Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, DJA	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan substansi dan mengkoordinir penandaan dan pelacakan anggaran yang dilakukan mitra K/L. • Menilai alokasi anggaran terkait <i>stunting</i>. • Melakukan persetujuan anggaran dari mitra K/L pada aplikasi RKA-K/L. • Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja anggaran terkait <i>stunting</i>. • Jika diperlukan, melakukan Penajaman Program, Kegiatan, dan Keluaran, termasuk Revisi Rumusan Informasi Kinerja.² • Memberi masukan dalam pelaksanaan MonEv terpadu dan Rakortek

² Revisi Rumusan Informasi Kinerja berupa perubahan dan/atau penambahan: a. sasaran strategis beserta indikatornya; b. rumusan Program dan/ atau sasaran Program beserta indikatornya; c. rumusan Kegiatan, sasaran Kegiatan beserta indikatornya, dan/ atau fungsi/ subfungsi; d. rumusan KRO beserta indikatornya, RO beserta indikatornya, dan/ atau satuannya; dan/ atau e. rumusan komponen untuk menghasilkan RO.

K/L	Eselon 2	Peran/Tanggung Jawab
	Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, DJA	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan substansi dan mengkoordinir penandaan dan pelacakan anggaran yang dilakukan mitra K/L. • Menilai alokasi anggaran terkait <i>stunting</i>. • Melakukan persetujuan anggaran dari mitra K/L pada aplikasi RKA-K/L. • Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja anggaran mitra K/L terkait <i>stunting</i>.
	Direktorat Sistem Penganggaran, DJA	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan dukungan sistem dan data terkait penandaan dan pelacakan anggaran di RKA K/L • Memberi masukan dalam pelaksanaan MonEv terpadu dan Rakortek
	Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb)	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pemantauan dan evaluasi realisasi belanja terkait <i>stunting</i> di OM-SPAN.
	Direktorat Dana Transfer Khusus, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan informasi data alokasi, penyaluran dan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) tematik <i>stunting</i>
	Direktorat Sistem Informasi Teknologi Perbendaharaan, DJPb	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkoordinir pengelolaan data realisasi belanja terkait <i>stunting</i> di OM-SPAN.
Kementerian Negara/ Lembaga	Biro Perencanaan (Sekretaris Jenderal K/L)	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan koordinasi penandaan dan pelacakan anggaran oleh Satker terkait. • Melakukan evaluasi realisasi belanja dan kinerja pembangunan dan anggaran.
	Direktorat Teknis terkait masing-masing K/L	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penandaan, pelacakan, pemantauan, dan evaluasi anggaran terkait <i>stunting</i>.
		<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan rekomendasi rumusan indikator kinerja dan rumusan komponen yang menghasilkan RO, termasuk perbaikan/penyempurnaan rumusan indikator berkaitan dengan rumusan Keluaran, indikator, jenis, volume, dan satuan Keluaran (termasuk rumusan komponen untuk menghasilkan RO).³ • Dalam hal penelaahan RKA-K/L membutuhkan penyesuaian, ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga, antara lain dengan perubahan informasi Kinerja (termasuk rumusan komponen untuk menghasilkan RO)⁴

³ PMK 107/2024

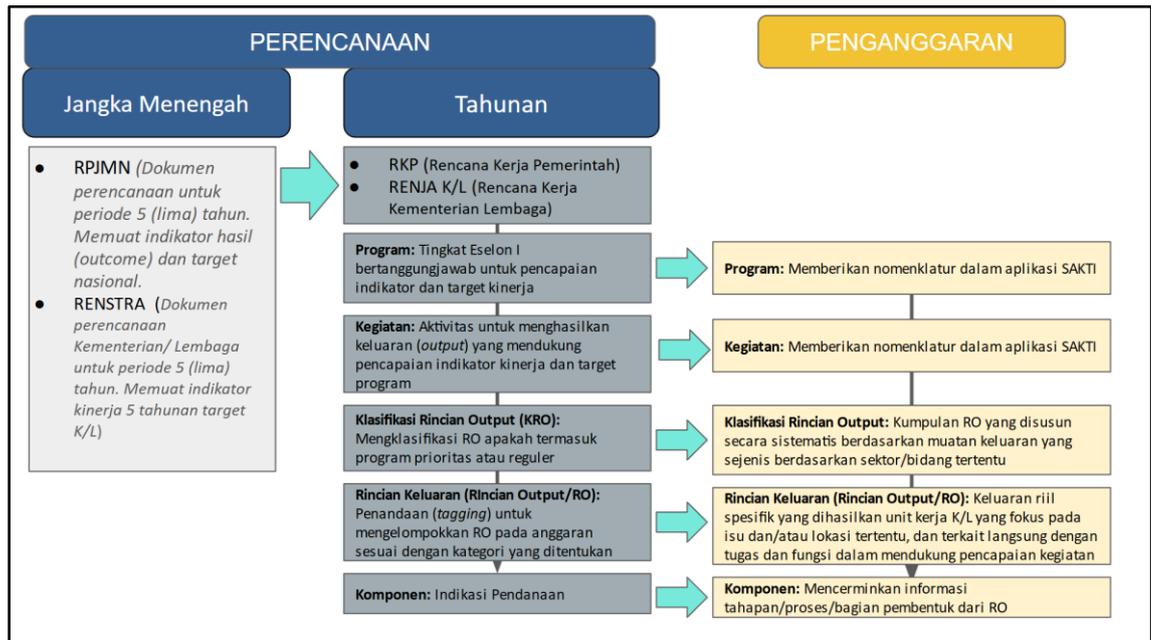
⁴ Penajaman Program, Kegiatan, dan Keluaran dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan setelah penyusunan Renja K/L berdasarkan kebutuhan

1.3. Proses Perencanaan dan Penganggaran

Proses perencanaan pembangunan di Indonesia adalah suatu proses konsultasi dan penyalarsan komprehensif yang diterapkan di semua tingkat pemerintahan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dimaksud dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Sebagaimana diamanatkan di dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) berpedoman kepada RKP dengan memperhitungkan ketersediaan anggaran. Dalam kerangka tersebut, target-target yang terdapat dalam dokumen perencanaan seperti RKP pada tingkat nasional dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L) menjadi acuan dalam penyusunan RAPBN dan dasar bagi pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Kementerian/Lembaga. UU ini kemudian dilengkapi PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional sebagai landasan pelaksanaan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) untuk menciptakan perencanaan dan penganggaran yang lebih berbasis kinerja, dengan fokus pada hasil (output dan outcome) pembangunan. RSPP kemudian diatur melalui Surat Edaran Bersama Menteri PPN/Bappenas Nomor B517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 dan Menteri Keuangan Nomor S-122/MK.2/2020 hal Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran serta diperkuat dengan Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 1/2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga serta PMK Nomor 107/2024 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 62/2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Keterkaitan antara proses perencanaan dan penganggaran tahunan terlihat dari gambar di bawah ini:

Gambar 1-2. Kaitan Proses Perencanaan dan Penganggaran Tahunan



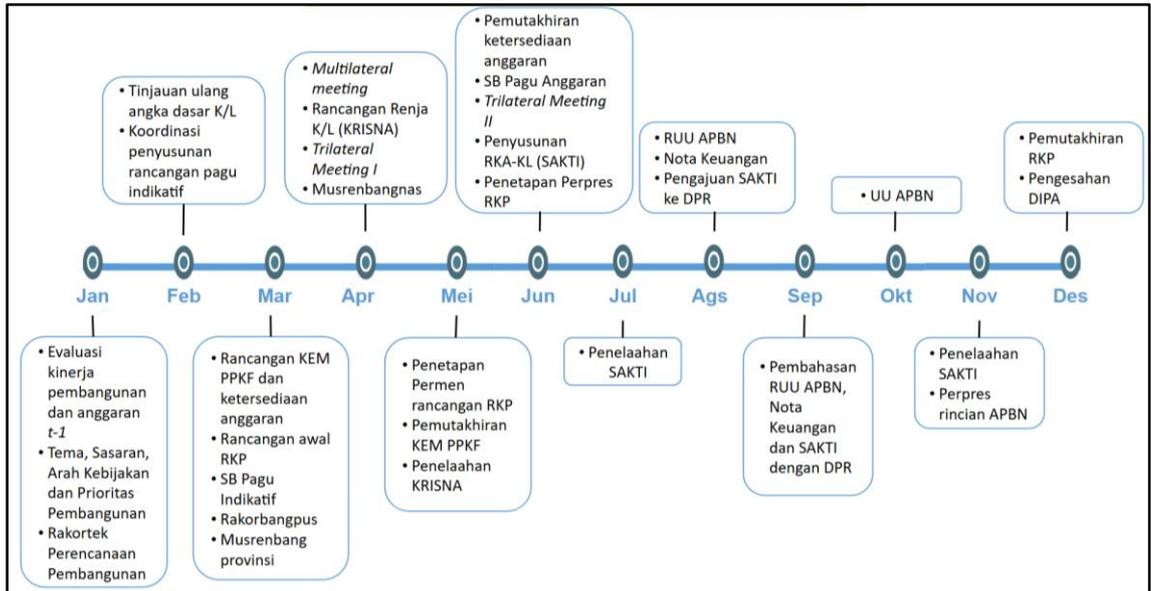
Sumber: Bappenas, 2021 (diolah)

Untuk lebih meningkatkan keselarasan antara perencanaan dan penganggaran tahunan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran yang bertujuan untuk memperbaiki koordinasi antara Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenkeu sehingga diharapkan dapat memperbaiki dan memperkuat penyelarasan antara perencanaan (RPJMN, Renstra, RKP, dan Renja K/L) dengan alokasi anggaran tahunannya (RKA-KL). Hal ini kemudian tertuang pada penandatanganan Nota Kesepahaman bersama untuk melakukan Integrasi Sistem Perencanaan, Penganggaran & Pengendalian Pembangunan per tanggal 7 Juli 2021 yang lalu.

1.4. Siklus Perencanaan dan Penganggaran

Langkah pelaksanaan kegiatan penandaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran mengikuti siklus perencanaan dan penganggaran berdasarkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2017 sebagaimana gambar di bawah ini. Untuk penjelasan lebih rinci proses pelaksanaan penandaan, pemantauan dan evaluasi akan dijabarkan pada bab berikutnya.

Gambar 1-3. Siklus Perencanaan dan Penganggaran



Sumber: Bappenas, 2021 (diolah)

1.5. Koordinasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting

Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sesuai Perpres 72/2021 mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pengarah

Pengarah mempunyai tugas sebagai berikut:

- Memberikan arahan terkait penetapan kebijakan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting;
- Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting; dan
- Melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Presiden 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

2. Pelaksana

Pelaksana mempunyai tugas sebagai berikut:

- Menyiapkan perumusan rencana aksi nasional
- Melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting kementerian dan lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan;
- Menyiapkan perumusan penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;

- d. Mengkoordinasikan Pemantauan dan Evaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting;
- e. Mengoordinasikan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting; dan
- f. Mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting.

**Tabel 1-2. Susunan Keanggotaan Tim Percepatan Penurunan Stunting
(sesuai Perpres Percepatan Penurunan Stunting No. 72/2021)**

I. PENGARAH	
Wakil Presiden Republik Indonesia	Ketua
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Wakil Ketua Bidang Pelaksanaan
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Wakil Ketua Bidang Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi
Menteri Dalam Negeri	Wakil Ketua Bidang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Menteri Kesehatan	Anggota
Menteri Keuangan	Anggota
Menteri Sosial	Anggota
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal)*	Anggota
Menteri Agama	Anggota
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri Pekerjaan Umum)*	Anggota
Menteri Sekretaris Negara	Anggota
Kepala Staf Kepresidenan	Anggota
II. PELAKSANA	
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN)*	Ketua
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Wakil Ketua Bidang Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Wakil Ketua Bidang Koordinasi, Sinkronisasi, Pengendalian, dan Pengawasan Pelaksanaan:
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Kesehatan	Wakil Ketua Bidang Koordinasi Intervensi Spesifik
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Dalam Negeri	Wakil Ketua Bidang Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah:
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Sekretariat Wakil Presiden Kementerian Sekretariat Negara	Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Komitmen Kepemimpinan

* Restrukturisasi K/L berdasarkan nomenklatur Kabinet Merah Putih

BAB II KERANGKA KONSEPTUAL KEBIJAKAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

2.1. Kerangka Konseptual Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*

Kebijakan Percepatan Penurunan *Stunting* merujuk kepada

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2025-2029 yang menekankan pelaksanaan kunci terdiri dari pencegahan *stunting* serta peningkatan angka kelangsungan hidup anak dan dewasa. Strategi pencegahan *stunting* difokuskan pada 1000 hari pertama kehidupan dengan meningkatkan cakupan dan kualitas serta integrasi kunci yang berfokus pada penguatan faktor determinan di masing masing kelompok sasaran. Target penurunan prevalensi *stunting* pada tahun 2029 sebesar 14,2 persen sebagaimana digambarkan di bawah;

Gambar 2-1. Target Prevalensi *Stunting* pada Sasaran Utama Prioritas Nasional 4

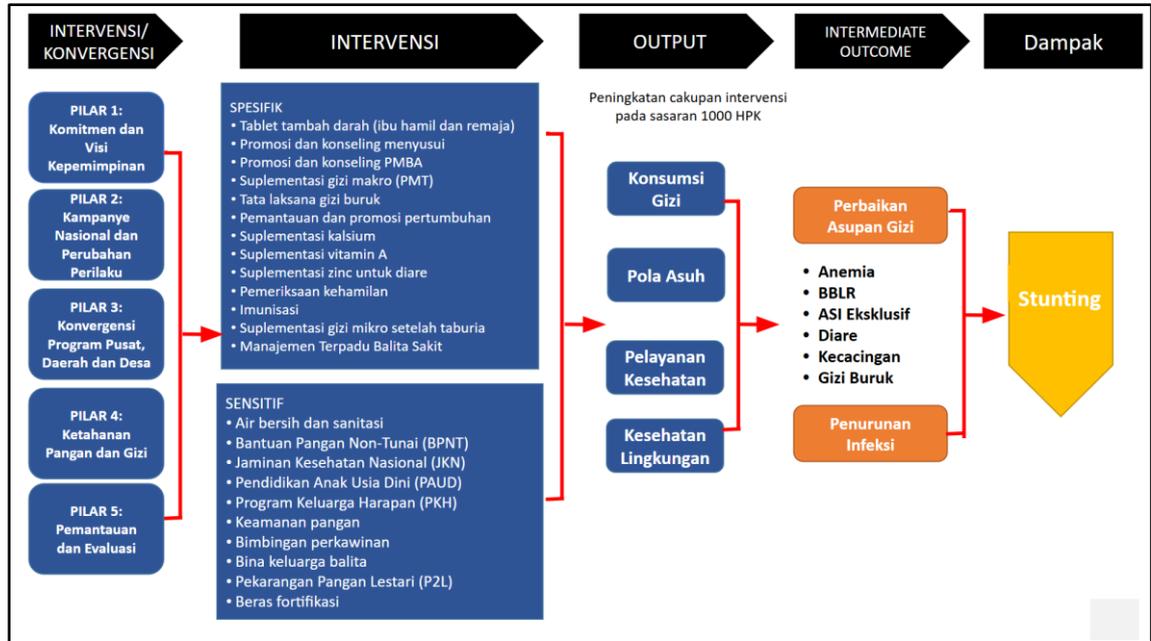


Sumber: RPJMN 2025-2029

2. Strategi Nasional Percepatan Penurunan Anak Kerdil/*Stunting* (Stranas *Stunting*) tahun 2018-2024 yang memuat kerangka konseptual gizi pada Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* 2018-2024. Dalam perjalanannya, Stranas *Stunting* tersebut diperkuat dengan aspek legal dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (PPS). Sejalan dengan kerangka konseptual tersebut, upaya percepatan penurunan *stunting* dilakukan melalui dua intervensi, yaitu intervensi spesifik yang mengatasi penyebab langsung dan intervensi sensitif untuk mengatasi penyebab tidak langsung. Intervensi spesifik merupakan intervensi yang bertujuan untuk mengatasi penyebab langsung *stunting* meliputi: (a) kecukupan asupan gizi; dan (b) pengobatan infeksi/penyakit. Sedangkan Intervensi sensitif bertujuan untuk mengatasi penyebab tidak langsung meliputi: a) penyediaan air bersih dan sanitasi layak, b) peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan, c) peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan dan gizi ibu dan anak, dan d) peningkatan akses pangan bergizi. Selain itu, untuk memperkuat upaya

percepatan penurunan *stunting*, terdapat intervensi dukungan yang terdiri dari dukungan teknis, kegiatan pendampingan, dan penyusunan rekomendasi kebijakan.

Gambar 2-2. Kerangka Konseptual Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi



Sumber: Stranas Stunting, 2018 (diolah)

Berdasarkan Gambar 5. kerangka konseptual intervensi penurunan stunting, tujuan utama dari pelaksanaan intervensi spesifik dan intervensi sensitif pada Strategi nasional percepatan penurunan *stunting* adalah untuk mempercepat pencegahan dan penurunan angka prevalensi stunting di Indonesia melalui ketercapaian beberapa Indikator *outcome* berikut ini:

1. Terpenuhinya asupan gizi remaja puteri, ibu hamil dan balita;
2. Penurunan penyakit infeksi pada balita;
3. Perbaikan pola asuh dan pola sanitasi;
4. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
5. Peningkatan akses air bersih dan sanitasi; dan
6. Peningkatan akses pangan bergizi.

Pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* memiliki sasaran pada kelompok sasaran meliputi:

1. Remaja putri;
2. Calon pengantin;
3. Ibu hamil;
4. Ibu menyusui; dan
5. Anak berusia 0 (nol) – 59 (lima puluh sembilan) bulan

Dengan perluasan sasaran intervensi sensitif pada kelompok masyarakat, keluarga berisiko stunting, wanita usia subur, masyarakat berpenghasilan rendah, masyarakat miskin dan masyarakat umum.

2.2. Indikator Antara Perpres 72 Tahun 2021

Identifikasi dan pemetaan RO mendukung program percepatan penurunan *stunting* dilakukan setiap tahun mengacu pada Strategi Nasional Percepatan Penurunan Anak Kerdil (*Stunting*) 2018-2024 dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, terbagi dalam intervensi gizi spesifik, intervensi gizi sensitif dan intervensi dukungan. Tabel berikut menunjukkan intervensi spesifik dan intervensi sensitif program percepatan penurunan stunting, hasil antara Indikator dan target pada Perpres 72/2021, dan tujuan hasil yang diharapkan.

Tabel 2-1. Intervensi Gizi Spesifik Percepatan Penurunan Stunting Berdasarkan Stranas dan Perpres 72/2021

Sasaran	Intervensi Gizi Spesifik	Indikator Sasaran Perpres 72/2021	Target	Hasil
Ibu Hamil	Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK)	Persentase ibu hamil kurang energi kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi	Target: 90% Tahun: 2024	Perbaikan Asupan Gizi
Ibu Hamil	Pemberian tablet tambah darah (TTD) ibu hamil	Persentase ibu hamil yang mengkonsumsi tablet tambah darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan	Target: 80% Tahun: 2024	Perbaikan Asupan Gizi
Remaja putri	Pemberian tablet tambah darah remaja putri (Program Aksi Bergizi)	Persentase remaja putri yang mengkonsumsi tablet tambah darah (TTD)	Target: 58% Tahun: 2024	Perbaikan Asupan Gizi
Anak usia 0-6 bulan	Promosi dan konseling menyusui	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif	Target: 80% Tahun: 2024	Perbaikan Asupan Gizi
Anak usia 6-23 bulan	Promosi dan konseling PMBA	Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI)	Target: 80% Tahun: 2024	Perbaikan Asupan Gizi
Balita (0-59 bulan)	Tata laksana gizi buruk	Persentase anak berusia dibawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk	Target: 90% Tahun: 2024	Perbaikan Asupan Gizi
Balita (0-59 bulan)	Pemantauan pertumbuhan balita	Persentase anak berusia dibawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	Target: 90% Tahun: 2024	Perbaikan Asupan Gizi
Balita (6-59 bulan)	Pemberian makanan tambahan balita gizi kurang, BB kurang dan BB Tidak naik	Persentase anak berusia dibawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	Target: 90% Tahun: 2024	Perbaikan Asupan Gizi
Balita (6-59 bulan)	Penyediaan Vaksin Imunisasi Program	Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.	Target: 90% Tahun: 2024	Penurunan Penyakit Infeksi pada Balita

Tabel 3 diatas menunjukkan Intervensi Gizi Spesifik berdasarkan Kerangka Konseptual Stranas Percepatan Penurunan Stunting, terdiri dari intervensi prioritas berkontribusi pada capaian hasil antara 9 (sembilan) indikator spesifik Perpres 72/2021 dan intervensi spesifik pendukung diluar indikator Perpres 72/2021.

Tabel 2-2. Intervensi Sensitif Percepatan Penurunan Stunting Berdasarkan Stranas dan Perpres 72/2021

Sasaran	Intervensi Sensitif	Indikator Sasaran Perpres 72/2021	Target	Hasil
Wanita usia subur	Pelayanan KB	Persentase pelayanan keluarga berencana (KB) pasca persalinan	Target: 70% Tahun: 2024	Peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan dan gizi ibu dan anak
Wanita usia subur	Pelayanan KB	Persentase kehamilan yang Tidak diinginkan	Target: 15.5% Tahun: 2024	Peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan dan gizi ibu dan anak
Calon pengantin	Pemeriksaan kesehatan calon pengantin	Cakupan calon pasangan usia subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah	Target: 90% Tahun 2024	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan
Kelompok masyarakat	Penyediaan akses air bersih dan air minum (Program Pamsimas)	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di kabupaten/kota prioritas	Target: 100% Tahun: 2024	Peningkatan penyediaan air bersih dan sanitasi
Masyarakat berpenghasilan rendah	Penyediaan akses sanitasi layak (Program Sanimas SPALD-S)	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di kabupaten/kota lokasi prioritas	Target: 90% Tahun: 2024	Peningkatan penyediaan air bersih dan sanitasi
Masyarakat miskin	Penyediaan akses PBI Jaminan Kesehatan Nasional	Cakupan penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan nasional	Target: 112,9 juta penduduk Tahun: 2024	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan
Keluarga berisiko stunting	Pendampingan keluarga berisiko stunting	Cakupan keluarga berisiko <i>stunting</i> yang memperoleh pendampingan	Target: 90% Tahun: 2024	Peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan dan gizi ibu dan anak
Masyarakat miskin	Program Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat	Target: 10.000.000 Tahun: 2024	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan
Masyarakat umum, Ibu hamil, Keluarga dengan Balita	Penyebarluasan informasi mengenai gizi dan kesehatan melalui berbagai media	Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang stunting di lokasi prioritas	Target: 70% Tahun: 2024	Peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan dan gizi ibu dan anak
Masyarakat miskin	Bantuan sosial pangan sembako	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan	Target: 15.600.039 Tahun: 2024	Peningkatan akses pangan bergizi

Masyarakat umum	Program penyehatan lingkungan	Persentase desa/kelurahan stop buang air besar sembarangan (BABS) atau <i>Open Defecation Free</i> (ODF)	Target: 90% Tahun: 2024	Peningkatan kesadaran, komitmen, dan perubahan perilaku terkait sanitasi
Intervensi Pendukung				
Keluarga dengan baduta	Fasilitasi dan pembinaan 1000 HPK (Program Bina Keluarga Balita)	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).	Target: 90% Tahun: 2024	Peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan dan gizi ibu dan anak
Ibu Hamil, Masyarakat umum	Gemar makan ikan (Gemarikan)	Persentase keluarga berisiko StunXng yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri	Target: 90% Tahun: 2024	Peningkatan akses pangan bergizi
Lembaga PAUD	PAUD Holistik Integratif	Persentase lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUDHI).	Target: 70% Tahun: 2024	Peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan dan gizi ibu dan anak
Kelompok masyarakat	Padi Biofortifikasi	-	-	Peningkatan akses pangan bergizi

Tabel 4 diatas menunjukkan Intervensi sensitif berdasarkan Kerangka Konseptual Stranas Percepatan Penurunan Stunting, terdiri dari intervensi prioritas yang berkontribusi pada capaian hasil antara 11 (sebelas) indikator sensitif Perpres 72/2021 dan intervensi sensitif pendukung berkontribusi pada capaian indikator Pilar Perpres 72/2021 dan diluar indikator Perpres 72/2021.

BAB III PENANDAAN ANGGARAN PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING

3.1 Tujuan Penandaan Anggaran

Secara umum, tujuan penandaan anggaran *stunting* adalah sebagai atau instrumen untuk memudahkan identifikasi dan pemantauan besaran dan kinerja anggaran *stunting* dalam rangka untuk meningkatkan kinerja kegiatan,

Secara khusus, tujuan penandaan anggaran *stunting* terdiri dari:

1. **Tujuan kuantitatif**, yaitu untuk memastikan efektivitas belanja yang dialokasikan untuk upaya percepatan pencegahan/penurunan *stunting*.

Kementerian PPN/Bappenas, Kemenkeu, dan K/L menandai dan menghitung semua belanja untuk menghasilkan *output* yang berkontribusi pada pencegahan/penurunan *stunting*.

2. **Tujuan kualitatif**, yaitu untuk memastikan intervensi pencegahan/penurunan *stunting* dilakukan secara terintegrasi dan konvergen oleh lintas sektor terkait.

Melalui penandaan yang dilakukan, Kementerian PPN/Bappenas, Kemenkeu, dan K/L **dapat** memastikan intervensi pencegahan/penurunan *stunting* dilakukan secara terintegrasi dan konvergen dengan mengacu pada Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan kualitatif ini, Kementerian PPN/Bappenas, Kemenkeu, dan K/L melakukan analisis penandaan untuk kinerja anggaran dan pembangunan hanya pada intervensi yang dipandang paling berpengaruh untuk pencegahan/penurunan *stunting*.

Penandaan anggaran *stunting* menerapkan kedua tujuan dan dilakukan dengan menghitung semua RO yang berkontribusi pada Stranas *Stunting* (tujuan kuantitatif) dan melakukan tambahan pemantauan dan evaluasi kinerja pada beberapa *output* terpilih (tujuan kualitatif).

3.2. Intervensi Percepatan Pencegahan *Stunting*

Pencegahan dan Penurunan *Stunting* merupakan kegiatan prioritas utama yang tercantum pada RPJMN 2025-2029 dengan sasaran pada Pencegahan dan Penurunan *Stunting* melalui pendekatan spesifik dan sensitif serta sumber pendanaan berasal dari belanja pemerintah pusat dalam hal ini anggaran K/L dan belanja pemerintah daerah (APBD)

Selanjutnya, Strategi Nasional Percepatan Pencegahan *Stunting* (Stranas *Stunting*) menetapkan penanganan *stunting* konvergensi aksi pencegahan *stunting* di semua tingkatan pemerintah melalui lima pilar Stranas *Stunting*. Untuk mencegah *stunting*, diperlukan konvergensi atau

keterpaduan aksi dan sumber daya yang diselenggarakan oleh K/L, baik untuk menyampaikan intervensi secara langsung berupa intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif, maupun untuk melakukan intervensi dukungan seperti kegiatan koordinasi, pendampingan daerah, dukungan teknis atau riset. Berdasarkan data yang diperoleh pada Perpres No. 72/2021, tercatat 18 K/L yang berkontribusi dalam percepatan penurunan *stunting*.

Tabel 3-1. Kementerian/Lembaga yang Berkontribusi dalam Percepatan Penurunan Stunting

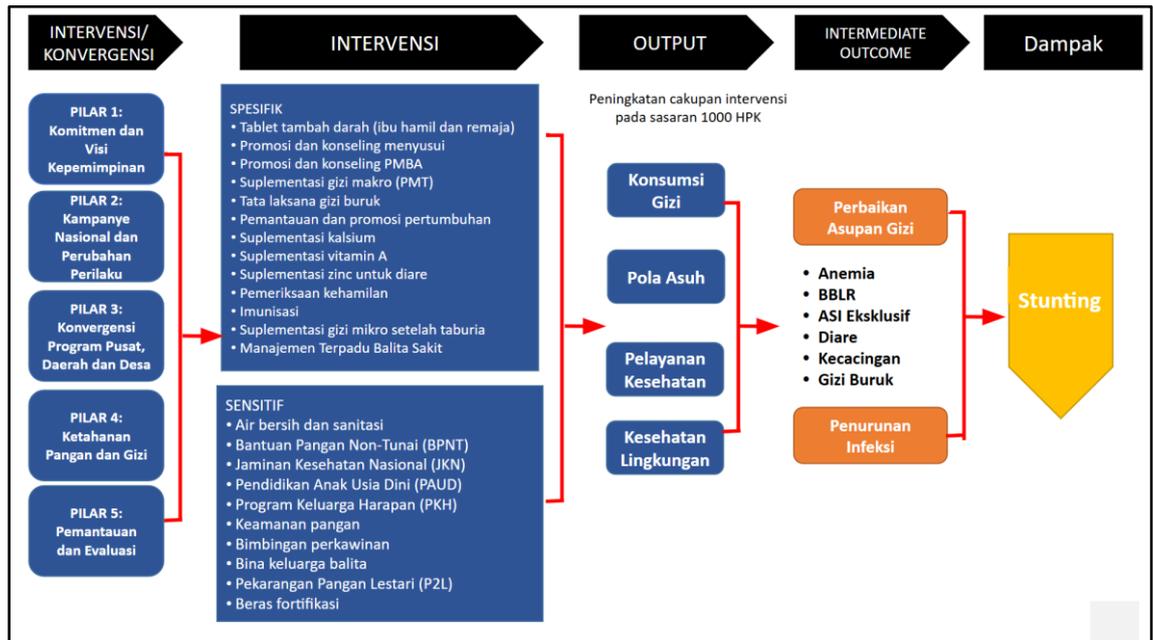
Kementerian/Lembaga	
1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan*	11. Kementerian Desa, Transmigrasi, dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal)**
2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)*	12. Kementerian Agama
3. Kementerian Dalam Negeri*	13. Kementerian Sosial
4. Kementerian Keuangan*	14. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5. Kementerian Kesehatan	15. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
6. Kementerian Pertanian	16. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) (Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN)**
7. Kementerian Kelautan dan Perikanan	17. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)*
8. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah)**	18. Kementerian Sekretariat Negara (Sekretariat Wakil Presiden)*
9. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian Pekerjaan Umum)**	
10. Kementerian Komunikasi dan Informatika	

* K/L yang melakukan koordinasi dan dukungan teknis seperti riset dan kajian

** Restrukturisasi K/L berdasarkan nomenklatur Kabinet Merah Putih

Meski demikian, pada pelaksanaannya jumlah K/L tersebut dapat bertambah atau berkurang sesuai dengan dinamika kebijakan pemerintah dan kebijakan K/L masing-masing dalam menentukan intervensi terkait *stunting* yang dilakukan. Misalnya saja BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan) pada tahun anggaran 2020 tidak memiliki RO terkait *stunting* yang kemudian memiliki satu RO terkait di tahun 2021 hingga tahun 2024. Hal serupa dengan Badan Pangan Nasional (BAPANAS) yang memiliki RO terkait *stunting* sejak tahun 2023. Sementara itu, Kementerian Perindustrian dan BPS yang semula memiliki satu RO di tahun 2020 tidak lagi memiliki intervensi terkait *stunting* di tahun 2021.

Gambar 3-1. Kerangka Hasil Percepatan Penurunan Stunting



Sumber: Stranas Stunting, 2018 (diolah)

3.2.1 Intervensi Gizi Spesifik

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa intervensi gizi spesifik merupakan intervensi yang bertujuan untuk mengatasi penyebab langsung *stunting* meliputi: (a) kecukupan asupan gizi; dan (b) pengobatan infeksi/penyakit. Oleh karenanya RO yang direkomendasikan untuk ditandai *stunting* adalah RO yang memiliki desain program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Mengatasi penyebab langsung terjadinya *stunting*;
2. Memiliki sasaran prioritas dan penting yang berdampak pada 1000 HPK;
3. Merupakan program dan kegiatan dari sektor kesehatan khususnya Kementerian Kesehatan; dan
4. Memiliki sifat jangka pendek dan hasilnya dapat dicatat dalam waktu relatif pendek.

Lebih lanjut, Stranas *Stunting* membagi tiga kelompok, sebagaimana gambar di bawah, untuk memudahkan identifikasi RO intervensi gizi spesifik pada Kementerian Kesehatan antara lain:

1. **Intervensi prioritas**, yaitu RO yang memiliki desain program dan kegiatan untuk suplementasi TTD, pemberian PMT, konseling PMBA, konseling menyusui, Tata Laksana Gizi Buruk dan pemantauan pertumbuhan;
2. **Intervensi pendukung**, yaitu RO yang mendukung pelaksanaan intervensi prioritas yang memiliki desain program dan kegiatan seperti pemberian suplementasi kalsium,

suplementasi vitamin A, suplementasi zink pada pengobatan diare, pelaksanaan MTBS, pemberian taburia, dan pemberian imunisasi; dan

3. **Intervensi prioritas sesuai kondisi tertentu**, yaitu RO yang diperlukan sesuai dengan kondisi tertentu seperti perlindungan malaria dan pencegahan HIV pada ibu hamil, pencegahan kecacingan termasuk saat darurat bencana (program gizi darurat).

Gambar 3-2. Intervensi Gizi Spesifik Prioritas

		Intervensi Prioritas	Intervensi Pendukung	Intervensi Prioritas Kondisi Tertentu
Sasaran 1000 HPK	Ibu Hamil	<ul style="list-style-type: none"> - PMT Ibu Hamil dari Kelompok Miskin/Kurang Energi Kronik (KEK) - Suplementasi Tablet Tambah Darah (TTD) 	<ul style="list-style-type: none"> • Suplementasi Kalsium • Pemeriksaan Kehamilan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan dari Malaria • Pencegahan HIV
	Ibu Menyusui dan anak 0-23 bulan	<ul style="list-style-type: none"> - Promosi dan Konseling Menyusui - Promosi dan Konseling Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) - Tata Laksana Gizi Buruk - Pemberian Makanan Tambahan pemulihan bagi anak kurus - Pemantauan dan promosi pertumbuhan 	<ul style="list-style-type: none"> • Suplementasi Kapsul Vitamin A • Suplementasi Taburia • Imunisasi • Suplementasi Zink pada pengobatan diare • Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pencegahan Kecacingan
Sasaran Usia Lainnya	Remaja Putri dan Wanita Usia Subur	<ul style="list-style-type: none"> - Suplementasi Tablet Tambah Darah (TTD) 		
	Anak 24-59 bulan	<ul style="list-style-type: none"> - Tata Laksana Gizi Buruk - Pemberian Makanan Tambahan pemulihan bagi anak kurus - Pemantauan dan promosi pertumbuhan 	<ul style="list-style-type: none"> • Suplementasi Kapsul Vitamin A • Suplementasi Taburia • Imunisasi • Suplementasi Zink pada pengobatan diare • Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pencegahan Kecacingan

Sumber: Stranas Stunting, 2018 (diolah)

3.2.2 Intervensi Gizi Sensitif

Selanjutnya identifikasi RO pada intervensi gizi sensitif adalah RO yang memiliki desain program dan kegiatan untuk mengatasi penyebab tidak langsung *stunting* mencakup: a) penyediaan air bersih dan sanitasi layak, b) peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan, c) peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan dan gizi ibu dan anak, dan d) peningkatan akses pangan bergizi. RO pada intervensi ini dilakukan pada berbagai kegiatan pembangunan, termasuk di luar sektor kesehatan. Sasarannya adalah keluarga, kelompok masyarakat maupun masyarakat umum, yang tidak secara khusus ditujukan untuk 1000 HPK.

Gambar di bawah mengidentifikasi intervensi gizi sensitif prioritas serta K/L pengampu RO terkait sebagai berikut:

1. **Peningkatan Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi**, yaitu RO terkait pelaksanaan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) termasuk kesehatan lingkungan dan Germas

(Gerakan Masyarakat Sehat) yang diampu Kemenkes, pembangunan atau penyediaan fisik sarana air minum dan sanitasi pada Kemen PUPR dan Kemendes PDTT;

2. **Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Gizi dan Kesehatan**, yaitu RO terkait penyediaan layanan Keluarga Berencana (KB) pada BKKBN, Jaminan Kesehatan pada Kemenkes serta bantuan sosial tunai maupun non-tunai pada keluarga tidak mampu yang dikelola Kemensos;
3. **Peningkatan Kesadaran, Komitmen, dan Praktik Pengasuhan dan Gizi Ibu dan Anak**, yaitu RO terkait penyebarluasan informasi dan kampanye *stunting* pada Kemenkes dan Kemenkominfo, perbaikan pola asuh yang ditujukan pada orang tua, keluarga dan calon pengantin yang diampu Kemenkes, BKKBN dan Kemenag, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada KPPPA, pelaksanaan PAUD dan pemantauan tumbuh kembang anak pada Kemendikbudristek, konseling kesehatan remaja pada Kemenkes dan BKKBN, serta keamanan pangan pada BPOM; dan
4. **Peningkatan Akses Pangan Bergizi**, yaitu RO terkait bantuan pangan kepada keluarga tidak mampu pada Kemensos, kegiatan P2L dan benih padi biofortifikasi pada Kementan, kampanye GEMARIKAN pada KKP dan akses pada penyediaan PMT pada Kemenkes.

Gambar 3-3. Intervensi Gizi Sensitif Prioritas

		Program/Kegiatan Intervensi	Kementerian/Lembaga
Jenis Intervensi	Peningkatan Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> - Akses Air Minum yang Aman - Akses Sanitasi yang Layak 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenkes • Kemen PUPR • Kemendes PDTT
	Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Gizi dan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Akses Pelayanan Keluarga Berencana (KB) - Akses Jaminan Kesehatan (JKN) - Akses Bantuan Tunai untuk Keluarga tidak Mampu (PKH) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenkes • Kemensos • BKKBN
	Peningkatan Kesadaran, Komitmen, dan Praktik Pengasuhan dan Gizi Ibu dan Anak	<ul style="list-style-type: none"> - Penyebarluasan informasi melalui berbagai media - Penyediaan konseling perubahan perilaku antar pribadi - Penyediaan konseling pengasuhan untuk orang tua - Penyediaan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan promosi stimulasi anak usia dini, dan pemantauan tumbuh kembang anak - Penyediaan konseling kesehatan dan reproduksi untuk remaja - Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak - Penyediaan informasi dan pelatihan keamanan pangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenkes • Kemensos • BKKBN • Kemendikbudristek • Kemendes PDTT • KPPPA • Kemenag • Kemenkominfo • BPOM
	Peningkatan Akses Pangan Bergizi	<ul style="list-style-type: none"> - Akses bantuan pangan SEMBAKO untuk keluarga kurang mampu - Akses kegiatan Peкарangan Pangan Lestari - Bantuan Benih padi fortifikasi - Akses kegiatan Kampanye GEMARIKAN - Akses pada Pemberian Makanan Tambahan (PMT) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemensos • Kementan • KKP • Kemenkes

Sumber: Stranas Stunting, 2018 (diolah)

3.2.3 Intervensi Gizi Dukungan

Untuk memperkuat upaya percepatan penurunan *stunting*, terdapat intervensi dukungan yang terdiri dari dukungan teknis, kegiatan pendampingan, dan penyusunan rekomendasi kebijakan. Intervensi ini umumnya dilaksanakan oleh RO yang desain dan program kegiatannya tidak terkait pada penyebab langsung dan tidak langsung *stunting*.

Gambar di bawah mengidentifikasi intervensi gizi dukungan serta K/L penanggungjawab RO terkait berdasarkan Stranas *Stunting* sebagai berikut:

1. **Komitmen dan Visi Kepemimpinan**, yaitu RO terkait pelaksanaan rembuk *stunting* dan nota kesepahaman dengan kepala daerah yang dikelola oleh Setwapres;
2. **Kampanye Nasional dan Perubahan Perilaku**, yaitu RO terkait penyebarluasan informasi dan kampanye *stunting* dalam rangka perubahan perilaku serta jumlah kebijakan daerah terkait kampanye *stunting* yang dikelola Kemenkes, Kemendikbud, Kemendagri dan Kemenkominfo;
3. **Konvergensi Program Pusat, Daerah dan Desa**, yaitu RO terkait pelaksanaan konvergensi di daerah dan pemanfaatan dana desa oleh Kemendagri, Kemenkeu dan Kemendes PDTT;
4. **Ketahanan Pangan dan Gizi**, yaitu RO terkait bantuan pangan kepada keluarga tidak mampu pada Kemensos, kebijakan fortifikasi pangan pada Kemenperind dan akses pangan bergizi serta Kawasan Rumah Pangan Lestari pada Kementan; dan
5. **Pemantauan dan Evaluasi**, yaitu RO terkait publikasi tahunan angka prevalensi *stunting* pada BPS, kajian anggaran dan belanja pemerintah pada Kemenkeu, pelaksanaan dan pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi serta *dashboard* pada Bappenas dan pelaksanaan forum kajian pencegahan *stunting* pada Setwapres.

Gambar 3-4. Intervensi Gizi Dukungan pada Pilar Stranas Stunting

		Indikator	Kementerian/Lembaga
Tujuan	Pilar 1: Komitmen dan Visi Kepemimpinan	<ul style="list-style-type: none"> - Reembuk <i>Stunting</i> Nasional - MoA tahunan Setwapres dan Daerah - Reembuk <i>Stunting</i> Kab/Kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Setwapres
	Pilar 2: Kampanye Nasional dan Perubahan Perilaku	<ul style="list-style-type: none"> - Penilaian masyarakat tentang <i>stunting</i> sebagai 10 masalah penting gizi dan kesehatan - Kampanye publik dan perubahan perilaku - Pelatihan bagi pelaksana kampanye publik dan perubahan perilaku 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenkes • Kemendikbud • Kemendagri • Kemkominfo
	Pilar 3: Konvergensi Program Pusat, Daerah dan Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Konvergensi kegiatan nasional dan daerah untuk pencegahan <i>stunting</i> - Kab/Kota yang melaksanakan Aksi Konvergensi - Pemanfaatan dana desa untuk pelaksanaan intervensi prioritas - Pelaksanaan intervensi prioritas di tingkat desa yang terkoordinir 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemendagri • Kemendes PDDT • Kemenkeu
	Pilar 4: Ketahanan Pangan dan Gizi	<ul style="list-style-type: none"> - Sasaran prioritas mendapatkan bantuan pangan non tunai - Kebijakan fortifikasi pangan - Akses sasaran prioritas terhadap pangan bergizi - Jumlah Kawasan Rumah Pangan Lestari 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemensos • Kemenperind • Kementan
	Pilar 5: Pemantauan dan Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> - Publikasi Tahunan angka prevalensi <i>stunting</i> di tingkat nasional dan kab/kota - Kajian anggaran dan belanja pemerintah untuk pencegahan <i>stunting</i> - Pelaksanaan forum kajian pencegahan <i>stunting</i> - Pemanfaatan dan perbaikan sistem pendataan, termasuk <i>dashboard</i> - Pelaksanaan dan pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> • BPS • Bappenas • Kemenkeu • Setwapres

Sumber: Stranas Stunting, 2018 (diolah)

Penandaan anggaran percepatan pencegahan *stunting* dapat diperluas kepada kegiatan-kegiatan pendukung Stranas *Stunting* lainnya. Usulan RO Kementerian/Lembaga lain yang dinilai berkontribusi pada penurunan *stunting* dapat dilakukan penandaan dan disepakati oleh Forum Koordinasi dalam pertemuan rekonsiliasi atau disepakati oleh Bappenas, Kemenkeu, dan K/L terkait. Selain itu tidak tertutup kemungkinan terdapat kegiatan/RO pada K/L selain tersebut di atas yang turut serta berkontribusi dalam upaya percepatan pencegahan *stunting*.

3.3. Penandaan Anggaran pada Level Rincian *Output* (RO) Kegiatan

Penandaan anggaran adalah proses memberikan tanda (*tagging*) di dalam dokumen perencanaan (Renja K/L) dan dokumen anggaran (RKA-KL) untuk menelusuri, mengidentifikasi, dan memantau Rincian *Output* (RO) suatu kegiatan, termasuk anggaran dan realisasinya.

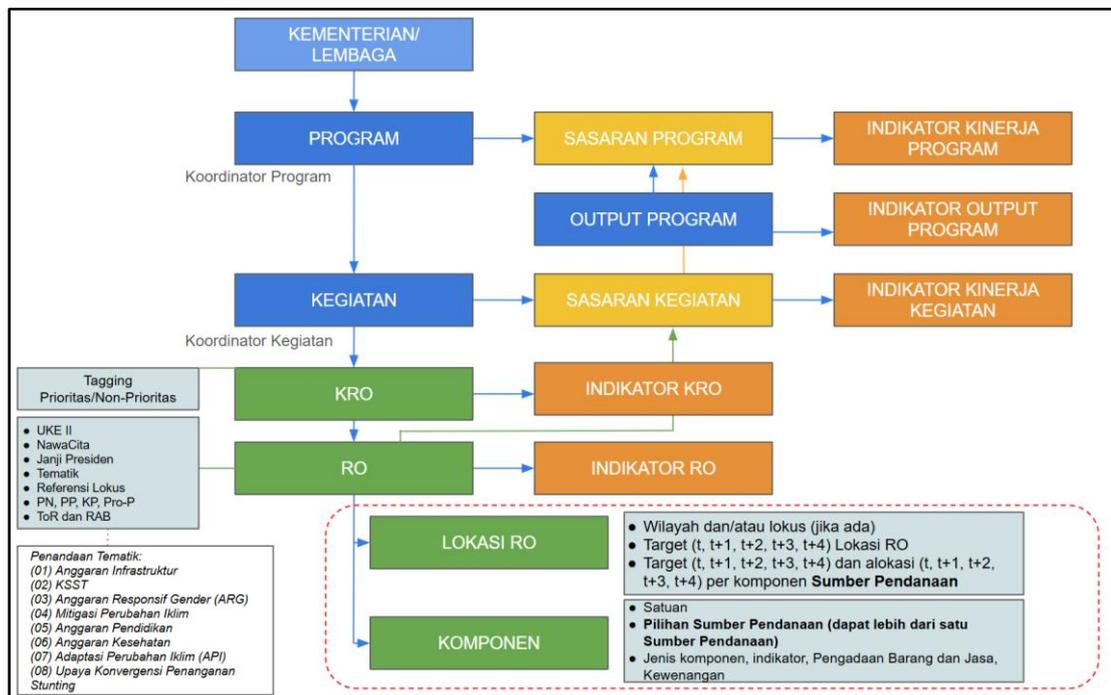
Semenjak TA 2021 penandaan tematik *stunting* dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Bersama Menteri PPN/Bappenas Nomor B517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 dan Menteri Keuangan Nomor S-122/MK.2/2020 perihal Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran RSP (Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran) yang mengarahkan penandaan tematik dilakukan pada level Rincian *Output* (RO). RSP melakukan penyederhanaan program pada K/L dan penandaan dilakukan pada level **Rincian *Output* (RO)**. Penerapan RSP ini akan membantu teridentifikasinya hubungan yang jelas antara program, kegiatan, RO, dan *outcome*, sinergi antar

Unit Kerja Eselon I atau antar K/L dalam mencapai sasaran pembangunan dan integrasi sistem Informasi Teknologi (IT) perencanaan dan penganggaran.

Selanjutnya pelaksanaan penandaan ini diatur dengan Permen PPN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan dan Perubahan Renja K/L dan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang terakhir kali diubah dengan PMK Nomor 107 Tahun 2024.

Penandaan anggaran dilakukan pada level RO dapat menggambarkan informasi yang lebih memadai tentang indikator capaian, besaran dana yang dialokasikan, dan realisasi anggaran. Hal ini akan memudahkan pelaksana penandaan anggaran untuk mengidentifikasi dan menelaah kesesuaian *output* kegiatan dan realisasi anggaran dengan penyelenggaraan strategi pencegahan *stunting*. Kemudian, penandaan yang dilakukan pada tingkat Rincian *Output* (RO) tersebut, selanjutnya dijabarkan detail kegiatannya sampai pada tingkat sub-komponen untuk mengidentifikasi alokasi yang secara riil mendukung percepatan penurunan *stunting*. Identifikasi data pada level sub-komponen dan detailnya dilakukan dengan menggunakan bantuan kertas kerja RKA K/L sesuai dengan besaran APBN tahun anggaran pada K/L terkait.

Gambar 3-5. Perubahan Struktur Data Renja Kementerian/Lembaga berdasarkan RSPP



Sumber: Bappenas, 2024 (diolah)

Sehubungan alokasi anggaran pada level RO berpotensi *overestimate* karena tidak seluruhnya dimanfaatkan untuk penurunan *stunting*, namun juga digunakan untuk mendukung program/kegiatan K/L lainnya, maka perlu dilakukan analisis di level lanjutan untuk meningkatkan akurasi. Level analisis lanjutan dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu

dengan menggunakan asumsi bobot kontribusi kegiatan/anggaran atau dengan memetakan informasi detail di bawah level rincian *output* (komponen/sub-komponen/detail anggaran) yang mendukung penurunan *stunting* sebagaimana terdapat dalam Dokumen Ringkasan RO K/L tahun anggaran berjalan yang Mendukung Percepatan Penurunan *Stunting*. Secara rinci, data anggaran berdasarkan pendekatan dimaksud sebagai berikut:

1. Pada RO yang menggunakan asumsi bobot kontribusi kegiatan/anggaran, data pagu revisi dan realisasi anggaran menggunakan data SAKTI yang kemudian dikalikan dengan bobot kontribusinya dengan mengacu kepada Dokumen Ringkasan RO yang Mendukung Percepatan Penurunan *Stunting* melalui Belanja K/L tahun anggaran berjalan; dan
2. Pada RO yang berasal dari proses pemetaan RO (komponen/sub-komponen/detail anggaran), maka data pagu revisi dan realisasi anggaran menggunakan data yang bersumber dari evaluasi mandiri K/L. Hal ini mempertimbangkan ketersediaan data realisasi anggaran dalam SAKTI masih terbatas sampai dengan level RO. Namun, jika data level RO tidak tersedia, maka digunakan pendekatan pertama.

Untuk mempercepat proses identifikasi *output* kegiatan yang diyakini terkait dengan Stranas *Stunting*, Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan telah menginisiasi proses identifikasi awal melalui mekanisme atas-bawah (*top-down*) terhadap data RO kegiatan yang tersimpan di dalam aplikasi KRISNA dan SAKTI. Inisiatif ini dilakukan untuk mendapatkan perkiraan awal pengeluaran anggaran pemerintah secara kuantitatif yang terkait untuk percepatan pencegahan *stunting*. Selanjutnya hasil dari proses identifikasi ini akan direkonsiliasi dan dikonfirmasi dengan hasil identifikasi yang dilakukan secara proses bawah-atas oleh K/L terkait untuk mem finalisasi kesepakatan akhir terkait *output* kegiatan yang akan ditandai.

Lebih lanjut langkah-langkah identifikasi dan penyepakatan RO yang ditandai *stunting* dapat dibagi menjadi dua bagian:

1. Pra-penandaan, yang terdiri dari a) pedoman penandaan pada KRISNA K/L di tahun perencanaan; b) identifikasi K/L dan unit kerja yang memiliki program terkait *stunting*; c) analisis penandaan RO untuk dokumen ringkasan tagging di tahun perencanaan; c) Pengaturan Penandaan untuk Penyusunan Dokumen Ringkasan RO; dan d) Kriteria RO tematik *stunting* yang dilakukan penandaan; dan
2. Penandaan dan dan pelacakan (*tracking*) RO Tematik *Stunting*.

3.4. Pra Penandaan

3.4.1 Pedoman Penandaan pada KRISNA K/L di Tahun Perencanaan

Tahapan pra penandaan dapat dimulai dengan memanfaatkan daftar RO pada dokumen ringkasan RO tematik *stunting* tahun sebelumnya sebagai pedoman dalam mengidentifikasi daftar RO yang perlu dilakukan penandaan anggaran di tahun perencanaan (n-1). Dokumen

tersebut menjadi acuan melakukan penandaan RO dan menentukan besaran alokasi anggaran yang berkontribusi pada pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* berdasarkan konsistensi keberlanjutan program dan reviu kinerja anggaran dan pembangunan dari tahun sebelumnya.

Misalnya, untuk mengidentifikasi penandaan RO tahun 2024, Bappenas dan Kemenkeu dapat mengacu pada Dokumen Ringkasan RO Tematik *Stunting* Tahun 2023 baik dari jumlah RO setiap K/L hingga besaran alokasi anggaran di level RO maupun analisis lanjutan.

Gambar 3-6. Dokumen Ringkasan RO Tematik *Stunting* yang dimanfaatkan sebagai Pedoman Penandaan KRISNA K/L di Tahun Perencanaan



Sumber: Bappenas, 2024 (diolah)

3.4.2 Identifikasi K/L dan Unit Kerja yang Memiliki Program terkait *stunting*

Setelah mendapatkan daftar RO dari tahun sebelumnya, kemudian dilakukan identifikasi RO tahun berjalan terkait pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* dimulai dari Klasifikasi Rincian Output (KRO) pada K/L dan unit kerja untuk mengetahui apakah terkategori prioritas nasional atau bukan. KRO akan melihat bentuk kegiatan dari RO. Selanjutnya, substansi RO perlu untuk diidentifikasi kontribusinya terhadap penurunan *stunting*, termasuk mengklasifikasinya menjadi intervensi gizi spesifik, sensitif maupun dukungan. Apabila RO tersebut terkait maka dapat dilakukan penandaan tematik pada level RO.

Identifikasi RO kegiatan dilakukan melalui 2 (dua) cara:

1. **Proses bawah-atas (*bottom-up*):** Identifikasi mandiri (*self assessment*) oleh unit kerja dari masing-masing K/L terkait. Identifikasi sebaiknya dimulai oleh unit kerja pemilik RO mengingat bahwa unit kerja tersebutlah yang mengerti secara detail tujuan dan RO dari setiap kegiatan. Setiap unit kerja melakukan identifikasi mandiri melalui informasi pada dokumen RENJA-KL dan RKA-KL. Hasil identifikasi tersebut kemudian dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan (Sekretariat Jenderal/Sekretariat Utama) K/L sebelum disampaikan kepada Bappenas dan Kementerian Keuangan pada pertemuan rekonsiliasi di bulan Maret dan Agustus; dan

2. **Proses atas-bawah (top-down):** identifikasi RO kegiatan dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan. Untuk mempercepat proses identifikasi RO kegiatan, proses atas-bawah (*top-down*) ini didasarkan pada pengetahuan teknis dan pemahaman para Perencana yang ada di Kementerian PPN/Bappenas dan Analisis Anggaran di Kementerian Keuangan c.q. DJA, termasuk masukan dari para ahli yang terkait.

Kedua proses identifikasi RO kegiatan tersebut, baik dilakukan melalui atas-bawah atau bawah-atas mempergunakan referensi data dari sistem aplikasi yang dibangun oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan, yaitu KRISNA dan SAKTI. KRO/RO dalam KRISNA merupakan referensi bagi SAKTI. Setiap KRO/RO kegiatan memiliki kode unik. Untuk mencegah duplikasi atau kekeliruan dalam pencatatan dan analisis, kode untuk *output* baru di dalam KRISNA dan SAKTI tidak akan sama dengan kode yang sebelumnya sudah pernah dipergunakan untuk *output* yang berbeda.

Selain berpedoman pada dokumen ringkasan tahun sebelumnya, identifikasi dapat dilakukan juga dengan menyaring nama kegiatan atau output dengan memasukkan kata kunci yang relevan dengan intervensi terkait *stunting* baik pada aplikasi SAKTI maupun KRISNA K/L. Dengan memasukkan kata kunci, akan diperoleh daftar program, kegiatan atau RO yang dapat terkait *stunting*. Berikut daftar kata kunci untuk mengidentifikasi anggaran *stunting* pada RO K/L.

Tabel 3-2. Daftar Kata Kunci untuk Mengidentifikasi Anggaran Stunting

No	Intervensi Gizi Spesifik	Pencarian Kata Kunci pada RO Kementerian/Lembaga
1	Pemberian Makan Tambahan (PMT)	<ul style="list-style-type: none"> • “pmt” • “makanan tambahan” • “pemberian tambahan makanan” • “pemberian makan tambahan” • “pemberian makanan bagi ibu hamil” • “pengadaan susu balita gizi kurang, buruk, dan bumil kek” • “penambahan makanan gizi balita” • “penyediaan bahan pangan gizi balita” • “penyediaan pendukung tambahan menu gizi balita kegiatan posyandu” • “taburia” <p>Tidak termasuk jenis belanja (SMAK) yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “pmtct” • “pmt” • “pmts” • “tpmt” • “jpmt” • “kopmt” • “lansia” • “pasien” • “tb” • “pmt gf hss” • “pemutih” • “fe” • “tenaga berisiko tinggi” • “bahan kontak” • “kalsium” <p>Tidak termasuk sub-komponen dengan kata kunci:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “pmtct” • “spmt” • “skrining” • “pmba” • “vitamin” <p>Tidak termasuk komponen dengan kata kunci:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “pmtct” • “surveilans” • “mpasi” • “ttd”

No	Intervensi Gizi Spesifik	Pencarian Kata Kunci pada RO Kementerian/Lembaga
		<ul style="list-style-type: none"> • “mp-asi” <p>Tidak termasuk sub-output dengan kata kunci:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “garam” • “mp-asi” • “mpasi”
2	Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA)	<ul style="list-style-type: none"> • “mpasi” • “mp-asi” • “mp-asi” <ul style="list-style-type: none"> • “mp asi” • “pmba” <p>Tidak termasuk jenis belanja (SMAK) yang mengandung kata kunci “lampasio” Tidak termasuk komponen dengan kata kunci “pemantauan pertumbuhan”</p>
3	Promosi ASI Eksklusif	<ul style="list-style-type: none"> • “pekan asi” • “menyusui” <ul style="list-style-type: none"> • “asi eksklusif” • “imd” <p>Tidak termasuk anggaran di semua level (jenis belanja) hingga sub-output) yang menggunakan kata kunci:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “timdal” • “bimdal” <p>Tidak termasuk anggaran di komponen dan sub-output dengan kata kunci:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “psg” • “tata laksana” • “tatalaksana” • “pertumbuhan balita” • “pemantauan status gizi”
4	Tata Laksana Gizi Buruk	<ul style="list-style-type: none"> • “tatalaksana gizi buruk” • “tatalaksana anak gizi buruk” <ul style="list-style-type: none"> • “tata laksana anak gizi buruk” • “tata laksana gizi buruk” <p>Tidak termasuk anggaran dalam klasifikasi jenis belanja (SMAK) yang mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “psg x” • “psgj”
5	Pemantauan Pertumbuhan	<ul style="list-style-type: none"> • “pemantauan pertumbuhan” • “pertumbuhan balita” <p>Tidak termasuk anggaran jenis belanja (SMAK) yang mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “psg x” • “psgj”
6	Tablet Tambah Darah	<ul style="list-style-type: none"> • “zat besi” • “fe “ • “(fe)” • “fe3” <ul style="list-style-type: none"> • “tablet tambah darah” • “ttt” • “asam folat” • “anemia” <p>Tidak termasuk anggaran jenis belanja (SMAK) yang mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “fe test” • “ttt spm” • “vitamin a” • “alat penurun fe” • “ttt sesjen” <p>Tidak mencakup anggaran di level komponen yang mengandung kata “klb”</p>
7	Vitamin A	<ul style="list-style-type: none"> • “vitamin a” • “vit.a” • “vit a”
8	Kalsium dan Iodium	<ul style="list-style-type: none"> • “kalsium” • “yodium” • “iodium”
9	Imunisasi	<p>Mencakup anggaran yang outputnya mencakup kata kunci “imunisasi” atau “vaksin” dan jenis belanja (smak) yang mencakup kata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “vaksin reguler” • “ipv” • “dpt” • “hepatitis” • “difteri” • “polio” • “campak” • “bcg”

No	Intervensi Gizi Spesifik	Pencarian Kata Kunci pada RO Kementerian/Lembaga
		<p>dan anggaran dimana komponennya mencakup kata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “monitoring ketersediaan obat dan vaksin” • “penyediaan vaksin – hibah gavi” <p>Tidak termasuk jenis belanja (smak) dengan kata “DBD”</p>
10	Pengobatan Diare	<p>Mencakup anggaran di level sub-output yang menggunakan kata kunci “diare” atau “Iroa” dan di semua level (jenis belanja (smak) hingga sub-output) yang mengandung kata kunci:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “zinc” • “oralit” • “isp” • “infeksi saluran pencernaan” • “plbd” • “Iroa” • “diare” <p>Tidak termasuk anggaran dengan kata kunci:</p>
11	Malaria	<ul style="list-style-type: none"> • “malaria” • “kelambu”
12	HIV untuk Ibu Hamil	<ul style="list-style-type: none"> • “pmtct”
13	Pencegahan Kecacingan	<ul style="list-style-type: none"> • “kecacingan” • “cacing” <p>Tidak termasuk kata kunci:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “schistosomiasis” • “filariasis” • “filaria” • “pes” • “kaki gajah”
14	MTBS	<ul style="list-style-type: none"> • “mtbs” • “balita sakit”
15	Asuhan Antenatal	<ul style="list-style-type: none"> • “pemeriksaan kehamilan” • “pemeriksa kehamilan” • “pemantauan ibu hamil” • “penguatan anc” • “pendampingan ibu hamil” • “pelayanan antenatal” • “antenatal care” • “pelayanan anc” • “anc terpadu” • “anc terintegrasi” • “pendampingan bumil” <p>Tidak termasuk anggaran di jenis belanja (smak) atau sub-komponen yang mengandung kata kunci:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “hipotiroid” • “sdidtk” • “pmbs” • “lansia” • “kia” • “kesehatan ibu dan anak” • “maternal” • “deteksi resiko bumil” • “deteksi resiko ibu hamil” • “kesehatan bumil” • “kekerasan” • “kesehatan keluarga” • “kesga” • “pengantin” • “catin” • “cantin” • “amp” • “jampersal” • “deteksi risiko ibu hamil” • “deteksi risiko bumil” • “deteksi dini hepatitis pada ibu hamil”

Sumber: Bappenas, 2021

3.4.3 Analisis Penandaan RO untuk Dokumen Ringkasan Tagging

Setelah daftar RO diperoleh, masih diperlukan analisis untuk mengetahui apakah RO tersebut masih berkontribusi pada pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* pada tahun berikutnya. Salah satunya dengan menganalisis di level komponen atau sub-komponen untuk

memastikan sebuah komponen memiliki aktivitas atau output terkait *stunting* yang harus dilakukan K/L terkait yaitu:

1. Memastikan apakah aktivitas (output) tersebut berdampak terhadap penurunan *stunting* berdasarkan Stranas *Stunting*;
2. Memastikan apakah aktivitas (output) tersebut menysasar kepada sasaran prioritas 1000 HPK;
3. Memastikan apakah aktivitas (output) tersebut memiliki keterkaitan dengan indikator antara Perpres 72/2021; dan
4. Mengecek data historis penandaan dari tahun sebelumnya (sub-bab 3.4.1) untuk memastikan keterkaitan penandaan tahun perencanaan apakah konsisten dengan penandaan tahun sebelumnya atau terdapat perubahan desain program dan kegiatan.

Contoh pelaksanaan analisis penandaan dapat dilihat pada tabel di bawah padayang RO memiliki aktivitas (output) pemberian makanan tambahan kepada Ibu Hamil. Setelah melalui analisis diputuskan bahwa RO ini dapat ditandai *stunting* pada tahun anggaran berikutnya.

Tabel 3-3. Contoh Analisis Penandaan RO

RO/Komponen TA 2024	Apakah Berdampak Penurunan Stunting menurut Stranas?	Apakah memiliki sasaran 1000 HPK?	Apakah terkait Indikator Antara Perpres 72/2021?	Apakah memiliki data historis penandaan <i>stunting</i> ?	Catatan
6799 QEA 001-Ibu Hamil KEK yang mendapat makanan tambahan dari Buffer Stock [LP - 4] Komponen: 051-Penyediaan MT Ibu Hamil KEK Bufferstock	Ya, merupakan intervensi prioritas pada intervensi gizi spesifik untuk Ibu Hamil pada kelompok masyarakat miskin atau Ibu Hamil KEK	Ya, menysasar Ibu Hamil	Ya, pada indikator Lampiran A. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi.	Ya, pada tahun 2023 memiliki RO tagging tematik <i>stunting</i> yaitu: 6799 QEA 001-Ibu Hamil KEK yang mendapat makanan tambahan dari Buffer Stock Komponen: 051-Penyediaan MT Ibu Hamil KEK Bufferstock	Berdasarkan analisis tersebut, K/L melakukan penandaan RO tematik <i>stunting</i> TA 2024

Sumber: Bappenas, 2024

3.4.4 Pengaturan Penandaan Anggaran untuk Dokumen Ringkasan Tagging RO di Tahun Perencanaan

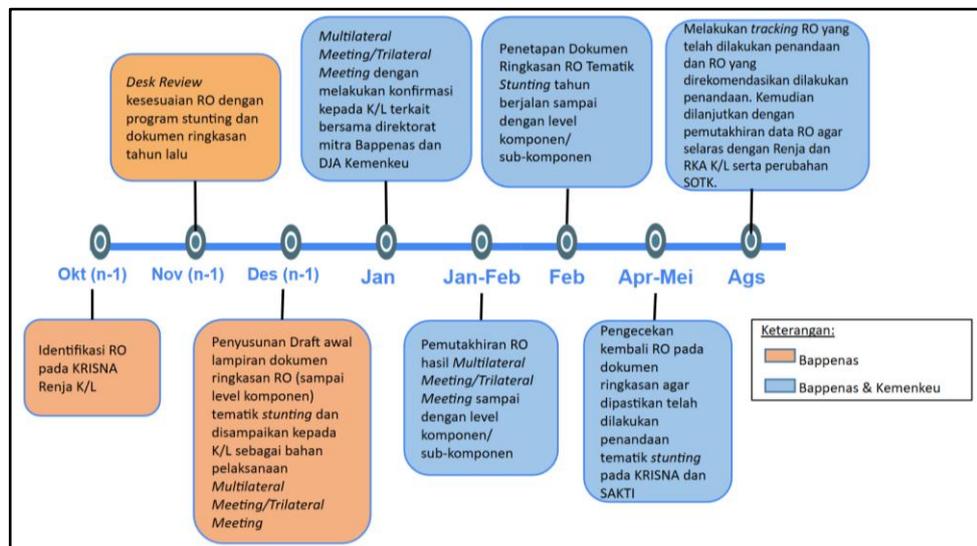
Pengaturan pelaksanaan penandaan RO dilaksanakan kurang lebih selama 10 bulan semenjak tahun sebelumnya (n-1) hingga tahun berjalan. Proses ini dikoordinir oleh Bappenas dan Kemenkeu dengan melibatkan K/L terkait. Dimulai pada tahun perencanaan (n-1) di bulan Oktober dengan melakukan pelacakan RO pada aplikasi KRISNA lalu dilanjutkan dengan *Desk Review* pada dokumen ringkasan RO tahun sebelumnya dan diakhiri dengan penyusunan draft

awal dokumen ringkasan RO tematik *stunting* sebagai bahan pelaksanaan *Multilateral Meeting/Trilateral Meeting*.

Kemudian pada tahun pelaksanaan di bulan Januari-Februari dilaksanakan *Multilateral Meeting/Trilateral Meeting* untuk mendapatkan data pemutakhiran. Dari pertemuan ini diperoleh Dokumen Ringkasan RO Tematik *Stunting* sampai dengan level komponen/sub-komponen untuk dipastikan penandaan dilakukan pada aplikasi KRISNA dan SAKTI di bulan April-Mei. Terakhir pada bulan Agustus Bappenas bersama Kemenkeu melakukan pelacakan RO yang dimutakhirkan agar selaras dengan Renja dan RKA K/L serta perubahan SOTK.

Tahapan identifikasi RO dapat dijelaskan pada gambar berikut:

Gambar 3-7. Tahapan Identifikasi RO dalam Proses Penandaan Tematik Stunting Belanja K/L



Sumber: Bappenas, 2024 (diolah)

3.4.4 Kriteria RO Tematik *Stunting* yang dilakukan Penandaan

Rincian Output (RO) yang ditandai dalam proses penandaan tematik *stunting* merupakan RO yang memiliki daya ungkit dalam rangka mendukung pencapaian target penurunan prevalensi *stunting* di dalam RPJMN sebesar 14,2 persen pada tahun 2029, serta capaian indikator-indikator percepatan penurunan *stunting* yang telah ditetapkan pada Perpres 72/2021.

Secara umum kriteria Rincian Output (RO) yang dilakukan penandaan tematik *stunting* adalah sebagai berikut:

1. RO tersebut memiliki keluaran yang mendukung langsung pencapaian Stranas *Stunting* melalui indikator intervensi spesifik, intervensi sensitif, dan intervensi dukungan serta indikator Pilar Perpres 72/2021;
2. RO tersebut menyasar langsung sasaran prioritas, sasaran penting dan sasaran lainnya yang mendukung pencapaian indikator Perpres 72/2021;
3. RO tersebut telah dilakukan penandaan sejak tahun 2019 dan konsisten terhadap capaian keluaran yang telah direncanakan yang bersifat kumulatif;
4. RO tersebut merupakan RO pecahan dan/atau pengembangan dari RO utama yang telah dilakukan penandaan pada tahun sebelumnya;
5. RO tersebut merupakan RO Baru dan belum ada sebelumnya serta teridentifikasi mendukung pencapaian target indikator Perpres 72/2021; dan
6. RO tersebut adalah RO baru yang baru teridentifikasi dan disepakati bersama dalam forum *Multilateral Meeting* maupun *Trilateral Meeting* dan mendukung pencapaian target indikator Perpres 72/2021.

3.5. Penandaan (*Tagging*) dan Pelacakan (*Tracking*) RO Tematik *Stunting*

Penandaan anggaran akan membantu Bappenas, Kemenkeu dan K/L terkait untuk memantau dan mengevaluasi capaian realisasi anggaran dan output terkait *stunting*. Selain itu, penandaan akan dilanjutkan dengan pemetaan RO tematik *stunting* dalam rangka penyusunan dokumen ringkasan RO tematik *stunting* berdasarkan:

1. Tiga (3) tipe intervensi, yaitu intervensi gizi spesifik, intervensi gizi sensitif dan intervensi gizi dukungan;
2. Keterkaitannya dengan indikator Perpres 72/2021 baik pada Lampiran A maupun Lampiran B; dan
3. Perbandingan target dan anggaran dengan tahun anggaran sebelumnya

Dokumen Ringkasan RO Tematik *Stunting* tahun berjalan menghasilkan basis data untuk mengukur capaian realisasi anggaran dan output pada pemantauan dan evaluasi sekaligus

mendukung tersedianya Laporan Kinerja Anggaran dan Pembangunan Program Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* bersumber Belanja K/L baik semester maupun tahunan.

Gambar 3-8. Keterkaitan Penandaan Anggaran terhadap Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*



Sumber: Bappenas, 2024 (diolah)

Lebih lanjut tidak semua alokasi anggaran yang akan ditandai semata-mata hanya untuk intervensi penurunan *stunting*. Pada saat K/L melakukan identifikasi RO yang akan ditandai sebagai anggaran tematik *stunting*, perlu diperhitungkan proporsi anggaran yang benar-benar terkait dengan upaya penurunan *stunting*. Sebagai alat bantu, K/L dapat menggunakan tabel berikut untuk memetakan anggaran yang dimilikinya.

Tabel 3-4. Contoh Tabel sebagai Alat Bantu K/L Untuk Memetakan Anggaran Terkait *Stunting*

Kementerian/Lembaga	Program	Kegiatan	KRO	RO	Target	Satuan	Komponen	Pagu Awal (Ribu Rupiah)	Pagu Revisi (Ribu Rupiah)	Estimasi Anggaran (Ribu Rupiah)	Jenis Intervensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Kementerian xxx
Badan xxx

Keterangan:

- (1) Diisi nama kementerian/lembaga
- (2) Diisi nomenklatur program
- (3) Diisi nomenklatur kegiatan
- (4) Diisi dengan nomenklatur Klasifikasi Rincian Output (KRO) berdasarkan sektor, bidang, atau jenis tertentu
- (5) Diisi dengan Rincian Output (RO) berupa keluaran spesifik yang dihasilkan oleh unit kerja kementerian atau lembaga. Pada level ini dilakukan penandaan (*tagging*) tematik *stunting*
- (6) Diisi dengan sasaran berupa angka atau bilangan yang ingin dicapai dan dihasilkan
- (7) Diisi dengan satuan yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran RO yang ditetapkan
- (8) Diisi dengan aktivitas yang dikerjakan unit kerja untuk mencapai target RO
- (9) Diisi dengan pagu awal pada Renja K/L
- (10) Diisi dengan pagu revisi pada RKA/KL (kolom ini dapat dikosongkan apabila data belum tersedia)
- (11) Diisi dengan estimasi anggaran yang benar-benar terkait *stunting*. Misalnya dengan cara mengurangi anggaran pada level komponen yang tidak terkait *stunting*, menghitung anggaran yang ditujukan penerima manfaat 1000 HPK (seperti Ibu Hamil dan Baduta) atau dilakukan pembobotan berdasarkan rumus perhitungan sebelumnya maupun pertimbangan para ahli
- (12) Diisi dengan jenis intervensi apakah spesifik, sensitif atau dukungan

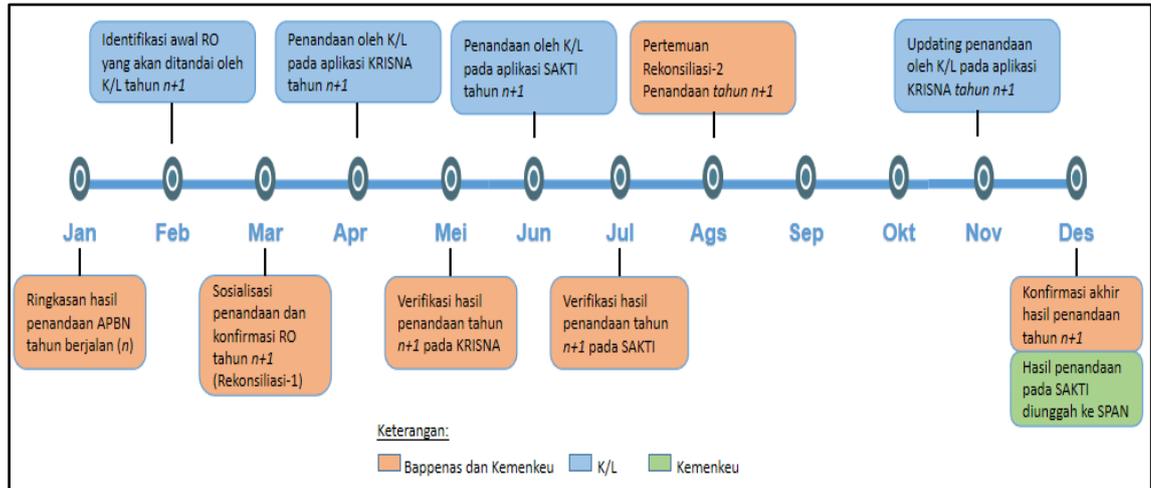
Sumber: Bappenas, 2024 (diolah)

Pemanfaatan tabel di atas dapat dilakukan pada proses *bottom-up* yaitu asesmen mandiri oleh K/L maupun *top-down* yaitu desk reviu oleh Bappenas dan Kemenkeu. Setelah melengkapi tabel tersebut, K/L bersama Bappenas dan Kemenkeu membahas hasilnya melalui pertemuan

konfirmasi RO tematik *stunting* pada bulan Desember (n-1) hingga bulan Februari tahun anggaran berjalan.

Kemudian proses penandaan anggaran tematik *stunting* biasanya dilakukan selama 12 bulan menyesuaikan dengan siklus perencanaan dan perubahan alokasi anggaran sebagaimana terlihat pada gambar berikut. Penjelasan pada masing-masing aktivitas dapat dilihat pada gambar dan tabel di bawahnya.

Gambar 3-9. Proses Penandaan Anggaran Stunting



Sumber: Bappenas, 2021 (diolah)

Tabel 3-5. Penjelasan Proses Penandaan Anggaran Stunting

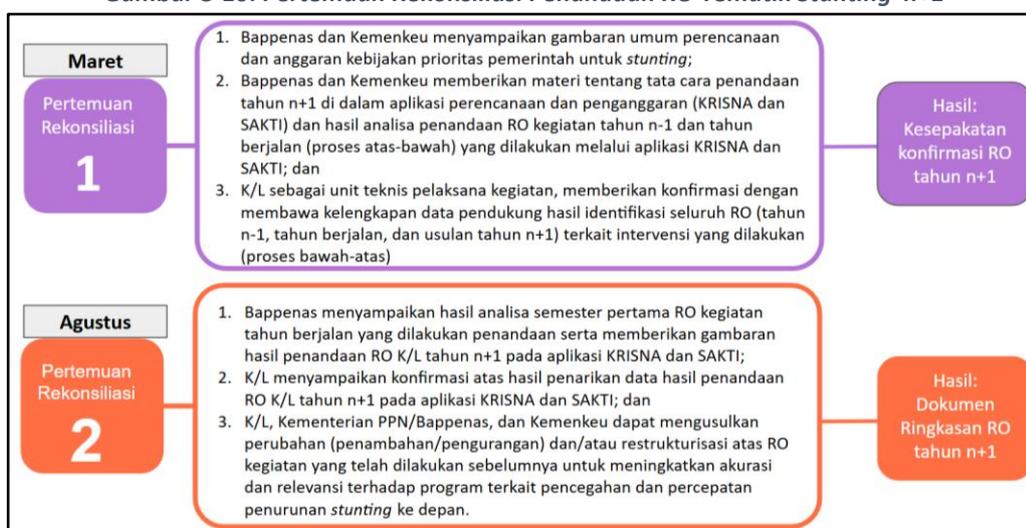
No	Waktu	Kegiatan	Data Pendukung dan Keluaran	Penanggung Jawab
1	Januari	Ringkasan hasil penandaan RO K/L yang terkait penurunan stunting pada APBN tahun berjalan (n)	Data Pendukung: <ul style="list-style-type: none"> Hasil penandaan RO tahun berjalan pada aplikasi perencanaan penganggaran; dan Data pendukung oleh K/L. Keluaran: Ringkasan hasil penandaan tahun berjalan dengan cakupan sekurang-kurangnya: daftar K/L yang melakukan penandaan; daftar program, kegiatan, RO, dan volume; dan alokasi anggaran (sesuai DIPA tahun berjalan).	Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenkeu
2	Februari	Identifikasi awal RO yang akan ditandai oleh K/L tahun n+1	Data Pendukung: <ul style="list-style-type: none"> Daftar RO eksisting tahun sebelumnya (n-1) dan potensi RO baru yang mendukung penurunan <i>stunting</i> Hasil evaluasi penandaan tahun n-1 Keluaran: Daftar identifikasi awal RO yang akan ditandai oleh K/L tahun n+1 (<i>proses bottom-up</i>)	K/L terkait
3	Maret	Sosialisasi penandaan dan	Data Pendukung: <ul style="list-style-type: none"> Hasil analisa penandaan tahun n-1 	Forum Koordinasi

No	Waktu	Kegiatan	Data Pendukung dan Keluaran	Penanggung Jawab
		konfirmasi RO tahun $n+1$ (Pertemuan Rekonsiliasi ke-1)	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil identifikasi awal oleh K/L dan justifikasinya • Hasil identifikasi awal oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenkeu Keluaran: Konfirmasi RO yang akan ditandai oleh K/L tahun $n+1$ (proses <i>bottom-up</i> dan <i>top-down</i>)	
4	April	Penandaan oleh K/L pada aplikasi KRISNA tahun $n+1$	Data Pendukung: <ul style="list-style-type: none"> • Daftar RO yang telah dikonfirmasi untuk dilakukan penandaan (hasil Pertemuan Rekonsiliasi ke-1) Keluaran: Penandaan <i>output</i> tahun $n+1$ pada aplikasi KRISNA sesuai kesepakatan pada Rekonsiliasi-1	K/L terkait
5	Mei	Verifikasi hasil penandaan tahun $n+1$ pada KRISNA melalui proses penelaahan Renja K/L	Data Pendukung: Penandaan RO tahun $n+1$ di dalam aplikasi KRISNA yang telah dilakukan K/L Keluaran: Penelaahan Renja K/L yang mencakup verifikasi RO K/L tahun $n+1$ yang telah dilakukan penandaan	Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenkeu
6	Juni	Penandaan oleh K/L pada aplikasi SAKTI tahun $n+1$	Data Pendukung: <ul style="list-style-type: none"> • Daftar RO yang telah dikonfirmasi untuk dilakukan penandaan (hasil Pertemuan Rekonsiliasi ke-1) • Hasil penelaahan Renja K/L terhadap hasil tagging • Data <i>mirroring</i> dari KRISNA yang sudah terdapat pada aplikasi SAKTI Keluaran: Penandaan RO tahun $n+1$ pada aplikasi SAKTI sesuai kesepakatan pada Rekonsiliasi-1 dan masukan hasil penelaahan Renja K/L	K/L terkait
7	Juli	Verifikasi hasil penandaan tahun $n+1$ melalui penelaahan SAKTI	Data Pendukung: Penandaan RO tahun $n+1$ di dalam aplikasi SAKTI yang telah dilakukan K/L Keluaran: Penelaahan SAKTI yang mencakup verifikasi RO K/L tahun $n+1$ yang telah dilakukan penandaan	Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenkeu
8	Agustus	Pertemuan Rekonsiliasi-2 penandaan tahun $n+1$	Data Pendukung: <ul style="list-style-type: none"> • Hasil analisa penandaan semester 1 tahun berjalan (n) • Data RO K/L tahun $n+1$ yang telah dilakukan penandaan pada aplikasi KRISNA dan SAKTI Keluaran: <ul style="list-style-type: none"> • Konfirmasi terhadap hasil penandaan dan mengidentifikasi RO K/L yang seharusnya dilakukan penandaan atau sebaliknya tidak terkait dengan penurunan <i>stunting</i> • Hasil kesepakatan Rekonsiliasi-2 akan digunakan K/L sebagai bahan untuk melakukan perbaikan penandaan 	Forum Koordinasi
9	November	<i>Updating</i> penandaan oleh K/L pada aplikasi	Data Pendukung: Kesepakatan penandaan RO yang dihasilkan pertemuan Rekonsiliasi-2	K/L terkait

No	Waktu	Kegiatan	Data Pendukung dan Keluaran	Penanggung Jawab
		KRISNA dan SAKTI tahun $n+1$	Keluaran: Pemutakhiran (<i>updating</i>) penandaan RO pada aplikasi KRISNA dan RKA K/L sesuai kesepakatan pada Rekonsiliasi-2	
10	Desember	<ul style="list-style-type: none"> Konfirmasi akhir hasil penandaan tahun $n+1$ Mengunggah hasil penandaan pada SAKTI ke SPAN 	Data Pendukung: Data RO K/L tahun $n+1$ yang telah dilakukan <i>updating</i> penandaan pada aplikasi KRISNA dan RKA K/L Keluaran: <ul style="list-style-type: none"> Konfirmasi akhir hasil penandaan tahun $n+1$ Final hasil penandaan pada aplikasi SAKTI diunggah ke SPAN 	<ul style="list-style-type: none"> Forum Koordinasi Kemenkeu

Dalam proses penandaan anggaran, dilakukan dua kali pertemuan rekonsiliasi, verifikasi, dan konfirmasi, yang menghasilkan daftar RO hasil penandaan tematik *stunting* yang disepakati oleh K/L bersama Bappenas dan Kemenkeu. Pertemuan pertama dilakukan di bulan Maret menghasilkan kesepakatan awal konfirmasi RO tahun berjalan dan pertemuan kedua dilakukan pada bulan Agustus untuk pemutakhiran data RO tematik *stunting* berdasarkan perubahan pada dokumen Renja, RKA KL maupun kebijakan SOTK K/L yang menghasilkan Dokumen Ringkasan RO Penandaan Tematik *Stunting* tahun berjalan.

Gambar 3-10. Pertemuan Rekonsiliasi Penandaan RO Tematik *Stunting* $n+1$



Sumber: Bappenas, 2021 (diolah)

3.6. Perhitungan Proporsi Anggaran RO Tematik *Stunting*

Dokumen Stranas *Stunting* 2018-2024 telah menjelaskan secara detail jenis intervensi spesifik dan sensitif yang diutamakan dalam percepatan pencegahan *stunting*. Intervensi-intervensi tersebut tidak semua berada pada level RO. Hasil Kajian Bank Dunia “*Public Expenditure Review for Stunting Intervention*” tahun 2018 menemukan bahwa apabila penandaan belanja *stunting* hanya dilakukan hingga level *output* (sekarang menjadi RO), maka estimasi yang dihasilkan akan cenderung “*over estimate*”. Detail mengenai pertimbangan menghitung proporsi anggaran dapat dilihat pada lampiran.

Lebih lanjut, upaya perbaikan melalui RSPP telah menunjukkan bahwa penandaan di level RO secara efektif mengidentifikasi alokasi anggaran terkait *stunting*. Konsekuensinya adalah jumlah RO menjadi lebih banyak dibandingkan jumlah *output* dari tahun sebelumnya. Misalnya saja Kemenkes yang di tahun 2020 memiliki 47 *output* pada tahun 2021 jumlahnya meningkat menjadi 181 RO.

Meski demikian masih ditemukan beberapa RO yang bila dilihat lebih dalam pada level komponen, sub-komponen, maupun detail, jenis belanja pada level ini juga meliputi kegiatan-kegiatan yang tidak terkait *stunting*. Dikarenakan proses penandaan RO tidak seluruhnya dilengkapi dengan data di level komponen, sub-komponen, maupun detail jenis belanja. Sehingga masih dibutuhkan upaya untuk mengklarifikasi alokasi belanja di level komponen dan sub-komponen bersama unit kerja K/L terkait. Hasil klarifikasi dan perhitungan ini selanjutnya akan disebut sebagai “Analisis Lanjutan” yang tercantum pada Dokumen Ringkasan RO Tematik *Stunting* dan Laporan Kinerja K/L semester dan tahunan.

Berikut beberapa pendekatan yang digunakan untuk menghitung anggaran RO Tematik *Stunting*.

3.6.1. Seluruh Anggaran di Level RO dan Komponen terkait *Stunting*

Hasil dari identifikasi bersama K/L menunjukkan bahwa seluruh anggaran baik pada level RO maupun komponen terkait *stunting*. Sehingga seluruh anggaran pada level RO dimasukkan pada analisis lanjutan. Seperti contoh pada RO 6799 PEH 001 Promosi dan Penyebarluasan Informasi Terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Kemenkes. Dari pagu sebesar Rp971 juta pada level RO, diidentifikasi bahwa tiga komponen turunannya memiliki keterkaitan dengan *stunting* sehingga dimasukkan seluruhnya pada alokasi anggaran di level analisis lanjutan. Sama halnya dengan RO 3165 QDB 002 Desa Pangan Aman yang dikelola BPOM di mana alokasi pagu revisi sebesar Rp34 miliar seluruhnya dimasukkan pada alokasi level analisis lanjutan.

Tabel 3-6. Metode Perhitungan Seluruh Anggaran di Level RO dan Komponen Terkait Stunting

Kementerian /Lembaga	Program/ Kegiatan/ KRO	RO/ Komponen	Target	Satuan	Alokasi Level RO (Ribu Rupiah)	Analisis Lanjutan (Ribu Rupiah)	Jenis Intervensi
Kemendes	6799-PEH	001-Promosi dan Penyebarluasan Informasi Terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	28	Kegiatan	971.060	971.060	Spesifik
		051-Fasilitasi penyediaan layanan edukasi kesehatan ibu hamil	2	Kegiatan	22.660	22.660	
		052-Pembuatan Video Edukasi Kesehatan Ibu	2	Kegiatan	850.000	850.000	
		053-Senam Ibu Hamil	24	Kegiatan	98.400	98.400	
B POM	3165-QDB	002-Desa Pangan Aman	874	Lembaga	34.330.068	34.330.068	Sensitif
		051-Perkuatan kapasitas desa			8.604.347	8.604.347	
		052-Pemberdayaan komunitas desa			16.865.204	16.865.204	
		053-Pengawasan keamanan pangan desa			3.812.567	3.812.567	
		054-Pemantauan dan evaluasi terhadap intervensi desa sebelumnya			5.047.950	5.047.950	

Sumber: Dokumen Ringkasan Rincian Output Tematik Stunting TA 2023, Bappenas

3.6.2. Hanya Anggaran di Level Komponen tertentu terkait Stunting

Hasil asesmen mandiri K/L serta konfirmasi bersama Bappenas dan Kemenkeu menunjukkan bahwa tidak seluruh anggaran pada level komponen terkait *stunting*. Sehingga hanya anggaran pada komponen tertentu saja yang dimasukkan pada analisis lanjutan seperti contoh pada dua RO yang dilaksanakan Kemendes di bawah ini. Pada RO 6818 PEA 031 Koordinasi pencapaian eliminasi eradikasi penyakit tropis terabaikan dari pagu sebesar Rp1,8 miliar pada level RO, diidentifikasi hanya satu dari tiga komponen turunannya memiliki keterkaitan dengan *stunting*. Sehingga alokasi pada analisis lanjutan menjadi Rp782 juta. Sama halnya dengan RO 6818 QAH 031 Surveilans dan deteksi dini penyakit tropis terabaikan dari alokasi pagu revisi sebesar Rp7,4 miliar, hanya dua komponen yang anggarannya terkait *stunting*, menjadi Rp6 miliar.

Tabel 3-7. Metode Perhitungan Hanya Anggaran di Level Komponen tertentu Terkait Stunting

Kementerian /Lembaga	Program/ Kegiatan/ KRO	RO/ Komponen	Target	Satuan	Alokasi Level RO (Ribu Rupiah)	Analisis Lanjutan (Ribu Rupiah)	Jenis Intervensi
----------------------	------------------------	--------------	--------	--------	--------------------------------	---------------------------------	------------------

Kemenkes	6818-PEA	031-Koordinasi pencapaian eliminasi eradikasi penyakit tropis terabaikan (LP)	86	Kegiatan	1.762.220	782.010	Spesifik
		051-Koordinasi Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Filariasis dan Kecacingan	35	Kegiatan	782.010	782.010	
		052-Koordinasi dan Reviu Implementasi Kegiatan dalam Rangka Eliminasi Schistosomiasis Lintas Kementerian dan lembaga	1	Kegiatan	15.900		
		053-Koordinasi Program Pencegahan dan Pengendalian Kusta dan Frambusia	50	Kegiatan	966.310		
Kemenkes	6818-QAH	031-Surveilans dan deteksi dini penyakit Tropis Terabaikan (LP)	73	Layanan	7.351.338	6.021.540	Spesifik
		051-Pencegahan Dini/ Penanggulangan Kejadian Ikutan Minum Obat (POPM) Filariasis dan Kecacingan	8	Layanan	144.800	144.800	
		052-Surveilans Filariasis dan Kecacingan Pasca POPM	37	Layanan	5.876.740	5.876.740	
		053-Surveilans dan Pengendalian Schistosomiasis	28	Layanan	1.329.798		

Sumber: Dokumen Ringkasan Rincian Output Tematik Stunting TA 2023, Bappenas

3.6.3. Hanya Anggaran di bawah Level Komponen tertentu terkait *Stunting*

Pendekatan berikutnya adalah K/L terkait mengidentifikasi mandiri anggaran *stunting* di bawah level komponen, misalnya pada level sub-komponen maupun detail kegiatan. Hasilnya kemudian disampaikan kepada Bappenas dan Kemenkeu pada pertemuan konfirmasi. Perhitungan anggaran di bawah level komponen biasanya hanya diketahui oleh unit kerja K/L yang menyusun dokumen RAB (Rencana Anggaran Biaya) sehingga perlu dicantumkan informasi tambahan pada dokumen ringkasan. Misalnya pada RO 6812 QAA 002 Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan di Papua dan Papua Barat terdapat dua dari enam komponen memiliki anggaran terkait *stunting*. Dari dua komponen ini lalu ditemukan sub-komponen pembiayaan pada penempatan tugas khusus tim dan individu yang dianggap berkaitan erat dengan *stunting*. Maka anggaran di level RO sebesar Rp4,8 miliar menjadi Rp1,7 miliar di level analisis lanjutan.

Kemudian pada RO 2794 SCJ 001 SDM Pendamping Program Sosial Budaya yang dilatih tentang KGPA yang dilaksanakan KPPPA, hanya satu dari dua komponen terkait *stunting*. Lalu bila dilihat pada level di bawahnya ditemukan bahwa anggaran terkait *stunting* hanya diarahkan pada empat dari lima LSM yang mendapatkan pelatihan materi *stunting* saja. Dari alokasi pagu revisi sebesar Rp650 juta menjadi Rp487 juta.

Tabel 3-8. Metode Perhitungan Hanya Anggaran di bawah Level Komponen Terkait *Stunting*

Kementerian /Lembaga	Program/ Kegiatan/ KRO	RO/ Komponen	Target	Satuan	Alokasi Level RO (Ribu Rupiah)	Analisis Lanjutan (Ribu Rupiah)	Jenis Intervensi
Kemenkes	6812-QAA	002-Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan di Papua dan Papua Barat (SDM)	200	Orang	4.793.840	1.680.094	Dukungan
		051-Persiapan Dan Koordinasi	1	Dokumen	671.850		
		052-Pelaksanaan Penempatan Tugas Khusus Tenaga Kesehatan secara Tim	28	Orang	704.280		
		<i>Sub Komponen: Penempatan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan secara Tim di Puskesmas</i>				457.782	
		053-Pelaksanaan Penempatan Tugas Khusus Tenaga Kesehatan Individu	96	Orang	1.880.480		
		<i>Sub Komponen: Penempatan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan secara Individu di Puskesmas</i>				1.222.312	
		054-Pemulangan Tugsus Tenaga Kesehatan secara Tim	20	Orang	503.800		
		055-Pemulangan Tugsus Tenaga Kesehatan Individu	56	Orang	710.640		
		056-Monitoring dan Evaluasi	2	Lokus	322.790		
KPPPA	2794-SCJ	001-SDM Pendamping Program Bidang Sosial Budaya yang dilatih tentang KGPA	120	Orang	650.000	487.040	Dukungan
		051-Penyelenggaraan Advokasi dan Sosialisasi Pelatihan SDM Pendamping Pemberdayaan Sosial dan Budaya		Orang	41.200		
		052-Pelaksanaan Pelatihan SDM Pendamping Pemberdayaan Sosial dan Budaya	120	Orang	608.800		
		<i>Keterangan: Dari sasaran lima LSM, hanya empat LSM yang dianggarkan dilatih stunting</i>				487.040	

Sumber: Dokumen Ringkasan Rincian Output Tematik Stunting TA 2023, Bappenas

3.6.4. Hanya Anggaran yang Menyasar Sasaran Prioritas Stunting

Selanjutnya adalah pendekatan yang menghitung anggaran di level komponen berdasarkan jumlah sasaran prioritas (1000 HPK) seperti contoh RO 6282 QEB 201 Keluarga yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat. Hasil asesmen mandiri dari Kemensos menyebutkan bahwa jumlah penerima manfaat pada sasaran prioritas *stunting* adalah 989 Ibu Hamil dan 2.098.391 Anak Usia Dini (AUD) atau anak berusia Baduta dan Balita. Kedua kategori sasaran ini kemudian

dijumlahkan lalu dikali dengan besaran Bansos yang diterima setiap orang sebesar Rp3 juta sehingga didapatkan nilai Rp6.3 triliun yang dianggap terkait dengan *stunting* pada komponen 055-Penyaluran Bantuan Sosial Bersyarat. Kemudian setelah dianalisis dengan komponen lainnya didapatkan dari pagu revisi di level RO sebesar Rp28,7 triliun menjadi Rp6,3 triliun di level analisis lanjutan.

Tabel 3-9. Metode Perhitungan Hanya Anggaran yang Menyasar Sasaran Prioritas Stunting

Kementerian /Lembaga	Program/ Kegiatan/ KRO	RO/ Komponen	Target	Satuan	Alokasi Level RO (Ribu Rupiah)	Analisis Lanjutan (Ribu Rupiah)	Jenis Intervensi
Kemensos	6282-QEB	201-Keluarga yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat			28.735.317.111	6.311.509.975	Sensitif
		055-Penyaluran Bantuan Sosial Bersyarat	10 juta	KPM	28.709.816.300		
		<p><u>Jumlah Sasaran:</u> Ibu Hamil 989 orang dan Anak Usia Dini 2.097.42 orang sehingga total penerima manfaat sebanyak 2.098.391 orang</p> <p><u>Perhitungan</u> Rp3 juta Bansos x 2.098.391 orang = Rp 6.295.173.000.000</p>				6.295.173.000	
		056-Assessment dan Persiapan Terminasi Penerima Bantuan Sosial PKH	1 juta	Calon KPM	7.260.520	7.260.520	
		057-Pemantauan dan Peningkatan Kapasitas Kepesertaan PKH	10 juta	KPM	1.983.512	1.983.512	
		058-Rekonsiliasi dan Konsolidasi Penyaluran Bantuan Sosial	10 juta	KPM	7.092.943	7.092.943	
		062-Operasional PPKH Pusat	1	Layanan	9.163.836	-	

Sumber: Dokumen Ringkasan Rincian Output Tematik Stunting TA 2023, Bappenas

3.6.5. Pembobotan Anggaran di Level RO atau Komponen

Pendekatan dengan pembobotan adalah pendekatan anggaran berdasarkan masukan dari Bank Dunia dan para pakar sejak dilakukannya penandaan anggaran tematik *stunting* tahun 2020 yaitu dengan memberikan bobot atau persentase dari total anggaran di level RO atau komponen. Beberapa hal yang mendasari pendekatan ini antara lain:

1. Sulitnya mengidentifikasi anggaran terkait *stunting* di level komponen, sub-komponen maupun detail kegiatan karena desain awal program, kegiatan dan RO tidak ditujukan untuk *stunting*; dan

2. Sulitnya mengidentifikasi jumlah penerima manfaat langsung pada sasaran prioritas (1000 HPK).

Tabel berikut menggambarkan contoh pembobotan pada tiga RO yang masing-masing diampu oleh Kemenkes, Kemensos dan Kemenag.

1. Pada RO 5610 QEA 001 Cakupan penduduk yang menjadi PBI dalam JKN/KIS menggunakan pembobotan berdasarkan asumsi penerima manfaat adalah 12 persen balita serta 70 persen ibu hamil dan anak. Pembobotan ini kemudian dikalikan dengan total alokasi di level RO sebesar Rp46,5 triliun menjadi Rp3,9 triliun di analisis lanjutan;
2. Pada RO 6296 QEB 101 KPM yang Memperoleh Bantuan Sosial Sembako menggunakan pembobotan berdasarkan asumsi penerima manfaat adalah 30,8 persen adalah sasaran prioritas (1000 HPK). Pembobotan ini kemudian dikalikan dengan total alokasi di level RO sebesar Rp45,1 triliun menjadi Rp13,9 triliun di analisis lanjutan; dan
3. Pada RO 2104 QDE 101 Keluarga Islam yang Memperoleh Bimbingan Perkawinan dan Keluarga Sakinah menggunakan pembobotan berdasarkan asumsi persentase materi pada modul yang diberikan di kelas bimbingan. Hasilnya terdapat satu komponen yang total anggarannya dikali dengan 25 persen dan dua komponen dikali dengan 33,3 persen. Sehingga total alokasi di level RO dari Rp95 miliar menjadi Rp30,6 miliar di level analisis lanjutan.

Tabel 3-10. Metode Perhitungan Hanya Anggaran dengan Pembobotan di Level RO atau Komponen

Kementerian/Lembaga	Program/Kegiatan/KRO	RO/Komponen	Target	Satuan	Alokasi Level RO (Ribu Rupiah)	Analisis Lanjutan (Ribu Rupiah)	Jenis Intervensi
Kemenkes	5610-QEA	001-Cakupan penduduk yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam JKN/KIS (PK)	96,8 juta	Orang	46.464.000.000	3.902.976.000	Sensitif
		051-Pembayaran iuran PBI JKN	96,8 juta	Orang	46.464.000.000		
		<u>Perkiraan Sasaran:</u> 12% Balita dan 70% Ibu Hamil dan Anak <u>Perhitungan</u> 12%x70%xRp46,5 triliun=Rp3,9 triliun				3.902.976.000	
Kemensos	6296-QEB	101-KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Sembako	18,8 juta	Keluarga	45.120.000.000	13.896.960.000	Sensitif
		051-Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Sembako	18,8 juta	Keluarga	45.120.000.000		
		<u>Perkiraan Sasaran:</u> 30,8% menasar 1000 HPK <u>Perhitungan</u> 30,8%xRp45,12 triliun=Rp13,9 triliun				13.896.960.000	
Kemenag	2104-QDE	001-Keluarga Islam yang Memperoleh Bimbingan Perkawinan dan Keluarga Sakinah			95.080.000	30.617.500	Sensitif

		051-Keluarga Sakinah	91.800	Orang	12.580.000		
		<u>Pembobotan Materi Stunting:</u> 25% dari materi bimbingan terkait gizi keluarga dan stunting <u>Perhitungan</u> 25%xRp12,6 miliar=Rp3,1 miliar				3.145.000	
		052-Bimbingan Perkawinan Pra Nikah dan Calon Pengantin	750.000	Pasang	72.500.000		
		<u>Pembobotan Materi Stunting:</u> 33,3% dari materi bimbingan terkait gizi keluarga dan stunting <u>Perhitungan</u> 33,3%xRp72,5 miliar=Rp24,1 miliar				24.142.500	
		053-Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Remaja	257.000	Orang	10.000.000	3.330.000	
		<u>Pembobotan Materi Stunting:</u> 33,3% dari materi bimbingan terkait gizi keluarga dan stunting <u>Perhitungan</u> 33,3%xRp10 miliar=Rp3,3 miliar					

Sumber: Dokumen Ringkasan Rincian Output Tematik Stunting TA 2023, Bappenas

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PENGANGGARAN PELAKSANAAN PROGRAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

4.1. Definisi dan Tujuan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja

Pemantauan dan evaluasi kinerja merupakan aktivitas yang tidak bisa dilepaskan dari perencanaan pembangunan dan penganggaran. Peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2006, tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, menjelaskan bahwa pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Sementara itu, evaluasi didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.

Sejalan dengan hal tersebut, Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan menjelaskan bahwa pemantauan merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan untuk melihat kesesuaian pelaksanaan perencanaan serta mengantisipasi permasalahan guna mengambil tindakan sedini mungkin. Pemantauan menjadi kunci utama dalam mencapai sasaran pembangunan serta berperan penting dalam mengawal kerangka evaluasi dan pengendalian pembangunan untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang terpadu.

Sementara evaluasi dilakukan dengan membandingkan *input* (masukan), *output* (keluaran), dan *outcome* (hasil) dari suatu program dan kegiatan terhadap rencana dan standar yang juga bertujuan untuk mengetahui pencapaian hasil, kemajuan, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana pembangunan. Dalam hal ini evaluasi akan menganalisis data dan informasi untuk menilai capaian sasaran pembangunan yang dilakukan pada saat pelaksanaan (*on-going*) dan pasca-pelaksanaan (*ex-post*).

Pemantauan dan evaluasi kinerja dimanfaatkan untuk mengukur, menilai, dan menganalisis kinerja pembangunan dan anggaran tahun berjalan dan tahun sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja pembangunan dan anggaran. Pelaksanaannya memanfaatkan sistem pengumpulan dan pelaporan data yang sudah ada termasuk data Badan Pusat Statistik (BPS), data K/L, sistem perencanaan, penganggaran, dan realisasi belanja pemerintah seperti SMART, KRISNA, SAKTI dan e-Monev.

Hasil dari pelaksanaan pemantauan dan evaluasi ini adalah tersusunnya Laporan Kinerja Anggaran dan Pembangunan Program Percepatan Penurunan *Stunting* melalui Belanja K/L per semester maupun tahunan.

4.2. Konsep Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K/L yang Mendukung Percepatan Penurunan *Stunting*

Dalam menyusun Laporan Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Percepatan Penurunan *Stunting* (PPS), disusun konsep Pemantauan dan Evaluasi yang diperlukan dalam rangkaian mengukur pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan (RPJMN dan Perpres 72/2021). Konsep pemantauan dan evaluasi yang dimaksud adalah:

1. Mengukur **capaian (*output*)** dari intervensi kegiatan;
2. Menilai **kontribusi intervensi** terhadap *outcome* dan *impact*; dan
3. Menilai **pencapaian program** per wilayah (kab/kota);
4. Memberikan **umpan balik** bagi sistem perencanaan.

Sejalan dengan konsep tersebut, dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi yang akan dilakukan membutuhkan komitmen lintas sektor yang kuat dalam pemenuhan kebutuhan data, sehingga rencana pelaporan pemantauan dan evaluasi pencapaian indikator Perpres 72/2021 dapat berjalan sesuai rencana. Berikut beberapa hal penting yang membutuhkan dukungan lintas sektor terkait dengan kebutuhan data:

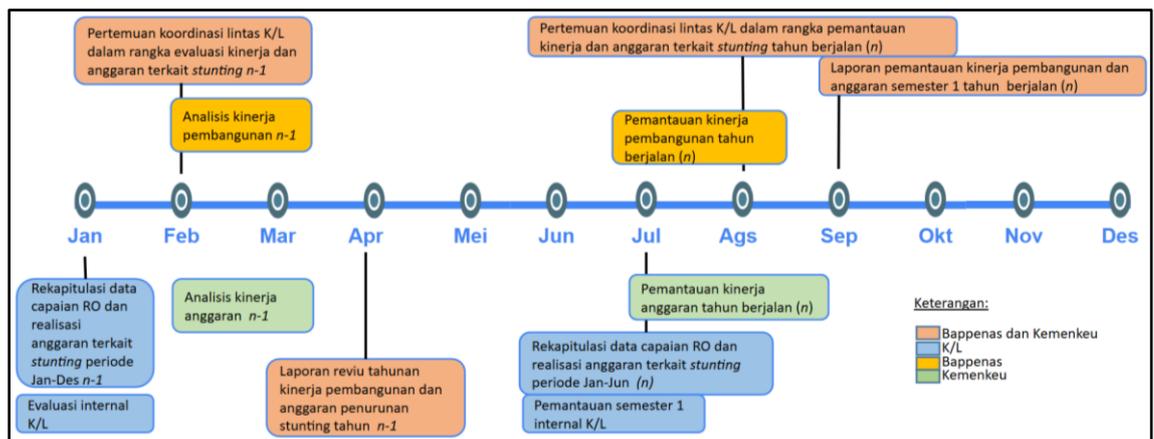
Tabel 4-1. Uraian Kebutuhan Data untuk Pemantauan dan Evaluasi dari Lintas Sektor

Komponen Pemantauan dan Evaluasi <i>Stunting</i>	Uraian Kebutuhan Data
Baseline Data	<ul style="list-style-type: none"> • Survei SSGI 2024 • RPJMN 2025-2029

Indikator	<ul style="list-style-type: none"> Lampiran A (Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif) dan Lampiran B (Indikator Pilar) pada Perpres No.72 Tahun 2021 Capaian kegiatan tematik yang mendukung PPS pada Kementerian/Lembaga
Sumber Data	<ul style="list-style-type: none"> Laporan evaluasi mandiri K/L (data untuk laporan kinerja) sebagai penyesuaian format dengan penambahan detail informasi yang dibutuhkan
Pelaporan yang Sistematis dan Rutin	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Kinerja Anggaran dan Pembangunan (Belanja K/L) Laporan Kunjungan Lapangan (suplementasi data dari laporan penandaan dan laporan kinerja)
Fokus	<ul style="list-style-type: none"> Indikator Perpres No 72 Tahun 2021 Kontribusi intervensi terhadap <i>outcome</i> dan <i>output</i> Praktik baik dan pembelajaran dari strategi implementasi intervensi

Skema pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran terkait pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* digambarkan secara ringkas pada gambar dan tabel berikut:

Gambar 4-1. Alur Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Program Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting



Sumber: Stranas Stunting, 2024

Tabel 4-2. Penjelasan Alur Pemantauan dan Evaluasi

No	Waktu	Kegiatan	Data Pendukung dan Keluaran	Penanggung Jawab
----	-------	----------	-----------------------------	------------------

1	Januari - Februari	<ul style="list-style-type: none"> Rekapitulasi data capaian RO dan realisasi anggaran terkait <i>stunting</i> periode Januari – Desember tahun n-1 Evaluasi internal K/L (<i>Self-Assessment</i>) 	<p>Data Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> Capaian RO_t terkait penurunan <i>stunting</i> tahu n n-1 Realisasi anggaran RO tahun n-1 Hasil kajian/evaluasi internal K/L yang terkait Data survei BPS dan K/L terkait <p>Keluaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> Hasil evaluasi mandiri (<i>self-assessment</i>) K/L terhadap kinerja program dan anggaran terkait penurunan <i>stunting</i> 	K/L terkait
2	Februari	Pertemuan koordinasi lintas K/L dalam rangka evaluasi kinerja dan anggaran terkait <i>stunting</i> tahun n-1	<p>Data Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> Hasil evaluasi mandiri K/L Data capaian dan realisasi anggaran tahun n-1 dari sistem pemantauan dan evaluasi yang ada (SMART, KRISNA, SAKTI, e-Monev) Data survei BPS dan K/L terkait <p>Keluaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> Konfirmasi data capaian dan realisasi anggaran tahun n-1 Masukan dari hasil evaluasi mandiri K/L terhadap kinerja program dan anggaran terkait penurunan <i>stunting</i> 	Forum Koordinasi
3	Februari - Maret	Analisis kinerja pembangunan tahun n-1	<p>Data Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> Hasil penandaan RO tahun n-1 Hasil capaian RO tahun n-1 dari sistem pemantauan dan evaluasi yang ada (SMART, KRISNA, SAKTI, e-Monev) Hasil evaluasi mandiri K/L 	Kementerian PPN/ Bappenas
		Analisis kinerja anggaran tahun n-1	<p>Data Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> Hasil penandaan RO tahun n-1 Hasil realisasi anggaran tahun n-1 dari sistem pemantauan dan evaluasi yang ada (SMART, KRISNA, SAKTI, e-Monev) Hasil evaluasi mandiri K/L <p>Keluaran:</p> <p>Analisis kinerja anggaran penurunan <i>stunting</i> tahun n-1</p>	Kemenkeu

4	April	Laporan revidi tahunan kinerja pembangunan dan anggaran penurunan <i>stunting</i> tahun n-1	<p>Data Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> Analisis kinerja pembangunan terkait penurunan <i>stunting</i> tahun n-1 Analisis kinerja anggaran penurunan <i>stunting</i> tahun n-1 <p>Keluaran:</p> <p>Laporan evaluasi kinerja anggaran dan pembangunan percepatan penurunan <i>stunting</i> bersumber belanja K/L tahun n-1</p>	Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenkeu
5	Juli	<ul style="list-style-type: none"> Rekapitulasi data capaian RO dan realisasi anggaran terkait <i>stunting</i> periode Januari – Juni tahun berjalan (n) Pemantauan Semester 1 internal K/L 	<p>Data Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> Capaian <i>output</i> terkait penurunan <i>stunting</i> tahun berjalan (n) Realisasi anggaran <i>output</i> tahun berjalan (n) <p>Keluaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> Hasil pemantauan internal K/L terhadap perkembangan capaian output dan realisasi anggaran tahun berjalan (n) terkait penurunan <i>stunting</i> 	K/L terkait
6	Juli - Agustus	Pemantauan kinerja pembangunan semester 1 tahun berjalan (n)	<p>Data Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> Hasil penandaan <i>output</i> tahun berjalan (n) Hasil capaian <i>output</i> tahun berjalan (n) dari sistem pemantauan dan evaluasi yang ada (SMART, SPAN, e-Monev) Hasil pemantauan internal K/L <p>Keluaran:</p> <p>Hasil pemantauan kinerja pembangunan semester 1 terkait penurunan <i>stunting</i> tahun berjalan (n)</p>	Kementerian PPN/Bappenas
		Pemantauan kinerja anggaran tahun n-1	<p>Data Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> Hasil penandaan <i>output</i> tahun berjalan (n) Hasil realisasi anggaran <i>output</i> tahun berjalan (n) dari sistem pemantauan dan evaluasi yang ada (SMART, SPAN, e-Monev) Hasil pemantauan internal K/L <p>Keluaran:</p> <p>Hasil pemantauan kinerja anggaran semester 1 terkait penurunan <i>stunting</i> tahun berjalan (n)</p>	Kemenkeu
7	Agustus	Pertemuan koordinasi lintas K/L dalam rangka pemantauan kinerja dan anggaran terkait <i>stunting</i> tahun berjalan (n)	<p>Data Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> Hasil pemantauan semester 1 tahun berjalan (n) internal K/L Data capaian dan realisasi anggaran tahun berjalan (n) dari sistem pemantauan dan evaluasi yang ada (SMART, SPAN, e-Monev) <p>Keluaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> Konfirmasi data capaian dan realisasi anggaran semester 1 tahun berjalan (n) 	Forum Koordinasi

			<ul style="list-style-type: none"> Masukan dari hasil pemantauan internal K/L terhadap kinerja semester 1 program dan anggaran terkait penurunan <i>stunting</i> 	
8	September	Laporan pemantauan kinerja dan anggaran Semester 1 tahun berjalan (n)	<p>Data Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> Hasil pemantauan kinerja pembangunan semester 1 terkait penurunan <i>stunting</i> tahun berjalan (n) Hasil pemantauan kinerja anggaran semester 1 terkait penurunan <i>stunting</i> tahun berjalan (n) <p>Keluaran: Laporan pemantauan kinerja anggaran dan pembangunan percepatan penurunan <i>stunting</i> bersumber belanja K/L Semester 1 tahun berjalan (n)</p>	Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenkeu

4.3. Klasifikasi, Laporan Realisasi Anggaran Tahun Berjalan dan Evaluasi Kinerja

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara adalah dasar hukum utama untuk mengatur sistem klasifikasi anggaran bagi pemerintah pusat. Klasifikasi anggaran yang terperinci ditetapkan berdasarkan PMK No. 102 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Anggaran.

Pada tahun 2010, dikembangkan suatu standar akuntansi akrual penuh (PP Nomor 71 Tahun 2010) yang diselaraskan dan sesuai dengan Standar Akuntansi Sektor Publik Internasional (*International Public-Sector Accounting Standards, IPSAS*) dan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (*Generally Accepted Accounting Principles, GAAP*). Selain itu, Permenkeu Nomor 214/PMK.05/2013 mengatur klasifikasi akuntansi terperinci atau Bagan Akun Standar (*Chart of Accounts, COA*), yang diterapkan secara konsisten di sepanjang siklus anggaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tanpa adanya perbedaan dalam penggunaan kode klasifikasi.

4.4. Sistem Pemantauan Kinerja Pembangunan dan Anggaran

4.4.1. Pemantauan Realisasi Belanja di Tingkat Pemerintah Pusat pada Aplikasi OM-SPAN

Sejak penerapan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) di tahun 2015, Kementerian Keuangan telah dapat menghasilkan laporan realisasi anggaran dalam tahun berjalan secara tepat dengan data yang kredibel.

SPAN memiliki 12 segmen dan 62-digit klasifikasi akuntansi atau Bagan Akun Standar yang diterapkan secara konsisten di sepanjang siklus perumusan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran. Tidak ada perbedaan penggunaan kode klasifikasi struktur dan nomenklatur pada

klasifikasi anggaran dan Bagan Akun Standar. Hal ini memudahkan Pemerintah melakukan pelacakan atas realisasi anggaran dibandingkan dengan alokasi anggaran semula.

4.4.2. Pemantauan Realisasi Belanja di Tingkat Pusat pada Aplikasi SMART dan E-Monev

Untuk mendukung pelaksanaan pemantauan realisasi belanja dan pelaksanaan Evaluasi Kinerja Anggaran Reguler tingkat satker, DJA telah membangun aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART). SMART mencakup data integrasi capaian keluaran (*output*) yang dilaporkan oleh setiap satker dan secara otomatis juga menggunakan data yang ada di OM-SPAN untuk realisasi belanja, sehingga didalam SMART terdapat Informasi realisasi belanja dan pencapaian kinerja (*output*) anggaran dari setiap satker. Untuk menjamin akurasi evaluasi maka dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. DJA akan memastikan data capaian keluaran (*output*) kegiatan terisi oleh satker secara akurat dan tepat waktu, disertai dengan keterangan atau penjelasan sebagai justifikasi mengenai tingkat ketercapaiannya;
2. Satker mengisi analisis dan rekomendasi capaian kinerja satker; dan
3. Satker mengisi target dan realisasi serta keterangan pencapaian indikator keluaran (*output*) kegiatan satker.

Untuk memastikan kualitas data, unit yang menangani masalah evaluasi dan pelaporan pada masing- masing satker melakukan pengecekan dan koreksi data realisasi volume keluaran (RO), kemajuan (%), keterangan, dan memberikan persetujuan apabila data di dalam SMART sudah benar atau membuat koreksi apabila tidak tepat. Satker menyampaikan laporan pencapaian *output* kepada unit Eselon 1/penanggung jawab program/atasan satker melalui aplikasi SMART yang kemudian akan menjadi bahan analisis lebih lanjut oleh unit Eselon 1, K/L, dan Kemenkeu.

Selain SMART, aplikasi pemantauan dan evaluasi berbasis website yang dapat digunakan sebagai sumber data dalam menganalisis kinerja adalah e-Monev yang dibangun oleh Kementerian PPN/Bappenas. Pengembangan sistem e-Monev merupakan upaya untuk mengefektifkan dan mengefisienkan penerapan dari amanat PP Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Data dasaryang digunakan dalam aplikasi e-Monev adalah Renja K/L (KRISNA) dan RKA K/L. Dengan menggunakan aplikasi e-Monev, Kementerian PPN/Bappenas dapat:

1. Melakukan pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan secara triwulanan;
2. Melakukan pengukuran pencapaian kinerja program/kegiatan pelaksanaan rencana pembangunan secara tahunan;
3. Melakukan pemantauan terhadap pencapaian target Prioritas Nasional; dan
4. Memfasilitasi K/L untuk dapat saling berinteraksi dalam menyampaikan permasalahan pelaksanaan Program/Kegiatan; dan
5. Mendukung pelaksanaan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan nasional.

4.4.3 Pemantauan Realisasi Belanja di Tingkat K/L

Pemantauan realisasi belanja di tingkat K/L juga dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi milik K/L seperti misalnya aplikasi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Terpadu (PESAT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, aplikasi Monitoring Laporan Keuangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan (MoLK SIMKeu) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Monitoring Pelaksanaan Anggaran (MPA) Kementerian Agama, Sistem Informasi Monitoring Anggaran (SIMONA), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan lain sebagainya. Pemantauan realisasi belanja tingkat K/L juga dapat dilakukan secara manual dengan menelaah data RKA-K/L.

Langkah yang dapat diambil untuk melakukan pemantauan realisasi belanja di tingkat K/L adalah sebagai berikut:

1. Biro Perencanaan (Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama) K/L mengkoordinir pemantauan realisasi belanja terkait pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* yang sebelumnya telah diidentifikasi dan ditandai berdasarkan Dokumen Ringkasan RO Tematik *Stunting* tahun berjalan;
2. Unit kerja memantau realisasi belanja di level RO, komponen, sub-komponen, bahkan hingga ke level detail. Perhitungan proporsi anggaran sebagaimana dijelaskan pada sub-bab 3.6 di atas dan telah tercantum pada Dokumen Ringkasan RO Tematik *Stunting* tahun berjalan;
3. Hasil pemantauan yang dilakukan oleh unit kerja dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan (Sekretaris Jenderal) K/L, untuk selanjutnya disampaikan dan dibahas di dalam pertemuan koordinasi lintas K/L dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenkeu.

4.5. Kerangka Hukum Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Percepatan Penurunan *Stunting* Kinerja Pembangunan dan Anggaran

Sebagaimana diamanatkan pasal 5, PP Nomor 17 Tahun 2017 maka Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan secara bersama-sama melakukan evaluasi kinerja pembangunan dan kinerja anggaran serta kebijakan tahun berjalan yang terkait dengan program pencegahan dan percepatan penurunan *stunting*. Metodologi evaluasi dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi masing-masing sebagai berikut:

1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional utamanya melakukan evaluasi kinerja pembangunan dan kebijakan tahun berjalan yang akan dilanjutkan; dan
2. Menteri Keuangan utamanya melakukan evaluasi kinerja anggaran dan kebijakan berjalan.

Evaluasi kinerja dapat dilakukan menggunakan aturan yang telah ada diantaranya:

1. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 107/2024 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 62/2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan ; dan
3. Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER-7/AG/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Anggaran.

4.5.1. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2023

Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan untuk memandu K/L dalam melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan dalam kerangka pembangunan nasional yang tersusun dalam dokumen perencanaan melingkupi Renja K/L, RKP, Renstra K/L dan RPJM Nasional(Pasal 2).

Evaluasi dilaksanakan oleh menteri atau pimpinan lembaga terhadap rencana pembangunan meliputi:

1. Rencana pembangunan tahunan:
 - a. Evaluasi saat pelaksanaan Renja K/L;
 - b. Evaluasi pasca pelaksanaan Renja K/L;
 - c. Evaluasi saat pelaksanaan RKP; dan
 - d. Evaluasi pasca pelaksanaan RKP.
2. Rencana pembangunan jangka menengah:
 - a. Evaluasi saat pelaksanaan Renstra K/L;
 - b. Evaluasi akhir Renstra K/L;
 - c. Evaluasi saat pelaksanaan RPJM Nasional; dan
 - d. Evaluasi akhir RPJM Nasional.

Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan untuk menilai kemajuan dan hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan, serta Kinerja program dan Kegiatan dalam satu periode pelaksanaan pembangunan. Evaluasi dilaksanakan secara sistematis melalui proses penentuan indikator Program dan Kegiatan yang akan dipantau dan dievaluasi, penyusunan pertanyaan evaluasi, pengumpulan data, analisis data, pengambilan kesimpulan, serta penyusunan laporan.

Sementara itu, evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan dilaksanakan berdasarkan data dan informasi hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan. Evaluasi dilaksanakan secara sistematis melalui proses pengumpulan data, analisis data, pengambilan kesimpulan, serta penyusunan laporan.

Adapun dalam melaksanakan evaluasi rencana pembangunan dapat dilakukan dengan menggunakan tiga jenis evaluasi, yaitu:

1. Evaluasi pengukuran kinerja, dilakukan untuk melihat capaian kinerja program atau kegiatan melalui perbandingan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan;
2. Evaluasi proses pelaksanaan rencana pembangunan, dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang bersifat deskriptif untuk menjelaskan situasi pelaksanaan program prioritas/kegiatan prioritas. antara lain: 1) deskripsi proses yang terjadi, telaah/review berdasarkan siapa, apa, kapan, dimana, bagaimana, dan berapa; 2) deskripsi latar belakang program prioritas/kegiatan prioritas; serta 3) deskripsi organisasi pelaksana dan pihak yang terkait.
3. Evaluasi kebijakan/program strategis, dilakukan untuk menunjukkan klarifikasi hubungan sebab-akibat kegagalan atau keberhasilan rencana. Evaluasi dilakukan terhadap kebijakan atau program strategis dengan kriteria memiliki anggaran besar, yang berdampak besar terhadap masyarakat, memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian pembangunan nasional.

Pemilihan jenis evaluasi bergantung pada tujuan evaluasi, sehingga dapat digunakan satu jenis atau kombinasi ketiganya secara bersamaan. Adapun untuk mengukur capaian kinerja pada evaluasi pengukuran kinerja, diperlukan kategori kinerja untuk memudahkan penilaian keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan melalui notifikasi capaian kinerja dari masing-masing indikator. Penilaian terhadap capaian program dan kegiatan dengan notifikasi warna dalam hal ini juga berfungsi sebagai early warning pada capaian target program dan kegiatan per triwulan. Dengan demikian, kementerian/lembaga dapat mempercepat pencapaian sasaran dan targetnya.

4.5.2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024

Peraturan ini mengamanatkan agar evaluasi kinerja dilakukan untuk mewujudkan Penganggaran Berbasis Kinerja/PBK (*performance based budgeting*) sebagai suatu pendekatan penganggaran yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas dengan menekankan setiap penggunaan uang negara (anggaran) harus mempunyai nilai manfaat yang terukur bagi peningkatan kehidupan masyarakat (*value for money*). Untuk itu, setiap perencanaan anggaran harus dapat dijelaskan hubungan antara biaya yang dibutuhkan dengan ekspektasi hasil yang akan dicapai dalam pengeluaran Pemerintah, yang mana kegiatan (*activities*) yang dibiayai harus menghasilkan keluaran (*output*), dan pada akhirnya gabungan dari beberapa keluaran kegiatan dalam suatu program akan mendukung pencapaian hasil (*outcome*) yang diinginkan.

Oleh karenanya sistem penganggaran diimplementasikan melalui Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) terdiri dari Program, Kegiatan, dan Keluaran (*output*). Kontrak kinerja masing-masing Kementerian/Lembaga diukur pada tataran keluaran kegiatan. Hal ini bertujuan untuk mengubah pola penganggaran dari berbasis masukan (*input based*) ke berbasis keluaran (*output based*) dan berbasis hasil (*outcome based*).

Hasil evaluasi kinerja akan dijadikan acuan Kemenkeu dalam menyusun RKA-K/L untuk menetapkan Pagu Anggaran K/L. Pagu Anggaran K/L dimaksud menggambarkan arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Presiden yang dirinci menurut unit organisasi dan program. Angka yang tercantum dalam pagu anggaran adalah angka Pagu Indikatif yang disesuaikan dengan perubahan parameter atau adanya *policy measure*. Pagu Anggaran K/L disampaikan kepada setiap Kementerian/Lembaga paling lambat pada akhir bulan Juni.

Ketentuan lebih lanjut sebagai pelaksanaan evaluasi kinerja, telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER-7/AG/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Anggaran.

4.5.3. Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER-7/AG/2021

Evaluasi kinerja ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran yang mencakup:

1. Evaluasi Kinerja Anggaran Reguler yang dilaksanakan pada tingkat satuan kerja/kegiatan, unit eselon 1/program, K/L, dan Menteri Keuangan c.q DJA. Evaluasi ini dilakukan paling sedikit dua kali setahun yaitu pada tahun anggaran berjalan dan pada tahun anggaran sebelumnya. Evaluasi kinerja anggaran reguler ini terdiri dari Evaluasi Kinerja Anggaran atas aspek implementasi, atas aspek manfaat, dan atas aspek konteks. Hasil evaluasi kinerja reguler digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dan sebagai bahan untuk menyusun kebijakan dan prioritas pembangunan; dan
2. Evaluasi Kinerja Anggaran Non-Reguler dilaksanakan oleh Menteri Keuangan c.q DJA. Hasil evaluasi kinerja anggaran non-reguler ini digunakan sebagai salah satu bahan dalam penyusunan kebijakan khususnya terkait dengan penganggaran.

Berdasarkan ketentuan ini diatur lebih lanjut mengenai tahapan, format, dan pelaporannya di masing-masing level yang melaksanakan evaluasi kinerja anggaran, meliputi:

1. Level Satker,
2. Level Eselon-1 / Program,
3. Level Kementerian Negara/Lembaga, dan
4. Level Nasional yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran.

4.5.4. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang penyusunan Spending Review

Spending reviu dilaksanakan pada tingkat wilayah oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan di tingkat pusat oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran. Pengukuran belanja pemerintah dilaksanakan melalui reviu belanja pemerintah (*spending* reviu) untuk meningkatkan kualitas belanja APBN dari segi *value for money*, yang meliputi efektivitas, efisiensi, dan ekonomis. *Spending* reviu memanfaatkan data keluaran/*output* Tahun Anggaran (TA) sebelumnya dan penelaahan atas RKA-K/L tahun berjalan. Laporan *Spending* reviu wilayah disampaikan paling lambat 13 Februari dan tingkat nasional pada akhir Februari.

Berdasarkan jenisnya, *spending* reviu meliputi:

1. **Reviu Alokasi**; yaitu reviu belanja pemerintah atas pengalokasian anggaran yang dilaksanakan dengan menelusuri komponen-komponen RKA-K/L Satker pada K/L. Reviu ini bertujuan untuk: a) mengidentifikasi inefisiensi belanja pemerintah dalam rangka memperluas potensi ruang fiskal; b) mengidentifikasi program/kegiatan yang hanya perlu dilakukan satu kali tetapi berpotensi untuk diulang/dilanjutkan pada TA berikutnya; c)

inefisiensi belanja pemerintah terdiri dari ketidakwajaran, duplikasi, dan dana cadangan yang tidak dikhususkan peruntukannya; dan d) *einmalig* meliputi kumpulan program/kegiatan yang berdasar sifat atau tujuannya hanya perlu dilakukan satu kali dan tidak perlu diulang/dilanjutkan;

2. **Reviu Efisiensi;** yaitu reviu atas efisiensi kinerja unit-unit pemerintah dalam penggunaan belanjanya. Reviu ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi kinerja unit pemerintah dan mengukur inefisiensinya. Reviu dilakukan melalui dua metode yaitu analisa deviasi kebutuhan dengan menentukan rata-rata optimal kebutuhan dan belanja setiap termin (bulanan) dan/atau *benchmarking* dengan mengelompokkan unit-unit pemerintah dengan karakteristik yang sama untuk dibandingkan dengan prinsip *data envelopment analysis* (DEA).

4.5.5. Evaluasi oleh masing-masing K/L

Setiap K/L dapat melakukan evaluasi mandiri (*self-assessment*) kinerja pembangunan dan anggaran untuk percepatan pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* secara internal. Beberapa hal yang perlu identifikasi oleh K/L, antara lain:

1. Apa saja program/kegiatan K/L yang terkait dengan upaya pencegahan dan percepatan penurunan *stunting*? Dimana anggaran tersebut berada (RO/komponen/sub- komponen/detail)?;
2. Program/kegiatan apa saja yang termasuk ke dalam prioritas implementasi Stranas *Stunting* (intervensi prioritas, lokasi prioritas, dan sasaran prioritas)?;
3. Berapa banyak belanja pemerintah yang digunakan untuk program/kegiatan prioritas dan non- prioritas Stranas *Stunting*?;
4. Bagaimana efektivitas dan efisiensi belanja pemerintah untuk pencegahan dan percepatan penurunan *stunting*?; dan
5. Apa rekomendasi tindak lanjut yang perlu diambil untuk meningkatkan kinerja pembangunan dan belanja pemerintah untuk pencegahan dan percepatan penurunan *stunting*?

Untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran, K/L dapat menggunakan format alat bantu berikut:

Tabel 4-3. Contoh Format Evaluasi Mandiri (Self-Assessment) Kinerja Pembangunan dan Anggaran Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting

Program/RO		Kode dan Nama				Anggaran (Ribu Rupiah)		Lokasi (Kab/Kota)		Evaluasi Efisiensi dan Efektivitas	Rekomendasi
Kode	Nama	Komponen	Sub Komponen	Detail	Prioritas (Y/T)	Alokasi	Realisasi	Rencana	Aktual		

4.5.6. Form Evaluasi Mandiri

Untuk memperkuat penyusunan analisis pada laporan pemantauan dan evaluasi RO tematik *stunting*, Kemenkeu bersama Bappenas menyiapkan format pengisian form evaluasi mandiri kepada K/L terkait. Form ini diisi oleh K/L dan disampaikan paling lambat pada bulan Agustus untuk laporan kinerja semester 1 tahun berjalan dan pada bulan Februari tahun berikutnya untuk laporan kinerja tahunan.

Kemenkeu menyampaikan kebutuhan data dimaksud dengan surat dari Dirjen Anggaran kepada sekretaris jenderal/sekretaris utama K/L sebagaimana gambar di bawah:

Gambar 4-2. Contoh Surat Permintaan Pengisian Data Form Evaluasi Mandiri K/L untuk Penyusunan Laporan Kinerja Pembangunan dan Anggaran Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting



Form Evaluasi Mandiri terdiri atas tiga bagian yaitu

1. Bagian pertama tentang kemajuan kinerja anggaran dan pembangunan berupa isian terkait:
 - a. Realisasi anggaran berdasarkan pagu awal dan revisi; dan
 - b. Capaian output berdasarkan rencana target dan sasaran;
2. Bagian kedua tentang aspek konvergensi pelaksanaan RO intervensi penurunan *stunting*:
 - a. Keterkaitan dengan indikator pada Perpres 72/2021;
 - b. Kesesuaian lokasi pelaksanaan pada kab/kota di provinsi prioritas;
 - c. Sasaran prioritas, penting dan lainnya; dan
 - d. Koordinasi dengan pihak berkepentingan.
3. Bagian ketiga tentang analisis kinerja dalam hal:

- a. Uraian detail pelaksanaan kegiatan serta sistem pemantauan dan evaluasi;
- b. Analisis capaian kinerja terhadap target pada aspek anggaran dan output;
- c. Dampak kebijakan *Automatic Adjustment* serta pelaksanaannya (bila ada);
- d. Reviu kendala dan keberhasilan;
- e. Pelaksanaan konvergensi lintas program; dan
- f. Rekomendasi perbaikan

Hasil pengisian form evaluasi mandiri kemudian diolah dan dianalisis yang kemudian hasilnya dituangkan dalam Laporan Pemantauan Kinerja Anggaran dan Pembangunan Program Percepatan Penurunan *Stunting* Semester 1 dan Laporan Evaluasi Kinerja Anggaran dan Pembangunan Program Percepatan Penurunan *Stunting* Tahunan. Contoh pengisian form evaluasi dapat dilihat pada lampiran.

4.6. Metode Analisis Laporan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Anggaran dan Pembangunan Program Percepatan Penurunan *Stunting*

Tabel 14 pada sub-bab 4.2 di atas telah mengidentifikasi kebutuhan data yang dibutuhkan sebagai bahan analisis penyusunan laporan kinerja anggaran. Antara lain:

1. Dokumen ringkasan RO Tahun anggaran berjalan yang menggambarkan;
 - a. Perkembangan penandaan RO oleh K/L;
 - b. Keberlanjutan RO tahun sebelumnya pada tahun anggaran berjalan; dan
 - c. Pagu anggaran dan alokasi level analisis lanjutan.
2. Data realisasi anggaran bersumber dari KRISNA dan SAKTI; dan
3. Form Evaluasi Mandiri K/L

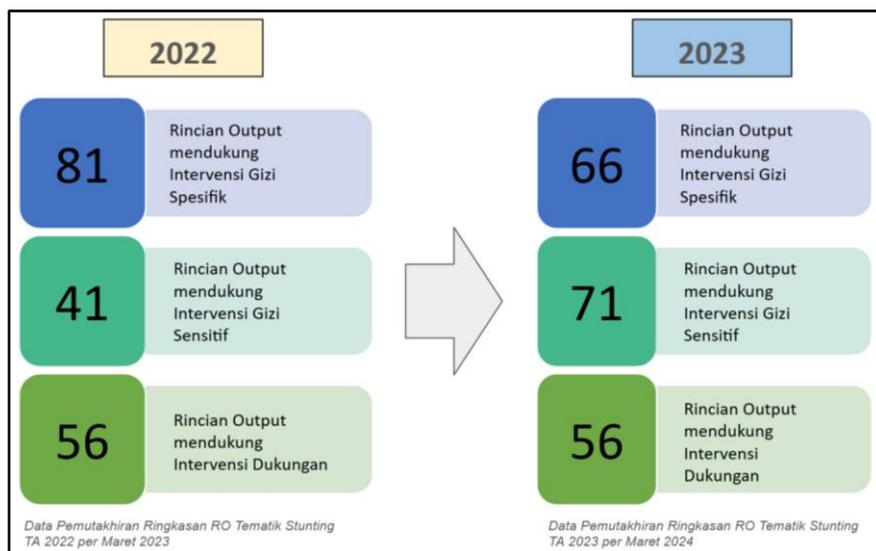
Berdasarkan data yang telah terisi tersebut kemudian dilakukan penyusunan analisis kinerja anggaran dan pembangunan dengan pendekatan sebagai berikut:

4.6.1. Analisis Perkembangan Penandaan RO

Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan jumlah RO yang sudah dan belum ditandai oleh K/L serta kedisiplinan dalam melakukan penandaan. Data ini diperoleh dari Dokumen Ringkasan RO Tematik *stunting* tahun berjalan dan hasil pertemuan konfirmasi K/L berdasarkan siklus pada Bab II.

Hasil yang didapatkan dari analisis ini adalah a) Jumlah RO yang telah ditandai tematik *stunting* serta merekomendasikan penandaan pada RO yang belum ditandai; b) Perubahan jumlah penandaan RO tematik *stunting* pada anggaran tahun berjalan di bulan Maret, Agustus dan Maret tahun berikutnya (n+1); dan c) Identifikasi keberlanjutan RO dari tahun sebelumnya pada tahun anggaran berjalan dilengkapi dengan informasi kenapa RO tersebut tidak berlanjut. Sebagaimana dua grafis di bawah ini menggambarkan perbandingan jumlah RO tahun 2022-2023 dan perkembangan penandaan RO tahun 2023.

Gambar 4-3. Perbandingan Jumlah RO Tematik Stunting TA 2022-2023



Sumber: Laporan Evaluasi Kinerja K/L tahun 2022 dan 2023, Bappenas

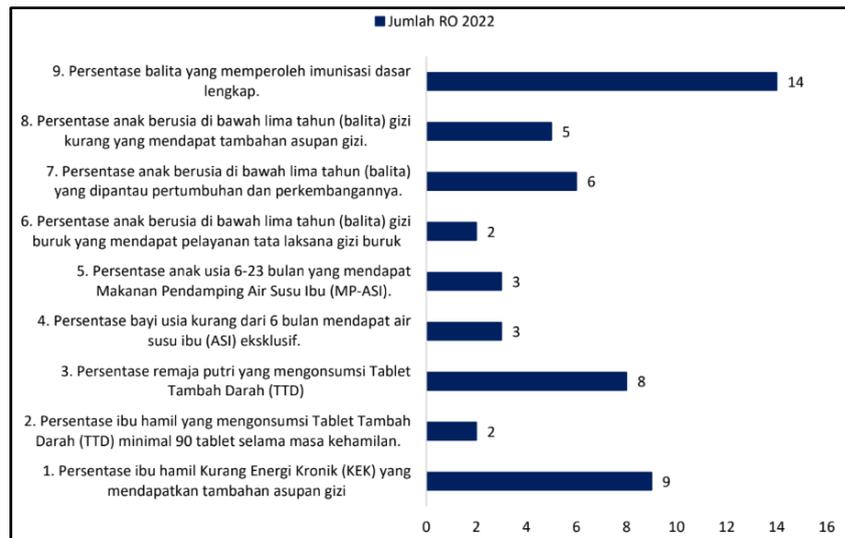
Gambar 4-4. Perkembangan Penandaan RO Tematik Stunting TA 2023

No	K/L	Perkembangan RO Yang Mendukung Program Percepatan Penurunan Stunting TA 2022 s/d Semester I-2023													
		Jumlah RO Ter-tagging menurut Intervensi Per/Desember 2022			Total	Jumlah RO teridentifikasi untuk dilakukan tagging menurut Intervensi Dokumen Ringkasan Maret 2023			Total	Status RO Ter-Tagging Per/Maret 2023		Status RO Ter-Tagging Menurut Intervensi Pada Semester I-2023 (Form Evaluasi Mandiri K/L Per/September 2023)			Total
		Spesifik	Sensitif	Dukungan		Spesifik	Sensitif	Dukungan		Sudah Tagging	Belum Tagging	Spesifik	Sensitif	Dukungan	
		(n)	(n)	(n)	(n)	(n)	(n)	(n)	(n)	(n)	(n)	(n)	(n)	(n)	
1	007 KEMENSETNEG	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1
2	010 KEMENDAGRI	0	0	4	4	0	0	4	4	3	1	0	0	4	4
3	018 KEMENTAN	0	1	1	2	0	3	0	3	2	1	0	3	0	3
4	023 KEMENDIKBUD	0	2	7	9	0	6	0	6	3	3	0	6	0	6
5	024 KEMENKES	81	13	7	101	64	27	10	101	86	15	64*	27*	10*	101
6	025 KEMENAG	0	5	0	5	0	5	0	5	2	3	0	5	0	5
7	027 KEMENSOS	0	3	1	4	0	3	0	3	2	1	0	4**	0	4
8	032 KEMEN KP	0	2	0	2	0	3	0	3	3	0	0	3	0	3
9	033 KEMEN PUJPR	0	2	0	2	0	2	0	2	2	0	0	2	0	2
10	036 KEMENKO PMK	0	0	1	1	0	0	2	2	2	0	0	0	2	2
11	047 KEMEN PPPA	0	0	6	6	0	1	6	7	7	0	0	1	6	7
12	055 KEMENPPN/BAPPENAS	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1
13	059 KEMENKOMINFO	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1
14	063 BPOM	0	5	0	5	0	0	4	4	4	0	0	4	0	4
15	067 KEMEN DES PDPT	0	0	3	3	0	0	2	2	2	0	0	0	2	2
16	068 BKKBN	0	6	22	28	0	14	27***	41	40	1	0	14	28***	42
17	111 BNPP	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1
18	125 BAPANAS	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
Jumlah		81	39	56	176	64	66	59	189	162	27	64	71	56	191

Sumber: Laporan Evaluasi Kinerja K/L tahun 2023, Bappenas

Selain itu, sejak penyusunan laporan kinerja K/L tahun 2022, analisis penandaan RO bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah dan perkembangan RO yang memiliki keterkaitan langsung terhadap indikator Perpres 72/2021. Hal ini untuk menggambarkan apakah RO tersebut masih relevan ditandai *stunting* selama dinilai berkontribusi terhadap indikator spesifik, sensitif dan pilar pada Perpres 72/2021. Berikut gambaran hasil identifikasi RO tahun anggaran 2022.

Gambar 4-5. Keterkaitan RO Tematik Stunting TA 2022 dengan Perpres 72/2021



Sumber: Laporan Evaluasi Kinerja K/L tahun 2022, Bappenas

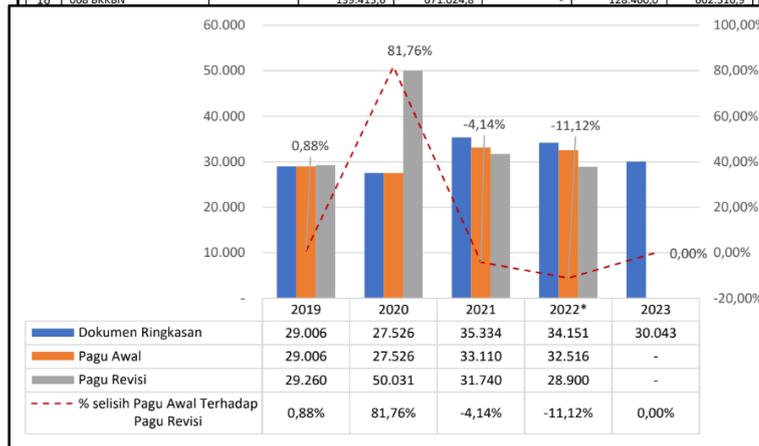
4.6.2. Analisis Perkembangan Pagu

Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan pagu anggaran baik dalam hal: a) pagu awal pada dokumen Renja K/L ke pagu revisi dokumen RKA K/L dan hasil analisis lanjutannya; dan b) perbandingan pagu anggaran tahun sebelumnya dengan tahun berjalan. Hasil dari analisis diharapkan dapat menggambarkan naik atau turunnya anggaran berdasarkan K/L dan jenis intervensi untuk mengidentifikasi dukungan K/L terhadap program prioritas sesuai RPJMN. Selain itu antisipasi perlu dilakukan apabila alokasi anggaran menurun sehingga dapat berdampak pada rendahnya dukungan program terhadap target penurunan prevalensi *stunting*.

Berikut contoh analisis perkembangan pagu anggaran RO tematik *stunting* pada tahun anggaran 2022.

Gambar 4-6. Contoh Analisis Perkembangan Pagu Anggaran RO Tematik *Stunting* TA 2022

No	K/L	Pagu Level Analisis Lanjutan (dalam juta rupiah)					
		Pagu Awal			Pagu Revisi		
		Intervensi Spesifik	Intervensi Sensitif	Intervensi Dukungan	Intervensi Spesifik	Intervensi Sensitif	Intervensi Dukungan
1	007 KEMENSETNEG			25.299,4	-	-	25.299,4
2	010 KEMENDAGRI			24.960,3	-	-	29.805,1
3	018 KEMENTAN		157.000,0	100,0	-	147.903,4	50,0
4	023 KEMENDIKBUD RISTEK		13.482,4	10.516,1	-	11.639,5	15.266,6
5	024 KEMENKES	3.087.700,6	4.021.976,6	204.747,7	2.936.006,1	3.777.944,2	192.184,3
6	025 KEMENAG		36.195,1			34.654,4	-
7	027 KEMENSOS		23.213.814,3	48.600,0	-	20.057.964,3	8.129,4
8	032 KEMEN KP		25.500,0		-	27.103,5	-
9	033 KEMEN PUPR		677.600,0			684.600,0	-
10	036 KEMENKO PMK			1.250,0	-	-	1.090,0
11	047 KEMEN PP & PA			2.690,0	-	-	2.158,0
12	055 KEMENPPN/ BAPPENAS			700,0	-	-	12.508,9
13	059 KEMENKOMINFO			15.705,1	-	-	14.928,0
14	063 BPOM		132.548,7			125.314,6	-
15	067 KEMEN DES PDTT			5.000,0	-	-	11.411,0
16	068 BKKBN		139.415,6	671.024,8	-	128.460,0	662.516,9



Sumber: Laporan Evaluasi Kinerja K/L tahun 2022, Bappenas

4.6.3. Analisis Kinerja Anggaran

Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui kemajuan realisasi anggaran pada tahun anggaran berjalan dalam hal a) memantau perkembangan di semester 1 untuk mengantisipasi kendala dan tantangan serta percepatan realisasi; b) mengidentifikasi kendala dan hambatan realisasi serta kaitannya dengan capaian target dan sasaran; c) mengevaluasi realisasi anggaran serta kontribusinya terhadap percepatan penurunan *stunting* berdasarkan wilayah maupun nasional. Sebagai catatan bahwa kinerja anggaran dihitung pada level analisis lanjutan atau pembobotan anggaran pada level analisis lanjutan.

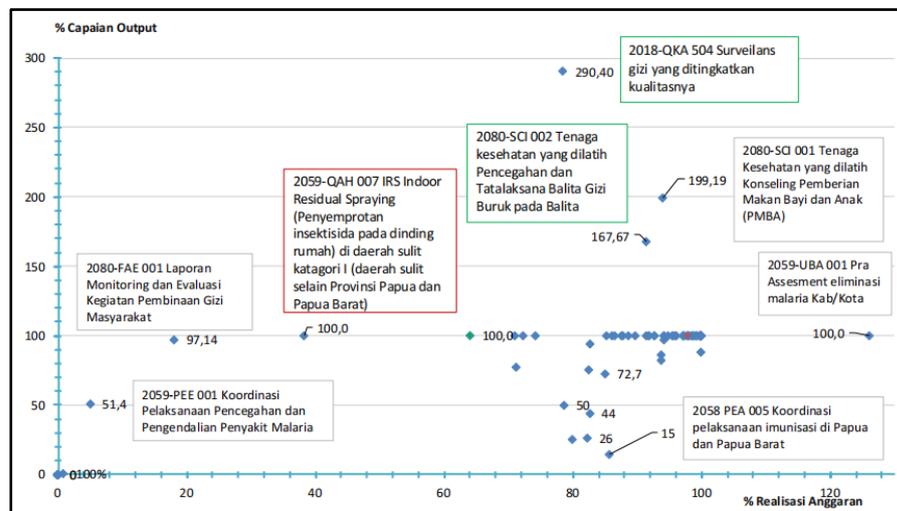
Berikut contoh analisis kinerja anggaran RO tematik *stunting* pada tahun anggaran 2022.

Gambar 4-7. Contoh Analisis Realisasi Anggaran Tematik Stunting TA 2022 di level Analisis Lanjutan berdasarkan Jenis Intervensi

No	Rekap menurut jenis intervensi	Realisasi Anggaran Menurut Jenis Intervensi Pada Level Analisis Lanjutan				
		Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi	% Realisasi terhadap Pagu Awal	% Realisasi terhadap Pagu Revisi
1	Spesifik	3.445.505,1	1.865.873,4	1.822.098,6	52,88	97,65
2	Sensitif	29.208.906,6	29.555.689,4	28.511.210,8	97,61	96,47
3	Dukungan	455.956,9	318.272,7	298.593,0	65,49	93,82
Total		33.110.368,7	31.739.835,5	30.631.902,4	92,51	96,51

Sumber: Laporan Evaluasi Kinerja K/L tahun 2022, Bappenas

Gambar 4-8. Contoh Analisis Keterkaitan Realisasi Anggaran RO Tematik Stunting terhadap Capaian Output TA 2022



Sumber: Laporan Evaluasi Kinerja K/L tahun 2022, Bappenas

4.6.4. Analisis Kinerja Pembangunan

Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui kemajuan capaian output RO berdasarkan target dan sasaran untuk a) memantau capaian target dan sasaran di semester 1 untuk mengantisipasi kendala dan tantangan serta percepatan pelaksanaan; b) mengidentifikasi kendala dan hambatan capaian serta kaitannya dengan anggaran; c) mengevaluasi capaian output serta kontribusinya terhadap percepatan penurunan *stunting* berdasarkan wilayah maupun nasional di akhir tahun. Sebagai catatan bahwa satuan target dan sasaran setiap RO dapat berbeda satu dengan lainnya. Analisis ini sendiri terbagi dalam beberapa pendekatan yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

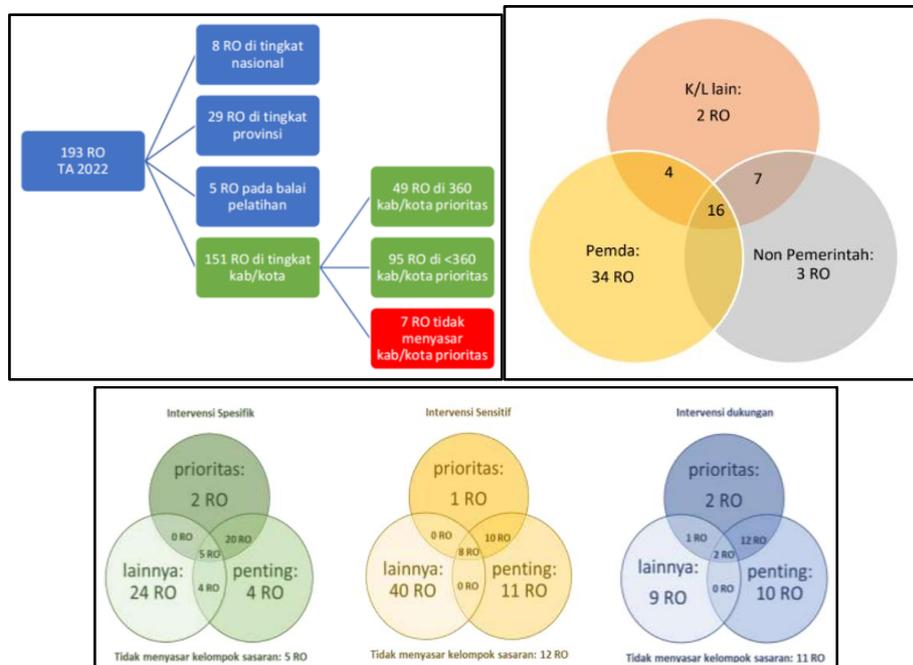
4.6.4.1. Pelaksanaan Konvergensi

Konvergensi adalah upaya pencegahan stunting yang dilakukan secara terpadu, terkoordinir, dan bersama-sama yang dilakukan mulai dari tingkat pusat hingga daerah dan desa. Terdapat tiga analisis konvergensi yaitu:

1. Konvergensi lokasi yang memetakan RO dilakukan pada lokasi prioritas⁵;
2. Konvergensi sasaran yang memetakan RO berdasarkan sasaran prioritas (1000 HPK), sasaran penting (keluarga dengan baduta/balita, catin, WUS dan rematri) dan sasaran lainnya (masyarakat umum, nakes, guru, pengambil kebijakan, pengelola program dan lainnya); dan
3. Konvergensi koordinasi yang melibatkan K/L, pemda, dan non pemerintah.

Analisis ini menghasilkan daftar RO yang dianggap strategis karena dilakukan dengan memenuhi salah satu maupun ketiga aspek konvergensi di atas. Berikut contoh analisis pelaksanaan konvergensi.

Gambar 4-9. Contoh Analisis Pelaksanaan Konvergensi RO Tematik Stunting terhadap Capaian Output TA 2022



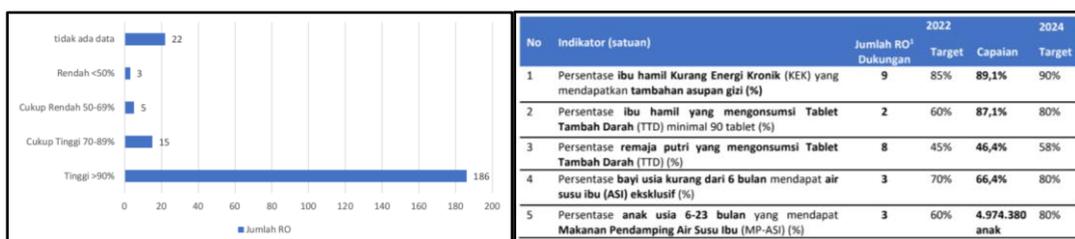
Sumber: Laporan Evaluasi Kinerja K/L tahun 2022, Bappenas

⁵ Lokasi prioritas 2018-2020 menurut Stranas *Stunting* ditetapkan bertahap yaitu 100 kab/kota di 2018, 160 kab/kota di 2019 dan seluruh kab/kota di 2020, kemudian Lokasi Prioritas 2021-2024 menjadi kabupaten/kota di 12 provinsi prioritas yaitu Aceh, Sumut, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Kalbar, Kalsel, Sulbar, Sultra, NTB dan NTT

4.6.4.2. Kinerja Capaian Output

Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui kemajuan capaian target dan sasaran pada tahun anggaran berjalan dalam hal a) memantau capaian di semester 1 untuk mengantisipasi kendala dan tantangan serta percepatan upaya mencapai target; b) mengidentifikasi kendala dan hambatan upaya pencapaian target dan sasaran realisasi serta kaitannya dengan realisasi anggaran; c) mengevaluasi capaian target dan sasaran serta kontribusinya terhadap percepatan penurunan *stunting* berdasarkan wilayah maupun nasional. Sebagai catatan bahwa satuan capaian output dapat berbeda antar RO berdasarkan desain programnya.

Gambar 4-10. Contoh Analisis Capaian Output RO Tematik Stunting TA 2022



Sumber: Laporan Evaluasi Kinerja K/L tahun 2022, Bappenas

4.6.5. Kinerja Program di Lokasi Prioritas

Pendekatan lainnya adalah melakukan kunjungan lapangan pada lokasi prioritas dalam rangka memantau dan mengevaluasi pelaksanaan RO. Pada kegiatan ini dilakukan pengumpulan data baik primer maupun sekunder untuk mengetahui efektivitas dan efisien program di lapangan serta dampaknya terhadap penerima manfaat. Analisis yang dihasilkan adalah analisis deskriptif berdasarkan temuan di lapangan dan masukan dari para narasumber lapangan dan justifikasi peserta pelaksana kunjungan lapangan. Sebagai contoh adalah dilakukan kunjungan lapangan di lokasi prioritas seperti pada gambar di bawah ini.

Tabel 4-4. Contoh Daftar Pelaksanaan RO Tematik Stunting di Lokasi Prioritas TA 2022

No	Rincian Output	K/L	Jenis Intervensi	Kabupaten/Kota
1	Balita kurus yang mendapat PMT berbasis pangan lokal	Kemendes	Spesifik	Kab. Kupang
2	Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) yang mendapat PMT berbasis pangan lokal	Kemendes	Spesifik	Kab. Kupang
3	Keluarga yang mendapat Bantuan Sosial Bersyarat	Kemensos	Sensitif	Kab. Kupang
4	KPM yang memperoleh Bantuan Sosial Pangan Sembako	Kemensos	Sensitif	Kab. Kupang
5	Keluarga dengan Baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HPK	BKKBN	Sensitif	Kab. Lima Puluh Kota
6	Pemberdayaan Kampung KB dalam rangka penurunan <i>stunting</i>	BKKBN	Sensitif	Kab. Lima Puluh Kota dan Kab. Kupang
7	Pelaksanaan layanan Audit <i>Stunting</i> , Manajemen Kasus <i>Stunting</i> Kab/Kota, dan koordinasi intensifikasi pelayanan KB di Faskes	BKKBN	Dukungan	Kab. Lima Puluh Kota

Sumber: Laporan Evaluasi Kinerja K/L tahun 2022, Bappenas

Sebagian besar penyelenggaraan intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Adapun peran pemerintah pusat lebih pada pengembangan dan penyediaan panduan program, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah (termasuk membangun dan memelihara sistem informasi) dan memastikan kualitas penyelenggaraan program, dan penyediaan pengembangan kapasitas bagi staf pemerintah daerah untuk menjamin bahwa mereka melaksanakan program dengan tepat. K/L memiliki peran penting dalam melakukan supervisi penggunaan anggaran transfer kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan intervensi seperti DAK fisik, DAK non fisik, dan hibah. Meskipun tidak sering, pemerintah pusat juga berkontribusi pada elemen program yang langsung terkait dengan penyampaian layanan seperti pengadaan vaksin dan suplemen vitamin A. Oleh karenanya kegiatan kunjungan lapangan untuk memastikan kualitas penyelenggaraan program dari RO K/L, terutama yang bersifat tidak langsung, konvergen dengan layanan di tingkat kabupaten/kota hingga desa. Kegiatan-kegiatan tersebut didanai oleh berbagai unit K/L yang tidak langsung terkait dengan penyampaian layanan. Seperti unit K/L pada bidang perencanaan dan penganggaran di kantor Sekretaris Jenderal K/L, badan penelitian dan pengembangan, pusat data dan informasi, atau lembaga-lembaga pelatihan, di pusat atau daerah. Kegiatan-kegiatan ini selanjutnya disebut sebagai intervensi dukungan.

Hasil dari kegiatan kunjungan lapangan adalah temuan dan rekomendasi yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai masukan untuk perbaikan perencanaan dan penganggaran kinerja RO terkait. Gambar berikut menggambarkan pelaksanaan kunjungan lapangan di Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat memantau dan mengevaluasi pelaksanaan RO 3331 QAH 001- Pelaksanaan layanan Audit Stunting, Manajemen Kasus Stunting Kab/Kota, dan koordinasi Intensifikasi pelayanan KB di faskes tahun 2022.

Gambar 4-11. Contoh Kunjungan Lapangan RO Tematik Stunting di Kabupaten Lima Puluh Kota TA 2022



Sumber: Laporan Evaluasi Kinerja K/L tahun 2022, Bappenas

4.6.6. Metode Analisis Lainnya

Pemanfaatan metode analisis kinerja pembangunan dan anggaran yang digunakan tidak terbatas dengan pendekatan di atas. Tidak tertutup kemungkinan analisis kinerja dan anggaran menggunakan metode lain yang dinilai tepat dan efektif dalam melaksanakan analisis kinerja pembangunan dan anggaran pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Alternatif metode analisis selanjutnya dapat dikembangkan dan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana berdasarkan Perpres 72/2021 dan melibatkan K/L terkait.

BAB V PENYUSUNAN LAPORAN DAN DISEMINASI INFORMASI

5.1. Penyusunan Pelaporan

5.1.1. Pelaporan Evaluasi Kinerja Belanja K/L yang Mendukung Pelaksanaan PPPS

Kementerian PPN/Bappenas, Kemenkeu, dan K/L menyusun pelaporan kinerja pembangunan dan anggaran pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* yang terdiri dari laporan pemantauan pelaksanaan RO pada Semester I dan laporan evaluasi kinerja Semester II (tahunan). Hal ini sejalan dengan tujuan dari penyusunan laporan pemantauan dan evaluasi kinerja ini dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan program dan merumuskan rekomendasi perbaikan pada pelaksanaan program untuk tahun mendatang. Selain itu, Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi seluruh pihak yang berkepentingan untuk mengetahui secara jelas dan transparan atas kinerja pelaksanaan program dan kinerja anggaran RO-RO yang dilakukan pemantauan dan evaluasi.

Laporan yang disusun hasil dari pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perencanaan dan penganggaran pelaksanaan program pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* adalah:

1. **Laporan Pemantauan Kinerja dan Anggaran Semester I**, mencakup setidaknya informasi tentang:
 - a. Perkembangan capaian keluaran RO *stunting* yang sudah ditandai;
 - b. Realisasi belanja terkait *stunting* terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD);
 - c. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan; dan
 - d. Lain-lain terkait kualitas pencapaian kinerja anggaran.

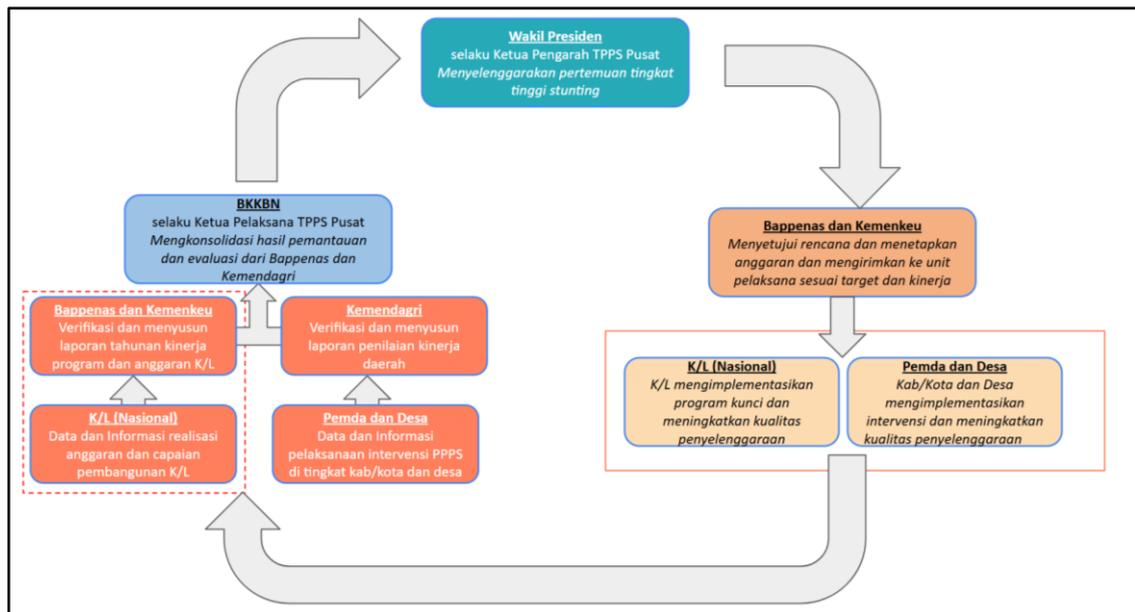
2. **Laporan Evaluasi Kinerja Tahunan (Semester II)**, mencakup setidaknya informasi tentang:
 - a. **Analisis perkembangan penandaan (*tagging*) dan perkembangan pagu.** Analisis perkembangan penandaan (*tagging*) menilai tingkat kepatuhan K/L melakukan *tagging* tematik *stunting* atas rincian *output* yang telah diidentifikasi mendukung penurunan *stunting* oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan serta K/L terkait. *Tagging* rincian *output* dilakukan pada sistem perencanaan (KRISNA) dan kemudian dilakukan pengiriman data ke database sistem penganggaran RKA K/L (SAKTI). Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah proses pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan meningkatkan akurasi atas analisis yang dilakukan. Pemantauan terhadap perkembangan pagu dan realisasi anggaran dapat dilakukan secara harian sehingga dapat dijadikan *feedback* bermanfaat bagi proses perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya. Sementara itu, analisis perkembangan pagu bertujuan untuk memastikan konsistensi K/L dalam menjaga komitmen alokasi anggaran atas

- rincian *output* yang mendukung percepatan penurunan *stunting* dalam pelaksanaan anggaran;
- b. **Analisis kinerja anggaran**, meliputi analisis atas realisasi anggaran dan capaian rincian *output* atas intervensi yang dilaksanakan K/L yang mendukung percepatan penurunan *stunting*. Dalam bagian analisis kinerja anggaran juga akan membahas kinerja anggaran tahun berjalan dibandingkan tahun sebelumnya (N-1) dengan melihat konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, penyerapan anggaran, Efisiensi, khususnya terkait dengan realisasi anggaran, dianalisis baik pada level rincian output (RO) maupun level analisis lanjutan; dan
 - c. **Analisis di level lanjutan** diperlukan untuk meningkatkan akurasi dari analisis yang dilakukan, karena analisis pada level RO berpotensi *overestimate* mengingat alokasi di tingkat RO tersebut ada kalanya tidak seluruhnya dimanfaatkan untuk penurunan *stunting*, namun juga digunakan untuk mendukung program/kegiatan K/L lainnya. Level analisis lanjutan dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu dengan menggunakan asumsi bobot kontribusi kegiatan/anggaran dan dengan memetakan informasi detail di bawah level rincian *output* (komponen/sub-komponen/detail anggaran) yang mendukung penurunan *stunting* sebagaimana terdapat dalam Dokumen Ringkasan RO K/L tahun evaluasi yang mendukung percepatan penurunan *stunting*. Secara rinci, data anggaran berdasarkan pendekatan dimaksud sebagai berikut:
 - i. Pada RO yang menggunakan asumsi bobot kontribusi kegiatan/anggaran, data pagu revisi dan realisasi anggaran menggunakan data SAKTI yang kemudian dikalikan dengan bobot kontribusinya dengan mengacu kepada Dokumen Ringkasan RO yang Mendukung Percepatan Penurunan *Stunting* melalui Belanja K/L tahun berjalan, dan
 - ii. Pada RO yang berasal dari proses pemetaan RO (komponen/sub-komponen/detail anggaran), maka data pagu revisi dan realisasi anggaran menggunakan data yang bersumber dari evaluasi mandiri K/L. Hal ini mempertimbangkan ketersediaan data realisasi anggaran dalam SAKTI masih terbatas sampai dengan level RO. Namun, jika data level RO tidak tersedia, maka digunakan pendekatan pertama.
 - d. **Analisis kinerja pembangunan**, meliputi analisis atas kinerja konvergensi dan kinerja intervensi atas rincian *output* yang mendukung penurunan *stunting*. Kinerja konvergensi atas rincian *output* K/L yang mendukung percepatan penurunan *stunting* dinilai dari tiga aspek, yaitu kesesuaian lokasi intervensi dengan lokus prioritas *stunting*, kesesuaian sasaran penerima manfaat dengan sasaran prioritas program *stunting*, dan pelaksanaan koordinasi dengan berbagai *stakeholder*. Dalam bagian ini juga akan menganalisis perkembangan capaian output dan kinerja pembangunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya; dan
 - e. **Analisis kinerja intervensi K/L di lokasi prioritas**, meliputi kinerja implementasi yaitu kesesuaian implementasi dengan pedoman, cakupan sasaran, ketepatan

sasaran, kendala implementasi dan pembelajaran atas implementasi pada RO pilihan yang dilaksanakan di kabupaten/kota lokus prioritas.

Laporan revidi kinerja anggaran dan pembangunan yang telah disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenkeu tersebut disampaikan kepada BKKBN untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana amanat Perpres 72/2021⁶. Untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas program, implementasi program Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting mengikuti siklus sebagai berikut:

Gambar 5-1. Siklus Kinerja dan Akuntabilitas Pemantauan dan Evaluasi



Sumber: Bappenas, 2024

Jadwal terkait dengan pelaporan anggaran dan kinerja pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* adalah sebagai berikut:

Tabel 5-1. Proses Pelaporan Penerapan Penandaan, Pemantauan, dan Evaluasi Kinerja Pembangunan dan Anggaran Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting

Pelaporan Penerapan Penandaan, Pemantauan, dan Evaluasi Kinerja Pembangunan dan Anggaran	
Jadwal	Kegiatan
Januari s/d Februari	K/L menyampaikan ringkasan hasil penandaan tahun berjalan (tahun n) dan rekapitulasi data capaian <i>output</i> dan realisasi anggaran terkait <i>stunting</i> periode Januari-Desember tahun n-1 kepada Tim Kerja Forum Koordinasi.

⁶ Penyampaian laporan revidi kinerja anggaran dan pembangunan tahun 2025 menyesuaikan dengan revisi Perpres 72/2021 pada struktur Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat pusat yang saat ini masih disusun

April	Tim Kerja Forum Koordinasi dan/atau TPPS Pusat yang membidangi proses Perencanaan dan Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi (Bappenas dan Kemenkeu) menyusun laporan reuiu tahunan kinerja pembangunan dan anggaran penurunan <i>stunting</i> tahun n-1 yang terdiri atas analisis kinerja pembangunan, analisis kinerja anggaran, dan analisis kinerja intervensi K/L di lokasi prioritas kepada Kementerian PPN/Bappenas.
Juli-Agustus	KL menyampaikan rekapitulasi data capaian output dan realisasi anggaran terkait <i>stunting</i> periode Januari-Juni tahun n kepada Tim Kerja Forum Koordinasi.
September	Tim Kerja Forum Koordinasi dan/atau TPPS Pusat yang membidangi proses Perencanaan dan Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi (Bappenas dan Kemenkeu) menyusun laporan pemantauan kinerja pembangunan dan anggaran penurunan <i>stunting</i> Semester-1 tahun berjalan yang terdiri atas analisis pemantauan kinerja pembangunan dan analisis pemantauan kinerja anggaran semester I tahun berjalan dan dilaporkan kepada Kementerian PPN/Bappenas.
Agustus	Kemenkeu dengan dukungan Bappenas menyusun Nota Keuangan RAPBN tahun n+1 dengan mengakomodir hasil analisis dari penandaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja dan anggaran terkait pelaksanaan program percepatan penurunan <i>stunting</i> .

Sedangkan untuk jenis laporan pemantauan dan evaluasi kinerja yang bersumber dari Belanja K/L dan Belanja DAK yang telah dilakukan sejak tahun 2019 hingga saat ini dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* adalah sebagai berikut:

Tabel 5-2. Jenis Laporan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja yang bersumber dari Belanja K/L dan Belanja DAK

Uraian	Dokumen Ringkasan Rincian <i>Output</i> (RO) yang Mendukung Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	Laporan Kinerja Anggaran dan Pembangunan dari Belanja K/L	Laporan Review DAK yang Mendukung Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>
Tujuan	Mengidentifikasi RO pada K/L yang mendukung percepatan penurunan <i>stunting</i>	Memantau dan mengevaluasi kinerja anggaran dan pembangunan RO terkait <i>stunting</i>	Memantau dan mengevaluasi kinerja anggaran bersumber DAK yang mendukung percepatan penurunan <i>stunting</i>
Fokus	Daftar RO K/L	Gap analysis target dan capaian RO	Gap analysis target dan capaian menu DAK
Periode	Januari Pemutakhiran data pada Juli	Semester: September Tahunan : Maret (n+1)	Tahunan
Metode	Identifikasi Krisna dan RKA K/L	Laporan Mandiri K/L	Analisis data realisasi
Output	1 Laporan (setiap bulan Januari)	2 Laporan (Semester 1 bulan September dan Laporan Tahunan bulan Maret n+1)	1 Laporan (Bulan September n+1)
Penanggung Jawab	Bappenas	Kementerian Keuangan dan Bappenas	Kementerian Keuangan

Selain 3 (tiga) laporan yang sudah berjalan sejak 2019 tersebut, terdapat juga laporan lainnya yang dilakukan oleh K/L lainnya dengan fokus yang berbeda sesuai dengan tanggung jawab K/L di dalam Perpres 72/2021, yaitu:

Tabel 5-3. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah dan Ketepatan Sasaran di Lapangan Berdasarkan Perpres 72/2021

Uraian	Pemantauan dan Evaluasi Pemerintah Daerah	Pemantauan dan Evaluasi Sasaran di Lapangan
Tujuan	Memantau dan Mengevaluasi Kinerja Pemerintah Daerah terkait Stunting melalui Aksi Konvergensi 1 s/d Aksi Konvergensi 8	Memantau dan Mengevaluasi Data Intervensi pada sasaran berdasarkan indikator RAN PASTI
Fokus	Gap Analisis Aksi 1 s/d Aksi 8	Gap Analisis Data Sasaran dan Data Intervensi
Periode	Tahunan	Tahunan
Metode	Analisis data 8 Aksi Konvergensi	Analisis Database sasara dan capaian intervensi pada sasaran (Basis Data Keluarga)
Output	L1 Laporan (Tahunan)	1 Laporan (Tahunan)
Penanggung Jawab	Kemendagri	BKKBN

5.1.2. Kaitan Pelaporan Evaluasi Kinerja Belanja K/L dengan Laporan Evaluasi Lainnya

Selain laporan evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran yang bersumber dari Belanja K/L, terdapat beberapa laporan lainnya yang diamanatkan di dalam Perpres 72/2021. Berikut adalah pembagian tugas Pelaporan Pemantauan dan Evaluasi tersebut:

Tabel 5-4. Pembagian tugas Pelaporan Pemantauan dan Evaluasi yang diamanatkan di dalam Perpres 72/2021

No.	Jenis Laporan	PIC	K/L	Isu
1.	Kinerja Anggaran dan Pembangunan K/L	Bappenas dan Kemenkeu	K/L terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Substansi utama dari laporan: <ul style="list-style-type: none"> - Capaian kinerja K/L sesuai tagging tematik - Capaian kinerja DAK - Capaian indikator berbasis Lamp. A, B, dan pilar dengan pic K/L; 2. Kepatuhan pelaporan mandiri K/L; dan 3. Metadata, termasuk definisi operasional masing-masing indikator
2.	Pemantauan dan Evaluasi Pemerintah Daerah	Kemendagri	K/L terkait, Bappenas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Substansi utama dari laporan: <ul style="list-style-type: none"> - Capaian indikator berbasis Lamp. A, B, dan pilar dengan pic Pemda - Capaian aksi konvergensi 2. Mekanisme pengumpulan data (apakah melalui K/L atau melalui web aksi konvergensi?) 3. Metadata, termasuk definisi operasional masing-masing indikator
3.	Pemantauan dan Evaluasi Sasaran di Lapangan	BKKBN	Kemendagri, Kemenkes, Bappenas	<ol style="list-style-type: none"> 4. Substansi yang disampaikan: <ul style="list-style-type: none"> - Database sasaran pendampingan - Capaian intervensi pada sasaran pendampingan

5.1.1. Outline Laporan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja yang bersumber dari Belanja K/L

Berdasarkan penyusunan pelaporan pemantauan dan evaluasi kinerja yang bersumber dari belanja K/L telah dilakukan sejak tahun 2019, telah dilakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan dan penajaman informasi yang disampaikan, berikut adalah contoh *outline* dari laporan-laporan sebelumnya yang telah disempurnakan dan dapat digunakan sebagai rujukan dalam *outline* laporan.

KATA

PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR

TABEL DAN

GRAFIK

DAFTAR

SINGKATAN

RINGKASAN

EKSEKUTIF

I. PENDAHULUAN

II. PERKEMBANGAN PENANDAAN DAN PERKEMBANGAN

PAGU

2.1. PERKEMBANGAN PENANDAAN

2.1.1. Proses Penandaan (Tagging) Tematik Stunting

2.1.2. Hasil Penandaan (Tagging) Tematik Stunting

2.1.3. Perkembangan Penandaan (Tagging) Tematik Stunting Tahun 2019 –

2022 2.1.4 Tantangan Penandaan (Tagging) Tematik Stunting

2.2. PEMETAAN INDIKATOR PERPRES 72/2021 TERHADAP RINCIAN OUTPUT TA 2022

2.3. PERKEMBANGAN PAGU

2.3.1 Perkembangan Pagu K/L Level Rincian Output Dan Analisis Lanjutan

2.3.2 Perkembangan Pagu K/L Menurut Jenis Intervensi

III. KINERJA ANGGARAN

3.1. REALISASI ANGGARAN

3.1.1. Realisasi Anggaran Pada Level Analisis Lanjutan

3.1.3. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Intervensi Pada Level Analisis Lanjutan

3.2. CAPAIAN OUTPUT

3.3. ANALISIS KINERJA ANGGARAN

3.3.1. Analisis Kinerja Anggaran Intervensi Spesifik

3.3.2. Analisis Kinerja Anggaran Intervensi Sensitif

3.3.3. Analisis Kinerja Anggaran Intervensi Dukungan

3.4. PERBANDINGAN TERHADAP KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

IV. KINERJA PEMBANGUNAN

4.1 KINERJA KONVERGENSI

4.1.1 Konvergensi Lokasi

4.1.2 Konvergensi Sasaran

4.1.3. Konvergensi Koordinasi

4.2 KINERJA CAPAIAN HASIL (OUTPUT)

4.3 ANALISIS KINERJA PEMBANGUNAN

4.3.1 Perkembangan Capaian Output Terhadap Tahun Sebelumnya

4.3.2 Perkembangan Kinerja Konvergensi Terhadap Tahun Sebelumnya

V. KINERJA PROGRAM DI LOKASI PRIORITAS (Contoh Kunjungan lapangan Tahun 2022)

- 5.1 PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN BERBASIS PANGAN LOKAL
- 5.2 PROGRAM BANTUAN SOSIAL BERSYARAT DAN BANTUAN PANGAN SEMBAKO
- 5.3 FASILITASI DAN PEMBINAAN KELUARGA 1000 HPK
- 5.4 PEMBERDAYAAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
- 5.5 AUDIT KASUS STUNTING

VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

- 6.1. KESIMPULAN
- 6.2. REKOMENDASI

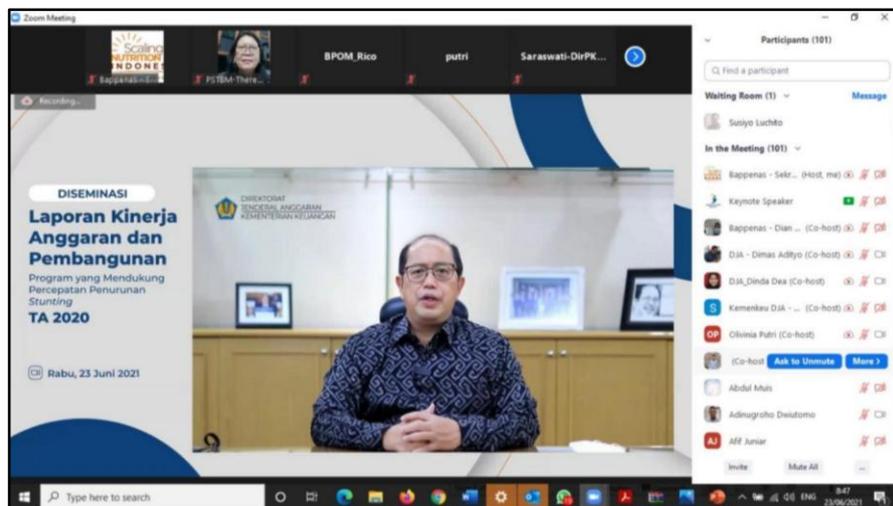
5.2. Diseminasi Informasi

Pelaksanaan diseminasi dilakukan dalam upaya menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja perencanaan dan penganggaran (kinerja pembangunan dan kinerja anggaran) pelaksanaan percepatan penurunan stunting yang bersumber dari belanja K/L.

Diseminasi hasil penandaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran secara luas dan tepat waktu merupakan prinsip utama dalam pengelolaan sistem pemantauan dan evaluasi. Kegiatan ini memudahkan para pengambil kebijakan memantau kinerja dan menyusun perencanaan dan penganggaran ke depan. Proses diseminasi kepada publik dilakukan melalui berbagai kegiatan antara lain *stunting summit*, rembuk *stunting*, diseminasi, rakortek, ratastingkat K/L, dan kegiatan lain yang dapat menjadi media sosialisasi dan diseminasi yang efektif.

Pada tahun 2021 dan 2022 kegiatan diseminasi untuk pengelola program dilakukan secara daring dengan mengundang 20 K/L yang memiliki program terkait dengan upaya pencegahan dan percepatan penurunan *stunting*.

Gambar 5-2. Pelaksanaan Diseminasi Laporan Kinerja Anggaran dan Pembangunan Program yang Mendukung Percepatan Penurunan Stunting TA 2020



Kegiatan diseminasi dapat pula dilakukan pada berbagai wadah dan forum seperti pertemuan strategis para pimpinan K/L dengan Presiden dan Wakil Presiden, Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek), Rapat Tahunan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) dan juga pertemuan forum-forum nasional maupun internasional.

Gambar 5-3. Diseminasi Laporan Kinerja Anggaran dan Pembangunan Program yang Mendukung Percepatan Penurunan Stunting TA 2022 disampaikan pada Rakor TPPS Pusat 10 April 2023



BAB VI PENUTUP

Pelaksanaan pedoman penandaan, pemantauan, dan evaluasi perencanaan dan penganggaran *stunting* berbasis kinerja merupakan inisiatif strategis dalam rangka memudahkan identifikasi *output* dan capaiannya serta besaran alokasi anggaran untuk setiap intervensi serta *lokus* (lokasi) pelaksanaannya yang dilakukan untuk pencegahan dan percepatan penurunan *stunting*.

Kegiatan penandaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* dilakukan dengan mengikuti mekanisme dan waktu evaluasi dan pelaporan keuangan reguler pemerintah. Intervensi untuk *stunting* dilakukan secara bersama-sama secara terintegrasi oleh berbagai kementerian/lembaga, sehingga penyesuaian-penyesuaian diperlukan untuk mengakomodasi berbagai perubahan dan perbaikan yang dibutuhkan.

Tingkat keberhasilan pelaksanaan pedoman ini sangat bergantung kepada kontribusi K/L dalam proses identifikasi dan rekonsiliasi untuk menentukan *output* dan asumsi kontribusinya. Hasil yang diperoleh dalam proses ini akan dijadikan data awal untuk menganalisa kinerja pembangunan dan anggaran pemerintah, mengukur kualitas pengeluaran, dan menilai kontribusinya terhadap upaya pencegahan dan percepatan penurunan *stunting*. Selanjutnya, hasil analisis ini akan menjadi bahan masukan untuk penyusunan perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Beberapa Pertimbangan dalam Melakukan Evaluasi Kinerja Anggaran dan Pembangunan

A. Proporsi Anggaran untuk Menghasilkan Keluaran (RO)

Tidak semua alokasi anggaran yang telah ditandai untuk menghasilkan keluaran (RO) terkait pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* ditujukan semata-mata hanya untuk intervensi *stunting*. Jika tujuan penandaan anggaran yang dipilih adalah tujuan kuantitatif, maka penggunaan asumsi dalam Penandaan anggaran kadang perlu dilakukan untuk menentukan proporsi anggaran yang wajar terhadap intervensi *stunting* melalui penentuan bobot RO yang relevan. Di sisi lain, jika tujuan penandaan anggaran yang dipilih adalah tujuan kualitatif yaitu untuk mengetahui intervensi- intervensi kunci yang akan dipantau dan dievaluasi di sepanjang siklus penganggaran, maka sebaiknya tidak menandai program-program yang hanya sedikit berkontribusi terhadap keseluruhan Stranas *Stunting*. Penentuan kriteria untuk menyeleksi RO yang akan ditandai menjadi kontribusi penting intervensi terhadap pencapaian tujuan Stranas *stunting*.

Jika pembobotan dilakukan (untuk pencapaian tujuan kuantitatif) maka pembobotan dapat dilakukan dengan merujuk kepada hasil studi terkait, perkiraan dan keputusan pakar, serta hasil kesepakatan. K/L dapat menyepakati bobot tersebut bersama dengan DJA dan Bappenas dalam pertemuan rekonsiliasi. Akan tetapi harus diperhatikan bahwa penggunaan bobot harus dilaksanakan secara konsisten tahun demi tahun untuk dapat diperbandingkan dalam periode tertentu.

Asumsi dapat juga disusun berdasarkan data primer (wawancara pakar, tes, pengukuran, dan data lainnya) maupun data sekunder (dokumentasi K/L, data dan hasil evaluasi kinerja anggaran reguler, BPS, literatur, dan data lainnya). **Justifikasi penggunaan asumsi dalam evaluasi kinerja dan anggaran perlu dituliskan secara spesifik dalam laporan.**

Contoh Asumsi dalam Evaluasi Kinerja dan Anggaran *Stunting* untuk Intervensi Gizi Spesifik dan Sensitif diberikan catatan untuk angka dapat berubah/dimutakhirkan sesuai kebijakan dan implementasi program.

Public Expenditure Review (PER) untuk program percepatan penanganan *stunting* yang dilakukan tim Bank Dunia dan Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan tahun 2018 menggunakan beberapa asumsi untuk memetakan belanja K/L, contohnya:

1. Intervensi Spesifik:

- Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) = 1 % dari total belanja JKN yang diperuntukkan bagi kegiatan promotif dan preventif. Asumsi mengacu pada hasil studi *Health Financing System Assessment*, World Bank, 2016 diperbarui dengan kesepakatan baru asumsi pembobotan JKN/KIS menjadi total anggaran RO JKN/KIS X (2% asumsi sasaran Ibu Hamil + 10% asumsi sasaran Balita) X 705 asumsi layanan JKN/KIS yang terkait dengan pelayanan pencegahan dan penurunan *stunting*.

- Jaminan Persalinan (Jampersal) = 100% dari total belanja Jampersal. Pembobotan ini merupakan kesepakatan bersama dalam Multilateral Meeting dan Trilateral Meeting antara Bappenas, Kemenkeu dan Kemenkes terkait dengan bobot alokasi anggaran Jampersal yang mendukung pelayanan pencegahan dan penurunan *stunting*.

2. Intervensi Sensitif:

- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk semua dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas)= 50% dari total belanja PAUD dan Dikmas diperuntukkan bagi pengurangan *stunting*. Asumsi mengacu pada perkiraan dan kesepakatan pakar (*expert estimate*).
- Asumsi 25% dari total belanja pelayanan Pendidikan keluarga untuk penanganan *stunting*. Asumsi berdasarkan penilaian dan kesepakatan pakar bersama dengan Bappenas, Kemenkeu dan Kemendikbudristek.
- Asumsi 30,8% dari total belanja Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) diperuntukkan bagi ibu hamil dan balita terkait untuk penanganan *stunting*. Asumsi mengacu pada data detail penerima PKH tahun 2016.

B. Lokasi Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Tidak semua kegiatan RO yang telah ditandai dilakukan di lokasi prioritas *stunting*. Data di dalam sistem KRISNA, SAKTI, SPAN, maupun SMART seringkali tidak menunjukkan lokasi tempat dilakukannya kegiatan sehingga tidak dapat diketahui dimana penerima manfaat dari masing-masing intervensi berada, seperti contohnya dimana tempat pelaksanaan kegiatan untuk kelompok prioritas 1 (ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia 0-23 bulan) maupun kelompok prioritas 2 (remaja putri, wanita usia subur, dan anak berusia 24-49 bulan) sulit untuk diketahui.

PMK Nomor 214 tahun 2013 tentang Bagan Akun Standar (BAS) telah menetapkan adanya segmen “lokasi” sebagai salah satu kode klasifikasi untuk dasar validasi transaksi keuangan yang proses oleh SPAN. Segmen lokasi menunjukkan tempat berlangsungnya kegiatan dan/atau penerima dana. Kode lokasi di dalam aplikasi SPAN didesain memiliki 4-digit yang terdiri 2-digit untuk kode provinsi dan dua digit untuk kode kabupaten/kota. Oleh karenanya meskipun telah ada upaya untuk dapat mengetahui kode lokasi, SPAN memiliki keterbatasan untuk memberi Informasi terkait tempat berlangsungnya kegiatan hanya sampai di tingkat Kabupaten/Kota. Untuk kegiatan yang berlangsung di tingkat kecamatan dan/atau Desa maka tidak akan dapat diketahui melalui data yang tersimpan di SPAN.

Segmen lokasi di SPAN seringkali hanya dipergunakan untuk mencatat Informasi penerima dana dalam kaitan Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya dana bagi hasil. Sedangkan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh K/L umumnya tidak sedari awal kolom ini diisi untuk menunjukkan tempat berlangsungnya kegiatan yang utamanya disebabkan oleh alasan “fleksibilitas” karena Eselon 1 sebagai pengelola program di K/L menginginkan adanya keleluasaan yang tinggi dalam menentukan lokasi sasaran kegiatan sesuai kebutuhan yang nyata di sepanjang tahun anggaran tersebut

BAS juga memiliki segmen lain yang memiliki Informasi terkait lokasi, yaitu: (i) Segmen Satker yang mencerminkan lokasi unit yang bertanggung jawab dalam melakukan transaksi; dan (ii) Segmen KPPN yaitu kantor pelayanan perbendaharaan di bawah Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang menunjukkan lokasi tempat transaksi pembayaran diproses. Akan tetapi lokasi yang dikaitkan dengan Segmen Satker dan Segmen KPPN memiliki tujuan berbeda dan tidak mencerminkan lokasi tempat dimana kegiatan pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* berlangsung.

Sama halnya dengan SPAN, kode lokasi yang didesain di aplikasi KRISNA memiliki kemampuan menyimpan data lokasi tempat dilaksanakannya kegiatan dan/atau lokasi penerima manfaat kegiatan yang terbatas di tingkat kabupaten/kota dan provinsi saja. Menjadi tantangan tersendiri bagi Satker untuk mengisi data di kolom lokasi pada KRISNA oleh karena kegiatan dapat dilaksanakan di "multilokasi", yaitu satu kegiatan menghasilkan *output* yang tersebar di beberapa lokasi berbeda. Hal ini telah diatasi dengan cara KRISNA yang didesain untuk dapat menyimpan data lokasi di lebih dari satu provinsi dan/atau di lebih dari satu kabupaten/kota untuk setiap *output* suatu kegiatan yang sama.

Oleh karenanya penting untuk diperhatikan bahwa:

1. K/L harus secara tertib mengisi kolom lokasi penerima manfaat di KRISNA secara lengkap untuk seluruh provinsi dan/atau Kabupaten/kota tempat dilaksanakannya suatu kegiatan untuk menghasilkan *output* yang telah ditandai terkait pencegahan dan percepatan penurunan *stunting*;
2. Data (satu atau beberapa) lokasi yang telah tersimpan di KRISNA menjadi referensi bagi aplikasi terkait lainnya (SAKTI, SPAN, dan SMART) sehingga terjamin keselarasan antara perencanaan, anggaran, dan realisasi untuk lokasi dari setiap RO;
3. Harus dijamin bahwa struktur data di kolom lokasi pada KRISNA adalah selaras dengan struktur data di segmen lokasi pada SPAN, sehingga seluruh data rincian lokasi dalam Renja K/L yang telah diinput di KRISNA menjadi referensi data yang tersedia selaras di SPAN sehingga nantinya data yang selaras akan muncul di OM-SPAN; dan
4. Apabila K/L belum memasukkan data lokasi kegiatan di dalam KRISNA, maka K/L perlu membuat laporan tersendiri dengan menggunakan format pada.

Tabel Rincian Kegiatan: Pemetaan kegiatan

Kode	K/L/Program/Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen	Lokasi Perencanaan		Lokasi Aktual Pelaksanaan	
		Provinsi	Kabupaten/Kota	Provinsi	Kabupaten/Kota
	K/L 1				
	Program 1				
	Kegiatan 1				
	KRO 1.1				
	RO 1.1.1				
	Komponen 1.1.1.1				

	Komponen 1.1.1.2				
--	------------------	--	--	--	--

Salah satu kendala yang dihadapi di dalam melakukan pemantauan realisasi belanja adalah ketiadaan Informasi lokasi dimana kegiatan diadakan. Informasi lokasi yang ada di OM-SPAN terbatas pada Informasi: (i) lokasi kedudukan satker dan/atau (ii) lokasi KPPN bayar dan/atau (iii) lokasi PEMDA penerima dana transfer. Lokasi satker K/L pemerintah pusat yang tidak memiliki kewenangan vertikal umumnya berada di Jakarta sedangkan lokasi KPPN seringkali tidak mencerminkan dimana lokasi kegiatan berada. Hal ini akan menyulitkan dalam melakukan analisis karena tanpa adanya Informasi lokasi yang terinci di setiap kabupaten/kota bahkan kecamatan, kelurahan dan desa maka akurasi pelaksanaan kegiatan pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* menjadi berkurang. Diharapkan masing-masing K/L menambah fitur lokasi penerima manfaat kegiatan pada aplikasi yang dimilikinya sehingga akan menambah akurasi data.

Lampiran 2 : Form Evaluasi Mandiri K/L

A. Form I

PROGRAM/KEGIATAN/RO				DI TINGKAT OUTPUT (RO)										
				Kinerja Anggaran (Ribuan Rupiah)					Kinerja Output					
K/L	Program	Kegiatan /KRO	RO	Pagu dalam Dokumen Ringkasan	Pagu Awal DIPA	Pagu Harian DIPA (Ribuan Rupiah)	Realisasi (Ribuan Rupiah)	% Realisasi Anggaran	Target Volume dalam Dokumen Ringkasan	Target Awal DIPA	Target Harian DIPA	Capaian Volume	Satuan	% Capaian Output
2				3	4	5	6	7=6/5	8	9	10	11	12	13=11/10
Kementerian Kesehatan														
I. Jenis Intervensi (Intervensi Spesifik)														
024.DD - Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana														
	6799 Pembinaan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak													
	PEA-Koordinasi													
			001-Kegiatan Koordinasi/Advokasi Terkait Perbaikan Status Gizi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir [LP - 7]	5.506.917	5.506.917	3.899.794	274.770	7,0%	45	45	44	1	Kegiatan	2,3%
			051-Koordinasi LP/LS Pokja Nasional Dalam Upaya Penurunan AKI dan AKB	616.287	616.287	447.264	132.597	29,6%	23	23	44	1	Kegiatan	2,27%
			054-Pertemuan LP/LS, Organisasi Profesi dalam rangka peningkatan mutu layanan primer dan rujukan untuk penurunan AKI AKB	786.380	786.380	640.720	0	0,0%	4	4	44	-	Kegiatan	0,00%
			055-Pertemuan Koordinasi dalam rangka peningkatan mutu pelayanan gizi ibu dan anak	315.100	315.100	175.360	0	0,0%	9	9	44	-	Kegiatan	0,00%
			056-Pertemuan Sistem Surveilans Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	246.300	246.300	246.300	142.174	57,7%	6	6	1	-	Kegiatan	0,00%

			057-Koordinasi dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Matneo pada FKTP PONEH oleh RSUD	3.542.850	3.542.850	2.390.150	0	0,0%	3	3	44	-	Kegiatan	0,00%
			002-Kegiatan Koordinasi dan Advokasi Terkait Perbaikan Gizi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita [LP - 4]	4.288.209	2.087.996	3.136.423	75.855	2,4%	16	16	81	-	Kegiatan	0,0%
			051-Pertemuan Koordinasi LP/LS Kesehatan Balita dan Percepatan Penurunan Stunting	3.324.249	1.124.036	3.136.423	75.855	2,4%	10	10	29	-	Kegiatan	0,00%
			052-Pertemuan Koordinasi Bulan Timbang, Vitamin A dan Taburia	298.560	298.560	298.560	0	0,0%	3	3	26	-	Kegiatan	0,00%
			053-Pertemuan LP/LS, Organisasi Profesi dalam rangka peningkatan mutu layanan primer dan rujukan untuk penurunan prevalensi stunting	416.760	416.760	0	0	0,0%	3	3	26	-	Kegiatan	0,00%
			054-Penyusunan materi gizi bencana	248.640	248.640	165.930	0	0,0%			5	-		
			PEF-Sosialisasi dan Diseminasi											
			002-Pelaksana Program mendapatkan sosialisasi dan diseminasi Pedoman/Modul/Petunjuk Teknis terkait Perbaikan Status Gizi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Balita [LP - 4]	83.550	83.550	53.950	7.927	14,7%	4.500	4.500	4.500	-	Orang	0,0%
			051-Sosialisasi implementasi pedoman penanggulangan balita stunting	29.600	29.600	29.600	7.927	26,8%	1.500	1.500	4.500	-	Orang	0,00%
			052-Webinar series dalam pencegahan dan penanggulangan stunting	53.950	53.950	53.950	0	0,0%	3.000	3.000	4500	-	Orang	0,00%
			PEH-Promosi											
			001-Promosi dan Penyebarluasan Informasi Terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan [LP - 4]	3.261.472	3.261.472	1.598.049	8.964	0,6%	40	40	80	-	Kegiatan	0,0%
			053-PENYEBARLUASAN INFORMASI DALAM UPAYA PERBAIKAN STATUS GIZI DAN KIA	2.563.322	2.563.322	1.247.819	8.964	0,7%	24	24	40	-	Kegiatan	0,00%

			054-Edukasi ASI eksklusif pada ibu menyusui dan pengasuh bayi oleh mitra di 16 provinsi prioritas stunting	698.150	698.150	350.230	0	0,0%	16	16	40	-	Kegiatan	0,00%
--	--	--	--	---------	---------	---------	---	------	----	----	----	---	----------	-------

PROGRAM/KEGIATAN/RO				DI TINGKAT ANALISIS LANJUTAN (LEVEL KOMPONEN ATAU DETIL: ALOKASI YANG BENAR-BENAR TERKAIT STUNTING)													Keterangan	
				Kinerja Anggaran (Ribu rupiah)							Kinerja Output							Kinerja umum (Capaian Output/ Realisasi Anggaran)
K/L	Program	Kegiatan/K RO	RO	Pagu dalam Dokumen Ringkasan	Pagu Awal DIPA	Pagu Harian DIPA	Rencana Penarikan Dana (RPD) Semester I	Realisasi (Total Lokasi)	Realisasi di 12 Lokasi Prioritas	% Realisasi Anggaran	Target Volume dalam Dokumen Ringkasan	Target Awal DIPA	Target Harian DIPA	Capaian Volume	Satuan	% Capaian Output	27=24/18	
2				14	15	16	17	18	19	20=18/16	21	22	23	24	25	26=24/23	27=24/18	28
Kementerian Kesehatan																		
I. Jenis Intervensi (Intervensi Spesifik)																		
024.DD - Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana																		
	6799 Pembinaan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak																	
	PEA-Koordinasi																	
			001-Kegiatan Koordinasi/Advokasi Terkait Perbaikan Status Gizi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir [LP - 7]	558.000	561.400	421.660	-	142.174	-	33,7%	660	-	45	1	Kegiatan	2,2%	0,00%	
			051-Koordinasi LP/LS Pokja Nasional Dalam Upaya Penurunan AKI dan AKB	616.287	616.287	447.264		132.597		29,65%	660	660	44	1	Kegiatan	2,3%	0,00%	
			054-Pertemuan LP/LS, Organisasi Profesi dalam rangka peningkatan mutu layanan primer dan rujukan untuk penurunan AKI AKB	786.380	786.380	640.720		0		0,00%			44	-	Kegiatan	0,0%		

		055-Pertemuan Koordinasi dalam rangka peningkatan mutu pelayanan gizi ibu dan anak	315.100	315.100	175.360		0	0,00%			44	-	Kegiatan	0,0%			
		056-Pertemuan Sistem Surveilans Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	242.900	246.300	246.300		142.174	57,72%			1	-	Kegiatan	0,0%			
		057-Koordinasi dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Matneo pada FKTP PONEB oleh RSUD	3.542.850	3.542.850	2.390.150		0	0,00%	3	3	44	-	Kegiatan	0,0%	#DIV/0!		
		002-Kegiatan Koordinasi dan Advokasi Terkait Perbaikan Gizi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita [LP - 4]	4.288.209	1.124.036	3.136.423	-	75.855	-	2,4%	16	16	81	-	Kegiatan	0,0%	0,00%	
		051-Pertemuan Koordinasi LP/LS Kesehatan Balita dan Percepatan Penurunan Stunting	3.324.249	1.124.036	3.136.423		75.855		2,42%	10	10	29	-	Kegiatan	0,0%	0,00%	
		052-Pertemuan Koordinasi Bulan Timbang, Vitamin A dan Taburia	298.560	298.560	298.560		0		0,00%	3	3	26	-	Kegiatan	0,0%		
		053-Pertemuan LP/LS, Organisasi Profesi dalam rangka peningkatan mutu layanan primer dan rujukan untuk penurunan prevalensi stunting	416.760	416.760	0		0		#DIV/0!	3	3	26	-	Kegiatan	0,0%		
		054-Penyusunan materi gizi bencana	248.640	248.640	165.930		0		0,00%			5	-	Kegiatan	0,0%		
		PEF-Sosialisasi dan Diseminasi															
		002-Pelaksana Program mendapatkan sosialisasi dan diseminasi Pedoman/Modul/Petunjuk Teknis terkait Perbaikan Status Gizi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Balita [LP - 4]	83.550	53.950	53.950	-	7.927	-	14,7%	1.884	1.884	4.500	-	Orang	0,0%	0,00%	
		051-Sosialisasi implementasi pedoman penanggulangan balita stunting	29.600	29.600	29.600		7.927		26,78%	1.500	1.500	4.500	-	Orang	0,0%		

		052-Webinar series dalam pencegahan dan penanggulangan stunting	53.950	53.950	53.950		0		0,00%	384	384	4.500	-	Orang	0,0%	#DIV/0!	
		PEH-Promosi															
		001-Promosi dan Penyebarluasan Informasi Terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan [LP - 4]	3.261.472	3.261.472	1.598.049	-	8.964	-	0,6%	40	40	80	-	Kegiatan	0,0%	0,00%	
		053-PENYEBARLUASAN INFORMASI DALAM UPAYA PERBAIKAN STATUS GIZI DAN KIA	2.563.322	2.563.322	1.247.819		8.964		0,72%	24	24	40	-	Kegiatan	0,0%	0,00%	
		054-Edukasi ASI eksklusif pada ibu menyusui dan pengasuh bayi oleh mitra di 16 provinsi prioritas stunting	698.150	698.150	350.230		0		0,00%	16	16	40	-	Kegiatan	0,0%		

B. Form II

PROGRAM/KEGIATAN/RO	MENDUKUNG INDIKATOR PERPRES 72/2021		Kesesuaian Lokasi (Jumlah Kab/Kota)				Sasaran Prioritas Ibu Hamil		Sasaran Prioritas Baduta (0-23 bulan)		Sasaran Balita (24-59 bulan)		Sasaran Keluarga Memiliki Baduta/Balita		Sasaran Remaja Putri (12-18 tahun)		Sasaran Calon Pengantin		Sasaran Wanita Usia Subur		Sasaran lainnya (Masyarakat umum, OPD level kab/kota, sasaran desa, tenaga kesehatan, lembaga PAUD, puskesmas, posyandu, TPK, KPM, Pendamping PKH, gapoktan, kelompok masyarakat dll)				Koordinasi dengan SSB						
			Ya/Tidak	Indikator	Jumlah Lokasi (Kab/Kota) di 12 Provinsi Prioritas (Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah)	Jumlah Lokasi (Kab/Kota) Lainnya	Total	Sasaran Lokasi (Pusat/Provinsi/Kab/Kota)	Ya/Tidak	Jumlah	Ya/Tidak	Jumlah	Ya/Tidak	Jumlah	Ya/Tidak	Jumlah	Ya/Tidak	Jumlah	Ya/Tidak	Jumlah	Ya/Tidak	Jumlah	Ya/Tidak	Jika Ya, Sebutkan Kelompok Sasaran	Jumlah	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak		
																														8	9
II. Jenis Intervensi (Intervensi Sensitif)																															
0663 DR-Program Pengawasan Obat dan Makanan																															
1165- Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia																															
EDC-Pemeriksaan dan Pemantauan Masyarakat																															
001- Akseptabel yang ditunjukkan pengeluhannya melalui PHE																															
BMB-Komunitas, Womani dan Eskaku oleh UPT	Tidak	N/A	49	24	73		UPT	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Masyarakat umum	307.965 orang	Ya	Ya	Ya	Takoh Masj		
001- Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT																															
001- Pelaksanaan standar Obat dan Makanan ke Masyarakat	Tidak	N/A	30	43	73		UPT	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	73 instansi (Balai POM, Balai besar, UPT)	5.322 layanan	Ya	Ya	Ya			
QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga																															
002-Desa Pangan Aman																															
001-Perkuatan kapasitas desa	Ya	persentase Kabupaten/Kota yang mengintervensi keamanan pangan untuk mendukung percepatan penurunan stunting	39	49	88	Kab/Kota	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	198 (karang taruna putri)	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Kader- Kader PKK- Kader Pengurus Posyandu	3.435 kader	Ya	Ya	Tidak	- Pemerintah Pemerintah (Dinas Kese/ Kelurahan/ Kecamatan/ PK/ Kemendagri/ Kementerian BKXBN)			
002-Pembinaan komunitas desa	Ya	persentase Kabupaten/Kota yang mengintervensi keamanan pangan untuk mendukung percepatan penurunan stunting	39	49	88	Kab/Kota	Ya	455	Tidak	Tidak	Ya	539 (ibu yang memiliki Balita) 315 (ibu menyusui) 310 (ibu memiliki anak stunting)	Ya	942	Tidak	Tidak	Ya	539 (ibu yang memiliki Balita) 315 (ibu menyusui) 310 (ibu memiliki anak stunting)	Ya	Komunitas- Remaja Putri- Guru- Penjaja Kami	7.904 komunitas	Ya	Ya	Tidak	- Pemerintah Pemerintah (Dinas Kese/ Kelurahan/ Kecamatan/ PK/ Kemendagri/ Kementerian BKXBN)						
003-Pengawasan keamanan pangan desa	Ya	persentase Kabupaten/Kota yang mengintervensi keamanan pangan untuk mendukung percepatan penurunan stunting	39	49	88	Kab/Kota	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	WTP- Warung Makan- PKL (Pedagang Kaki Lini)	681 komunitas (kaki- 58 (WTP) - 197 (PKL) - 89 (Rakot) - 19 (Warung makan) - 136 (PKK) - 130 (ibu Rumah Tangga)	Ya	Ya	Tidak	- OPD terkait - Pemerintah			
QA-Pengawasan dan Pengendalian Produk																															
001-Sampai pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT																															
001-Pengetatan sampel makanan	ya	hasil pengawasan pangan fortifikasi yang dilanjutkan oleh pelaku usaha	47	23	70	Kab/Kota																									
002-Penurunan bobot/berat sampel	ya	hasil pengawasan pangan fortifikasi yang dilanjutkan oleh pelaku usaha	47	23	70	Kab/Kota																									
4120- Penguatan Produksi Pangan Olahan																															
QDB-Pelayanan Publik kepada Masyarakat																															
Laporan koordinasi pengawasan pangan fortifikasi																															
001- Pelaksanaan Pengawasan Pangan Fortifikasi di Tingkat Produksi	Ya	hasil pengawasan pangan fortifikasi yang dilanjutkan oleh pelaku usaha	47	23	70	Kabupaten/ Kota	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	pelaku usaha sarana produksi pangan fortifikasi								

C. Form III

PROGRAM/KEGIATAN/RO	Analisis Gap antara Capaian Kinerja dengan Target (On track/sesuai, terhambat/tertunda, dll)		Dampak Kebijakan Automatic Adjustment (AA) serta implementasinya			Revisi kendala implementasi/faktor keberhasilan (dari sisi perencanaan & penganggaran, proses pelaksanaan, keterlibatan/peran serta pemangku kepentingan, atau aspek lain yang relevan)	Pelaksanaan Konvergensi Lintas Program (Ya/Tidak, Misal menggunakan data sasaran bersama lintas program/Adanya koordinasi dan sosialisasi lintas program/Lokasi pelaksanaan diintegrasikan dengan program lain/Monitoring evaluasi bersama lintas K/LJ/Sistem pencatatan dan pelaporan bersama lintas program. Serta kendala dalam konvergensi lintas program.	Re
	Analisis Gap Kinerja Anggaran	Analisis Gap Kinerja Output	Ada Penghematan (ya/tidak)	Target output turun (ya/tidak)	Keterangan (penyelesaian revisi DIPA, perubahan skema implementasi, dll.)			
1	4	5	6	7	8	9	10	
II. Jenis Intervensi (Intervensi Sensitif)								
0663-DR-Program Pengawasan Obat dan Makanan								
3165-Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia								
BDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat								
001-Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE								
051-Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	Total pagu anggaran KIE oleh UPT sebesar Rp100.150.911.000 sampai dengan semester I tahun 2024, realisasi anggaran KIE sebesar Rp83.630.066.155 dengan capaian 83,5%.	Target KIE oleh UPT seluruh Indonesia selama tahun 2024 adalah 307.965 orang. Sampai dengan semester I tahun 2024, jumlah peserta yang telah mengikuti KIE sejumlah 276.183 orang dengan capaian 89,68%.	Tidak	Tidak	Tidak ada perubahan skema implementasi	Kegiatan KIE dilakukan secara luring dan daring dengan melibatkan pemangku kepentingan (tokoh masyarakat)	Tidak	Meningkatkan tokoh masyarakat
BMB-Komunikasi Publik								
001-Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan								
051-Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	Total pagu anggaran publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat sebesar Rp7.158.865.000 sampai dengan semester I tahun 2024, realisasi anggaran sebesar Rp2.625.440.740 dengan capaian 36,7%.	Target publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat selama tahun 2024 adalah 5.322 layanan. Sampai dengan semester I tahun 2024, jumlah layanan publikasi sejumlah 1.394 layanan dengan capaian 26,19%.	Tidak	Tidak	Tidak terdapat skema perubahan implementasi	Layanan publikasi keamanan dan mutu obat dan makanan tetap dilakukan dengan menyebarkan informasi melalui berbagai media (media sosial, elektronik, online maupun luar ruang) yang bekerja sama dengan berbagai lintas sektor.	Tidak	Meningkatkan pemberitaan media elektronik media luar
QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga								
002-Desa Pangan Aman								
051-Perkuatan kapasitas desa	Sesuai	Sesuai	Tidak	Tidak	Tidak ada perubahan skema implementasi	Tidak terdapat perubahan skema implementasi	Ya. Sinergi dengan program PMT Berbahasan Pangan Lokal Kemenkes, lokasi integrasi berada di 57 kab/kota	Melakukan pra evaluasi prog
052-Pemberdayaan komunitas desa	Sesuai	Sesuai	Tidak	Tidak	Tidak ada perubahan skema implementasi	Tidak terdapat perubahan skema implementasi	Ya. Sinergi dengan program PMT Berbahasan Pangan Lokal Kemenkes, lokasi integrasi berada di 57 kab/kota	Melakukan pra evaluasi prog
053-Pengawasan keamanan pangan desa	Sesuai	Sesuai	Tidak	Tidak	Tidak ada perubahan skema implementasi	Tidak terdapat perubahan skema implementasi		Melakukan pra evaluasi prog

Lampiran 3 : Contoh Ringkasan RO Tagging Tematik *Stunting* TA 2023

K/L	Program	Kegiatan	KRO	RO/Komponen	Target	Satuan	Alokasi Level RO (Ribu Rupiah)	Alokasi Level Analisis Lanjutan (Ribu Rupiah)	Status Tagging	Jenis Intervensi	Lokasi	Sasaran
007-SEKRETARIAT NEGARA												
	007.CA-Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden											
		5958-Penyusunan Analisis Kebijakan kepada Wakil Presiden Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan										
			ABG-Kebijakan Bidang Kesehatan									
				001-Hasil analisis kebijakan dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan strategi percepatan pencegahan stunting	1	Laporan	4.299.370	4.299.370	tagging	dukungan	pusat	Pemda
				052-Melaksanakan Penguatan Kapasitas Lembaga Pelaksana			1.560.363	1.560.363				
				051-Melaksanakan Penguatan Kapasitas Koordinasi, Monitoring, dan Penyelesaian Masalah			282.078	282.078				
				053-Pelaksanaan Aktivitas Internal Tim Percepatan Pencegahan Anak Kerdil			2.157.559	2.157.559				
				053-Pelaksanaan Aktivitas Internal Tim Percepatan Pencegahan Anak Kerdil			299.370	299.370				

K/L	Program	Kegiatan	KRO	RO/Komponen	Target	Satuan	Alokasi Level RO (Ribu Rupiah)	Alokasi Level Analisis Lanjutan (Ribu Rupiah)	Status Tagging	Jenis Intervensi	Lokasi	Sasaran
010-KEMENTERIAN DALAM NEGERI												
	010.CP-Program Tata Kelola Kependudukan											
		1269-Pembinaan Administrasi Kependudukan										
			QAA-Pelayanan Publik kepada masyarakat									
				004-Akta Kelahiran yang diterbitkan	400000	Akta	600.000,00	600.000,00	Tagging	Dukungan	514 Kab/Kota	Penduduk (anak 0-18 tahun)
				051-FGD Implementasi Kebijakan Pencatatan Kelahiran	10	Daerah	300.000,00	219.760,00				
				052-Asistensi dan Supervisi Pencatatan Kelahiran Yang Belum Mencapai Target Nasional	10	Daerah	150.000,00	150.000,00				
				053-Pendampingan Layanan Pencatatan Sipil di perwakilan RI	2	Negara	150.000,00	230.240,00				
018-KEMENTERIAN PERTANIAN												
	018.HA-Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas											
		1762-Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Tanaman Pangan										

K/L	Program	Kegiatan	KRO	RO/Komponen	Target	Satuan	Alokasi Level RO (Ribu Rupiah)	Alokasi Level Analisis Lanjutan (Ribu Rupiah)	Status Tagging	Jenis Intervensi	Lokasi	Sasaran
				RAI-Sarana Pengembangan Kawasan								
				625-Kawasan Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi)	150000	Hektar	235.500.000	235.500.000	Tagging	Sensitif		Dinas pengampu program, pokja tani
				051-Penyaluran Sarana Produksi Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi) Pusat	103150	Hektar	161.945.500	161.945.500				
				051-Penyaluran Sarana Produksi Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi) TP Prov	46850	Hektar	73.554.500	73.554.500			29 provinsi, 125 kab/kota	
KEMENTERIAN KESEHATAN												
	024.DD-Program Kesehatan Masyarakat											
		6808-Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian										
			QEC-Bantuan Produk									
				509-Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan program Penyakit Tropis Terabaikan (LP)	2	Paket	17.089.411	17089411	Tagging	Spesifik	Provinsi, Dinas kesehatan provinsi	

K/L	Program	Kegiatan	KRO	RO/Komponen	Target	Satuan	Alokasi Level RO (Ribu Rupiah)	Alokasi Level Analisis Lanjutan (Ribu Rupiah)	Status Tagging	Jenis Intervensi	Lokasi	Sasaran
				100-Menyediakan Obat Filariasis	1	Paket	5433567	5433567				
				101-Menyediakan Obat Penyakit Menular	1	Paket	11655844	11655844				
		6799-Pembinaan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak										
		QKA-Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat										
				005-Kegiatan Surveilans Gizi dan KIA	53	Laporan	2.257.000	1712000	Tagging	Spesifik	Pusat	
				051-Penguatan Sistem Surveilans Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	1	Laporan	1030000	1030000				
				052-Pertemuan koordinasi integrasi aplikasi GKIA dengan IHS /aplikasi lain	8	Laporan	302700	302700				
				053-Pertemuan Analisis dan Pemanfaatan data Surveilans Gizi KIA Tingkat Nasional	4	Laporan	50500	50500				
				054-Pelaksanaan Sistem Surveilans Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	6	Laporan	249100	249100				
				055-Pertemuan Feedback Hasil Analisis Data Surveilans Gizi KIA	12	Laporan	33200	33200				

K/L	Program	Kegiatan	KRO	RO/Komponen	Target	Satuan	Alokasi Level RO (Ribu Rupiah)	Alokasi Level Analisis Lanjutan (Ribu Rupiah)	Status Tagging	Jenis Intervensi	Lokasi	Sasaran
				056-Diseminasi Hasil Surveilans Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	4	Laporan	46500	46500				
				057-Pertemuan analisis fitur pengkajian di MPDN	3	Laporan	16200					
				058-Pertemuan koordinasi pelaksanaan AMPSR	14	Laporan	328800					
				059-Penyediaan jasa Tim Helpdesk Surveillance Gizi KIA	1	Laporan	200000					
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)												
	068.DJ-Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana											
		3317-Pembinaan Keluarga Balita dan Anak										
			AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria									
				001-Pedoman di bidang pembinaan keluarga balita dan anak	2	Dokumen	300.000	300.000	Tagging	Sensitif	Pusat	OPD pengampu KB
				051-Pengembangan pedoman, panduan, materi dan Media KIE Program BKB	2	Dokumen	300.000	300.000				

K/L	Program	Kegiatan	KRO	RO/Komponen	Target	Satuan	Alokasi Level RO (Ribu Rupiah)	Alokasi Level Analisis Lanjutan (Ribu Rupiah)	Status Tagging	Jenis Intervensi	Lokasi	Sasaran
				UAE-Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan								
				001-Laporan Monitoring stunting terpadu	4	Laporan	700.000	700.000	Tagging	Dukungan	12 provinsi prioritas	OPD pengampu program, kader TPK
				057-Pelaksanaan Monitoring stunting terpadu	4	Laporan	700.000	700.000				



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

**Kedeputan Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan
Kementerian PPN/Bappenas**

Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta Pusat, 10310
Telp: (021) 3156156, Fax (021) 3148552
Email: sekretariat.pm2k@bappenas.go.id



**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Direktorat Jenderal Anggaran
Kementerian Keuangan**

Jl. DR. Wahidin No. 1, Jakarta, 10710
Telp: (021) 3505663, Fax: (021) 3505659
www.anggaran.kemenkeu.go.id

